

Bunga Rampai

**MEMBANGUN POLA PIKIR
KETAHANAN NASIONAL
GUNA MEWUJUDKAN
KEAMANAN NASIONAL**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Bunga Rampai

**MEMBANGUN POLA PIKIR
KETAHANAN NASIONAL
GUNA MEWUJUDKAN
KEAMANAN NASIONAL**

**DEWAN KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

BUNGA RAMPAI
MEMBANGUN POLA PIKIR KETAHANAN NASIONAL
GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL

Penulis :

Harjo Susmoro
I Gusti Putu W
Ari Purnomo

Perancang Isi :

Nadia Talita Putri
Daniel Maruli Tua Manik
Karina Dewi

Editor :

Widodo Setiyo Pranowo

Desain Cover :

Natalina Pakpahan
Yayat Ruhiat

Penerbit :

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat

Telp : (021) 345-1067

Web : www.wantannas.go.id

email : setjen@wantannas.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. atas nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang luar biasa, sehingga buku “Bunga Rampai” ini dapat rampung diterbitkan. Buku ini sejatinya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh berbagai kalangan, dengan mengusung tema besar “Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional guna Mewujudkan Keamanan Nasional”.

Seluruh negara di dunia akan terus berusaha mengejar kepentingan nasionalnya. Salah satunya mencapai kebebasan dari berbagai bentuk ancaman *azimuthal* untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga eksistensi negara. Dalam mewujudkan keamanan nasional, Indonesia menjangkau pelbagai spektrum keamanan yang begitu luas dengan cara membangun ketahanan nasional. Hal ini dilakukan tentu untuk menciptakan situasi aman dan dengan didukung oleh kemajuan teknologi, sehingga proses pembangunan nasional dapat diraih. Selanjutnya, apabila kesejahteraan nasional ini didapatkan, maka modal untuk mewujudkan keamanan akan semakin terbuka.

Kami menyadari buku ini masih begitu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun demi kesempurnaan buku ini sangat kami harapkan untuk pemutakhiran pada edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan sekaligus memberikan manfaat bagi para Pembaca yang budiman.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2022
Editor,

SAMBUTAN SESJEN WANTANNAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan ridho-Nya, sehingga buku “Bunga Rampai” ini dapat diterbitkan. Wantannas RI merupakan lembaga yang memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Persoalan ketahanan nasional dewasa ini bukan hanya dalam ranah militer saja, namun juga menyangkut multidimensional dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi tantangan keamanan yang dihadapi semakin kompleks, tidak lagi hanya menyangkut politik dan ideologi atau terorisme semata, tetapi juga ketahanan ekonomi, energi, lingkungan hidup, dan yang terakhir ini terkait kesehatan dengan adanya pandemi Covid-19. Sehingga dipandang perlu untuk menguatkan peran lembaga Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) sebagai lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait masalah Kamnas yang bersifat krusial, mendesak, dan strategis.

Presiden Jokowi memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan melaksanakan pembangunan dari berbagai aspek seperti infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia penting untuk menegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI; merevitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan; penguatan dan pengembangan konektivitas maritime; rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi *biodiversity*; serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai program-program utama dengan mengimplementasikan konsep keamanan nasional yang komprehensif.

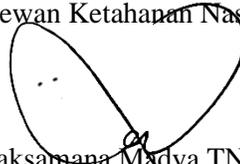
Buku Bunga Rampai ini merupakan kumpulan tulisan yang membahas tema “Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional guna Mewujudkan Keamanan Nasional”. Terdapat 7 topik yang akan dibahas dalam buku ini, Merawat Keutuhan Indonesia guna Membangun Kedaulatan Bangsa sebagai Modal Dasar Ketahanan Nasional, Pemanfaatan Bonus Demografi sebagai

Pengoptimalan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional, Penguatan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Bangsa guna Mewujudkan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045, Peranan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi, Membangun Paradigma Pendidikan Nasional untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berkarakter, Membangun Kemandirian Ekonomi Dalam Rangka Menyiapkan Kemandirian Bangsa Guna Mewujudkan Pertahanan Dan Keamanan Nasional, serta Nasionalisme dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional.

Kami sampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada para penulis yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi Buku Bunga Rampai ini. Semoga buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi para Pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2022
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional



Laksamana Madya TNI
Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,
S.H., M.H., M.Tr. Opsla.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Sambutan Sesjen Wantannas	iv
Daftar Isi.....	vi
Prolog: Keamanan Nasional Untuk Masyarakat Modern	1
Merawat Keutuhan Indonesia Guna Membangun Kedaulatan Bangsa Sebagai Modal Dasar Ketahanan Nasional	9
Pemanfaatan Bonus Demografi Sebagai Pengoptimalan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional	39
Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045	51
Peranan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional	64
Membangun Paradigma Pendidikan Nasional Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berkarakter	87
Membangun Kemandirian Ekonomi Dalam Rangka Menyiapkan Kemandirian Bangsa Guna Mewujudkan Pertahanan Dan Keamanan Nasional.....	121
Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional ..	155
Epilog: Menuju Negara Republik Indonesia Yang Modern, Aman, Adil Dan Sejahtera.....	173
Biografi Penulis	183

PROLOG: KEAMANAN NASIONAL UNTUK MASYARAKAT MODERN

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla¹

Prof. Dr. Widodo Setiyo Pranowo, . S.T., M.Si^{2,3}

¹ Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia

² Laboratorium Data Laut dan Pesisir, Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

³ Prodi Hidrografi, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Jakarta.



*Langit selalu menyelimuti hangat lautan,
yang mendekap erat bumi pertiwi*

Harjo Susmoro & Widodo S. Pranowo



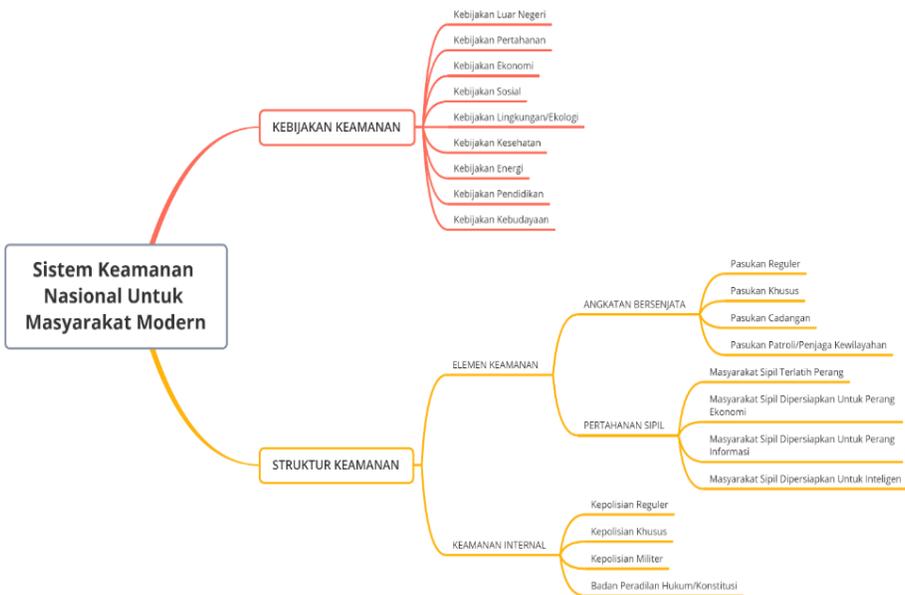
PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak berdiri pada tahun 1945 hingga saat ini, telah terbukti memiliki ketahanan nasional yang sangat tinggi. NKRI telah berhasil dibela dan dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia dari penjajahan, dari pemberontakan separatis, hingga tahan terhadap segala ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang sifatnya kekinian. Ketahanan nasional NKRI dan segenap bangsa Indonesia terkini telah teruji dari permasalahan krisis moneter, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konflik suku-agama-ras-antar-golongan (SARA), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, dan era globalisasi. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, teknologi, dan politik dunia, permasalahan tersebut di atas, tidaklah lantas hilang begitu saja, melainkan menjadi bahaya laten atau bertransformasi menjadi bahaya yang lebih spesifik dan canggih terhadap masyarakat dan/atau setiap individu Warga Negara Indonesia (WNI). Artinya NKRI, masyarakat, dan setiap individu-individu warga negara Indonesia harus memiliki keamanan dan pertahanan tingkat tinggi agar bisa menciptakan ketahanan nasional yang kuat dan berkesinambungan, sehingga tujuan cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia seperti yang tercantum di Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 akan tetap lestari terjaga dan terwujudkan secara berkelanjutan.

Sistem keamanan nasional untuk masyarakat modern seperti kondisi saat ini, apabila ditilik kepada konseptual awal yang masih secara umum dikemukakan oleh Grizold (1994), maka terdapat 2 (dua) komponen utama sebagai penopangnya. Komponen penopangnya tersebut adalah kebijakan keamanan dan struktur keamanan. Kebijakan keamanan pada era industrialisasi seperti yang sedang kita alami saat ini akan mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan berbagai kebijakan pemerintahan, seperti; kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan lingkungan/ekologi, kebijakan kesehatan, kebijakan energi, kebijakan pendidikan dan kebijakan kebudayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut pun tentunya dituntut untuk selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia di masa mendatang.

Komponen penopang utama kedua, yakni struktur keamanan, akan sangat kuat dan efektif, manakala didukung penuh oleh eksisnya elemen keamanan dan eksisnya keamanan internal. Elemen keamanan adalah terdiri dari

Angkatan bersenjata dan pertahanan sipil. Angkatan bersenjata merupakan elemen utama dalam menghadapi ‘face to face’ lawan /musuh yang secara terang-terangan mengganggu / merongrong / mengancam / merampas / menyerang keamanan nasional. Elemen keamanan pendukung yang tidak kalah pentingnya untuk menjamin/mempertahankan keamanan nasional adalah pertahanan sipil. Pertahanan sipil ini dapat dipersiapkan untuk menghadapi ancaman perang ekonomi, perang informasi, dan/atau dipersiapkan untuk membantu intelijen, karena masyarakat sipil bisa bergerak lebih luwes. Sedangkan keamanan internal umumnya tersusun dari komponen kepolisian, baik kepolisian reguler, kepolisian khusus, kepolisian militer, yang harus bekerja sama dengan baik dan kompak dengan badan peradilan hukum/konstitusi. Deskripsi pada kedua paragraf di atas, dituangkan secara sederhana sebagai began teori pada Gambar 1, yang tidak secara penuh diadaptasi dari Grizold (1994).

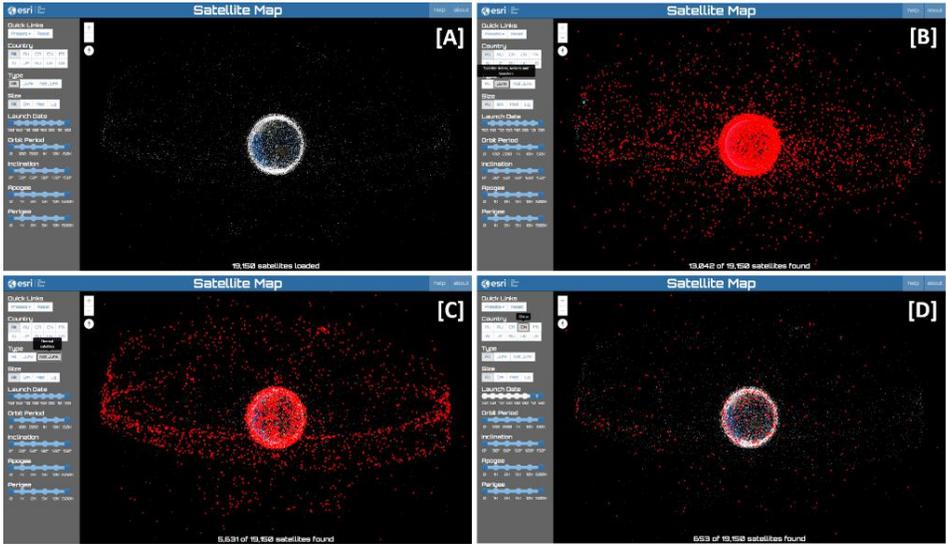


Gambar 1. Teori umum sistem keamanan nasional untuk masyarakat modern, diadaptasi dari Grizold (1994).

TANTANGAN GLOBALISASI

Era globalisasi ditandai dengan adanya perkembangan teknologi mesin, elektronika, dan komputasi, yang dimulai dari tahun 1950 hingga saat ini dengan sangat cepat. Era globalisasi ini juga menjadi suatu tantangan keamanan nasional. Salah satu teknologi yang menjadi tantangan keamanan nasional adalah teknologi satelit. Perkembangan tersebut dapat terlihat jelas dari statistika peluncuran satelit ke ruang angkasa. Perusahaan perangkat lunak geospasial internasional, ESRI, mencatat bahwa pada kurun waktu 1950 hingga 2020 di ruang angkasa ditemukan total ada 19.150 satelit (baca: Sembilan belas ribu seratus lima puluh satelit). Masyarakat awam mungkin tidak pernah menyangka bahwa bumi kita telah diselimuti oleh puluhan ribu satelit. Dari puluhan ribu satelit tersebut, ternyata ada yang telah menjadi sampah ruang angkasa sekitar 13.042 satelit (baca: tiga belas ribu empat puluh dua) dan ada yang diduga masih aktif sekitar 5.631 satelit (baca: lima ribu enam ratus tiga puluh satu satelit), lihat Gambar 2. Namun, ketika menilik data statistik per dekade (sepuluh tahunan) dari tahun 1950 hingga 2020, lihat Tabel 1, maka terjadi selisih jumlah satelit yang cukup signifikan, yakni sekitar 2.166 (baca: dua ribu seratus enam puluh enam satelit) hingga 2.643 satelit (baca: dua ribu enam ratus empat puluh tiga satelit). Selisih jumlah satelit tersebut bisa menyebabkan spekulasi bahwa, jumlah satelit yang lebih dari dua ribuan tersebut diduga hancur/hilang di angkasa, ada yang jatuh ke bumi, dan mungkin juga ada yang tidak diregistrasi lintasan orbitnya karena berfungsi sebagai satelit mata- mata. Satelit-satelit tersebut ada yang memiliki lintasan orbit di dekat bumi dan ada yang jauh dari bumi. Keberadaan satelit di orbitnya tersebut memiliki kerentanan terhantam oleh meteor/asteroid, dan juga berpotensi jatuh ke bumi, walaupun bumi dilindungi oleh atmosfer yang berlapis, namun tetap memiliki potensi jatuh hingga ke tanah yang mengancam penduduk bumi.

Satelit-satelit tersebut ada yang memiliki lintasan orbit di dekat bumi dan ada yang jauh dari bumi. Keberadaan satelit di orbitnya tersebut memiliki kerentanan terhantam oleh meteor/asteroid, dan juga berpotensi jatuh ke bumi, walaupun bumi dilindungi oleh atmosfer yang berlapis, namun tetap memiliki potensi jatuh hingga ke tanah yang mengancam penduduk bumi.

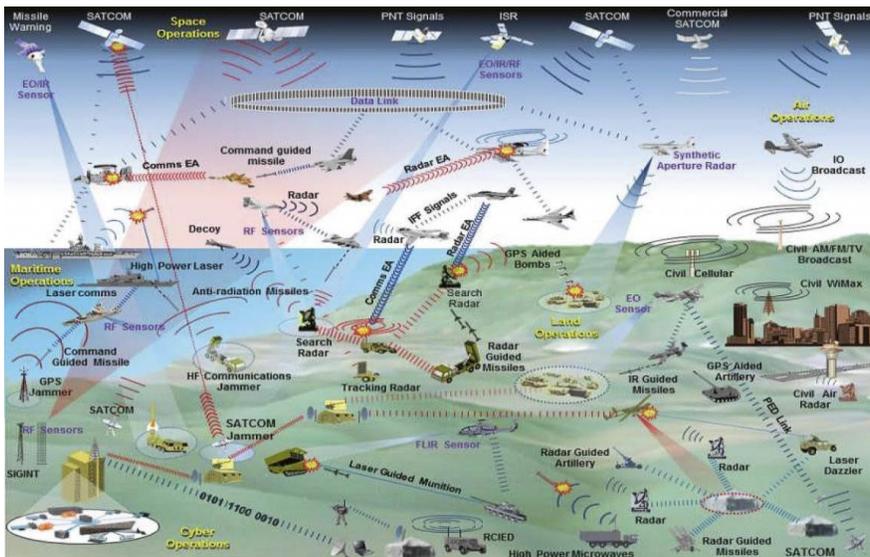


Gambar 2. Sebaran satelit dan benda luar angkasa di sekitar bumi. [A] Teridentifikasi ada 19150 satelit yang diluncurkan pada 1950-2020. [B] 13042 benda di luar angkasa yang teridentifikasi sebagai sampah pada 1950-2020. [C] Teridentifikasi ada 5631 satelit normal aktif pada 1950-2020. [D] Tiongkok meluncurkan sekitar 653 satelit pada 2010-2020. (Sumber asli ESRI.com, 2021).

Table 1. Data satelit/benda ruang angkasa yang tercatat diluncurkan dari bumi ke ruang angkasa periode 1950-2020 (diolah dari ESRI.com)

	Satelit Normal Aktif	Sampah Luar Angkasa (Satelit non-aktif, roket, booster, dsb)	Jumlah Benda Luar Angkasa /Satelit (Penjumlahan baris)
	[A]	[B]	[C]
1950-1960	4	3	7
1960-1970	273	1016	1289
1970-1980	510	1790	2300
1980-1990	798	1609	2407
1990-2000	759	5574	6333
2000-2010	567	727	1294
2010-2020	1867	1010	2877
Jumlah Benda Luar Angkasa/Satelit (penjumlahan kolom)	4778	11729	16507

Satelit yang mengelilingi bumi tersebut selain ada yang memang khusus diciptakan sebagai satelit mata-mata, namun banyak juga satelit yang memang diperuntukkan untuk keperluan fungsional lainnya seperti: untuk memantau bencana di bumi, untuk memantau perubahan dan variabilitas iklim, untuk navigasi, untuk telekomunikasi, dan lain sebagainya. Namun, bukan berarti satelit yang berfungsi sebagai satelit non mata-mata tersebut tidak bisa digunakan datanya untuk keperluan analisis intelijen. Contoh satelit yang riskan untuk keamanan nasional adalah satelit-satelit mikro google yang diluncurkan untuk berkomunikasi dan/atau memverifikasi dengan pesawat drone google dan mobil *google street view*, lihat Gambar 3. Secara manfaat umum navigasi, maka data-data hasil akuisisi yang dilakukan perusahaan google tersebut memiliki daya ungkit yang tinggi untuk kegiatan ekonomi dan transportasi, namun tetap perlu dikhawatirkan juga bahwa sudah tidak ada rute-rute dan lokasi strategis hankam yang bisa disembunyikan lagi. Data-data navigasi yang dengan mudah diakses oleh publik tersebut dikhawatirkan dapat dengan mudah digunakan membangun teknologi untuk memandu rudal/roket atau sistem persenjataan jarak jauh dan/atau memudahkan membidik sasaran jarak jauh, lihat Gambar 4.



Gambar 3. Ilustrasi perang masa di era teknologi elektronika, satelit dan komputasi (Sumber: Spreckelsen, 2018).



Gambar 4. Mobil google street view, pesawat drone google, dan satelit mikro google
(Sumber: Google, 2021).

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Seiring dengan perkembangan teknologi mesin robotika, *big data/database*, komputasi kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), dan *internet of things* (IoT), maka diperlukan *roadmap* terkait pembangunan sistem keamanan nasional yang terintegrasi dan komprehensif. *Roadmap* tersebut harus disusun secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan masing-masing jangka tersebut menyiapkan perencanaan baik penyediaan teknologi perang/hankam; penyiapan dan regenerasi sumber daya manusia (SDM) pengawak teknologi perang/hankam; penyiapan dan regenerasi SDM pemroduksi teknologi satelit, teknologi perang/hankam; serta penyiapan dan implementasi strategi kemandirian pangan, sandang, papan, transportasi dan energi. Pembangunan SDM tersebut dipedomani oleh nilai-nilai dalam butir-butir Pancasila dan merujuk Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

PERSANTUNAN

Kedua penulis memiliki kontribusi yang sama sebagai penulis utama dari artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I. selaku Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas yang telah memberikan fasilitas kepustakaan pencarian bahan rujukan untuk menyusun karya tulis ini.

PUSTAKA RUJUKAN

- Grizold, A. 1994. The concept of national security in the contemporary world. *International Journal on World Peace* 11(03): 37-53.
- ESRI.com. 2021. Satellite Map. <https://maps.esri.com/rc/sat2/index.html#> [diakses 19 Desember 2021].
- Google.com. 2021. Google Search Image. <https://google.com> [diakses 19 Desember 2021].
- Spreckelsen, M.v.C. 2018. Electronic Warfare – The Forgotten Discipline: Why is the Refocus on this Traditional Warfare Area Key for Modern Conflict? *Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) Journal* 27(2018): 41-45.

MERAWAT KEUTUHAN INDONESIA GUNA MEMBANGUN KEDAULATAN BANGSA SEBAGAI MODAL DASAR KETAHANAN NASIONAL

Ari Purnomo, S.T., M.Si.¹

Nadia Talita Putri, S.IP.²

¹ Kepala Bagian Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta.

² Analis Persandian Kelompok Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta.



Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, selain memiliki hak untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber kekayaan negara, negara juga memiliki kewajiban untuk mengelola keamanan dan keselamatan serta mengelola manajemen penegakan hukum

Ari Purnomo & Nadia Talita Putri



PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu negara yang terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil. Wilayah Indonesia apabila ditinjau dari kondisi geografisnya merupakan negara kepulauan yang terdiri dari rangkaian Kepulauan Nusantara dengan wilayah perairan, daratan dan lapisan udara di atasnya yang sangat luas. Wilayah daratan dan lautan Indonesia terbentang di antara 6° LU 11° LS dan 95° BT-141° BT, yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia. Sehubungan dengan hal tersebut, Wilayah Indonesia dapat di klasifikasikan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang sangat besar. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 108.000 km, dengan luas perairan 6.400.000 km², luas NKRI (terdiri dari daratan dan perairan) 8.300.000 km², jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 (Susmoro, 2019).

Letak Wilayah Indonesia yang selain pada bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia, pada bagian Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, pada bagian tenggara berbatasan dengan Benua Australia dan bagian Barat laut berbatasan dengan Benua Asia juga memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan beberapa *choke points* yang strategis bagi kepentingan global seperti Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Walaupun bentuk Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan namun sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) Wilayah Negara Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma laut pada wilayah Indonesia adalah bukan sebagai pemisah tetapi laut sebagai perekat antar Pulau-pulau di Nusantara. Hal ini tertuang di dalam deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan mendapat pengakuan di dunia Internasional, maka Negara Indonesia disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan pada letak geografisnya, Indonesia merupakan negara yang sangat strategis, bila dilihat dari wilayah teritorialnya Indonesia didominasi oleh lautan dibanding dengan daratannya sehingga Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan, Negara Maritim atau bangsa bahari. Namun hingga saat ini pembangunan negara ini belum terkonsentrasi pada sektor ini. Kerangka fondasi pembangunan masih belum mengarah kepada maritim yang

seharusnya potensi ini dapat menjadi tumpuan dalam kedaulatan bangsa dan perekonomian nasional.

Posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang strategis tersebut dapat menimbulkan dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama, posisi tersebut menjadikan sebuah potensi yang strategis yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua, potensi ini dapat menimbulkan ancaman baik ancaman yang bersifat militer maupun ancaman non militer sehingga menjadi suatu tantangan dalam mempertahankannya. Hal ini disebabkan karena perkembangan geopolitik internasional begitu dinamis dan kompleks yang didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana perubahan tersebut menghadirkan hubungan antar negara serta tata kehidupan masyarakat yang maju sehingga mendorong ketatnya kompetisi antar bangsa dalam mempertahankan kepentingan negaranya.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, perkembangan tersebut berimplikasi pada konteks situasi yang strategis dengan memunculkan isu keamanan baru yang memerlukan suatu penanganan yang lebih komprehensif. Pada kondisi pertahanan negara keadaan lingkungan strategis akan mendorong di mana kondisi dari luar akan berinteraksi dengan keadaan dari dalam negeri sehingga akan memunculkan ancaman dan risiko yang bersifat militer maupun non militer sehingga dapat mengancam, membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara maritim, selain memiliki hak untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber kekayaan negara di laut, negara juga memiliki kewajiban untuk mengelola keamanan dan keselamatan serta mengelola manajemen penegakan hukum di laut.

MERAWAT KEUTUHAN INDONESIA

Wilayah Kepulauan Indonesia yang secara geografis terletak di antara dua benua dan dua Samudera ini membuat Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas laut maupun udara. Selain itu, wilayah Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia terutama perdagangan antar negara-negara industri, dan antar negara-negara sedang berkembang. Letak geografis Indonesia ini mempunyai pengaruh terhadap aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup di wilayah persimpangan dunia tentu menjadikan Bangsa Indonesia terlibat dalam mengelola sektor kelautan yang memberikan dampak yang positif bagi negara, yakni dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan menambah sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional. Tidak hanya itu, letak geografis ini, juga berpengaruh terhadap bidang sosial. Letaknya yang strategis, memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Selain itu, Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu pulau yang dihubungkan oleh selat dan laut, melahirkan keanekaragaman suku, bahasa, budaya dan agama yang menjadikan ciri khas dan daya tarik bagi negara lain, serta dapat memperkaya kebudayaan nasional. Namun bonus anugerah yang diberikan kepada Indonesia ini tentu akan memberikan potensi ancaman, sehingga perlu untuk merawat keutuhan NKRI.

A. Peran, Pengaruh, Keuntungan, dan Kerugian Dari Letak Geografis Indonesia

Berdirinya suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari letak geografis. Pasalnya dengan adanya letak geografis, maka letak atau posisi suatu wilayah akan tampak begitu jelas dan hal ini digunakan sebagai suatu cara untuk mengetahui dan mengenal suatu negara, termasuk Indonesia (Restu, 2021).

Setiap letak geografis pada suatu negara, pasti akan memiliki pengaruh. Pengaruh letak geografis yang dimiliki Indonesia adalah sebagai berikut (Restu, 2021):

1. Keberagaman Budaya

Letak geografi Indonesia yang berada di antara dua benua, membuat budaya asing yang masuk ke Indonesia begitu cepat, apalagi didorong oleh perkembangan teknologi yang memudahkan terjadinya terjadi akulturasi dan asimilasi budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga budaya Indonesia, maka seluruh komponen bangsa Indonesia harus saling bekerja sama dan bergotong royong dalam upaya melestarikan kebudayaan Indonesia.

2. Memiliki Dua Musim (Musim Hujan dan Musim Kemarau)

Letak Indonesia yang diapit antara dua benua dan dua Samudera serta melewati garis khatulistiwa, membuat negara Indonesia dilewati oleh angin Muson Barat dan Angin Muson Timur. Kedua angin tersebut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia, yakni musim hujan dan musim kemarau yang membuat Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis.

3. Letak yang Strategis

Letak geografis Indonesia yang berada di antara jalur persimpangan lalu lintas perdagangan Internasional baik laut dan udara, membuat Indonesia dapat meningkatkan ekonomi perdagangannya. Tidak hanya itu, letak Indonesia yang menghubungkan negara-negara industri dengan negara-negara berkembang, menjadikan Indonesia sebagai titik pertemuan kegiatan ekonomi dunia.

4. Memiliki Banyak Jenis Ikan dan Biota Laut

Indonesia yang diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik membuat perairan laut Indonesia cenderung hangat. Kondisi ini disebabkan oleh peristiwa Arlindo (Arus Lintas Indonesia) karena adanya perbedaan tekanan air laut dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia. Perairan yang hangat menarik banyak ikan dan biota laut berdatangan ke perairan Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia akhirnya memiliki berbagai jenis ikan dan biota laut yang melimpah yang dapat menjadi pemasukan perekonomian negara.

5. Rawan Terjadi Bencana

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang rawan terjadi bencana. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di jalur Lingkaran Api atau *Ring of Fire Pasifik*. *Ring of Fire Pasifik* ini dapat menyebabkan terjadinya gempa tektonik yang begitu besar, sehingga mengeluarkan energi yang besar pula dari dalam perut bumi. Indonesia tercatat memiliki 129 gunung api dan sekitar 70 gunung api yang masih aktif, dengan Pulau Jawa sebagai pulau yang memiliki gunung api masih aktif terbanyak di Indonesia. Selain gunung meletus, Indonesia juga sering mengalami gempa dan terkadang bencana tsunami.

6. Sumber Daya Alam yang Berlimpah

Letak geografis Indonesia menjadikan Indonesia beriklim tropis, sehingga memiliki begitu banyak aneka ragam flora dan fauna. Iklim tropis ini membuat negara Indonesia menghasilkan banyak sekali sumber daya alam yang melimpah.

Keuntungan atau dampak positif yang didapatkan Indonesia dari letak geografisnya adalah banyaknya wisata alam yang dapat dikunjungi yang dapat meningkatkan pemasukan negara baik dari wisatawan lokal bahkan mancanegara. Pasalnya pariwisata terbukti memberikan devisa terbesar bagi Indonesia serta dapat membantu dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, dengan pariwisata memungkinkan adanya pertukaran informasi dan budaya yang masif, sehingga dapat mendorong bangsa Indonesia untuk menguasai Iptek yang notabene dibawa dan dikembangkan oleh negara maju. Tidak hanya dari segi alam yang indah, perairan Indonesia yang luas juga memberikan keuntungan dengan seringnya digunakan sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini turut berkontribusi dengan memudahkan Indonesia melakukan percaturan kegiatan ekspor dan impor untuk meningkatkan perekonomian negara.

Seperti dua sisi mata uang, ketika mendapatkan kebermanfaatan dari letak geografis Indonesia, maka akan ada dampak negatif yang harus dihadapi, seperti kemungkinan adanya perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia, mulai memudarnya bahasa daerah, munculnya budaya yang jauh dari nilai budaya lokal, sumber daya alam bisa cepat habis, rawan bencana, pencurian ikan dan biota laut, dan adanya celah bagi imigran gelap untuk masuk wilayah Indonesia yang memungkinkan dapat mengancam keamanan Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk merawat keutuhan NKRI agar Indonesia tetap ada, berdaulat, dan utuh.

B. Pentingnya Merawat Keutuhan NKRI

Indonesia memiliki wilayah yang terbentang luas dengan kekayaan alam yang melimpah. Hal ini membuat negara lain tergiur untuk menaklukkan Indonesia agar dapat memperoleh sumber daya alamnya. Sejarah telah mencatat, bahwa bangsa lain pernah menjajah Indonesia untuk mendapatkan rempah yang pasalnya tumbuhan yang lebih berharga dari emas ini tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit, namun juga dapat menjadi pengawet

makanan, penyedap rasa, bahkan pewangi ruangan (Nilawanti, 2021). Untuk mendapatkan sumber daya alam Indonesia, bangsa lain bahkan menggunakan politik adu domba dengan memunculkan perpecahan agar Indonesia mudah untuk ditaklukkan. Oleh sebab itu, walaupun Indonesia kini sudah merdeka, namun keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dikhawatirkan akan menjadi celah bagi bangsa lain untuk menerapkan politik adu domba untuk memecah belah Indonesia.

Kekayaan alam Indonesia merupakan warisan untuk kesejahteraan rakyat yang penting untuk dijaga. Dalam hal ini seluruh warga negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia agar tetap utuh dengan cara memiliki: (1) sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan menjaga keamanan negara melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai profesi masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, (2) membina persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan toleransi, serta (3) sikap rela berkorban dengan mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Selain itu, perlu pula untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada seluruh komponen bangsa Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

POTENSI GEOGRAFIS SEBAGAI MODAL DASAR KETAHANAN NASIONAL

Indonesia memiliki bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang ada di daratan yang cukup luas dan berbeda beda, ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Setiap lokasi di permukaan bumi memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda, tidak ada lokasi yang mempunyai karakteristik yang sama. Dengan memiliki bentangan alam yang luas mengakibatkan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang begitu besar, hal ini tentu harus dimanfaatkan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Secara astronomis posisi Indonesia masuk di wilayah Tropis sehingga memiliki iklim tropis yang ditandai dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua yang berdampak kepada posisi Indonesia yang di lalui jalur pelayaran dunia. Rute pelayaran utama yang menghubungkan antara Amerika Utara, Eropa dan Asia Pasifik yang melalui terusan Suez, Selat Malaka dan Terusan

Panama. Indonesia dilalui oleh jalur pelayaran utama dunia yang merupakan jalur pelayaran komersial yang paling penting dan melayani pasar utama dunia.

Selain sebagai jalur pelayaran utama Indonesia juga sebagai jalur pelayaran pendukung yang lebih kecil. Pada jalur perhubungan dunia negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan akan mengirimkan barang-barang ekspornya ke wilayah bagian negara lain seperti Afrika, Timur Tengah dan Eropa dengan menggunakan jalur pelayaran Selat Malaka. Secara geologis Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan Lempeng Hindia. Pada posisi ini Indonesia mempunyai banyak gunung api dengan berbagai implikasinya. Keuntungannya adalah Indonesia mempunyai beragam potensi sumber daya energi dan mineral seperti energi panas bumi banyak ditemukan karena aktivitas gunung berapi. Dari aktivitas gunung berapi ini juga membuat banyaknya batuan yang mengandung berbagai macam mineral yang berharga dan dapat menyuburkan tanah, tetapi lokasi ini juga menjadikan Indonesia rawan bencana alam seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi. Potensi lokasi Indonesia dengan beragam keuntungannya harus dimanfaatkan secara efektif untuk kemakmuran bangsa. Lokasi di daerah tropis dengan ciri curah hujan yang tinggi sangat mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Beragam jenis tumbuhan telah dikembangkan oleh para pendahulu bangsa bahkan berbagai tanaman seperti rempah-rempah telah menarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Aktivitas dari pertanian dan perkebunan telah banyak menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi kebutuhan dalam negeri dan sebagian di ekspor. Begitu pula dengan posisi letak dan luas Indonesia yang sangat strategis sehingga banyak dilalui pelayaran internasional. Posisi ini memungkinkan bangsa Indonesia berhubungan dengan berbagai negara atau bangsa lain di dunia. Para pedagang Indonesia telah menjalin hubungan dagang dengan bangsa lain yang melewati wilayah Indonesia. Banyak pelabuhan-pelabuhan mulai berkembang di Indonesia sehingga akan mendapat keuntungan baik dari segi ekonomi dan lalu lintas pelayaran karena banyak aktivitas seperti bongkar muat barang, pencucian kapal, pengisian bahan bakar. Demikian juga halnya dengan keuntungan letak geografis Indonesia. Upaya pemanfaatan potensi tersebut harus dioptimalkan di antaranya dengan meningkatkan konektivitas nasional dengan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan ekspor dari hasil komoditi sumber

daya alam tanpa hambatan transportasi dan komunikasi. Bangsa Indonesia harus dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga akan memiliki nilai tambah dalam pemanfaatannya. Meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam menjadi produk industri yang dapat diterima oleh pasar internasional. Penyiapan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara serta kebijakan untuk mendukung kelancaran pemasaran dari produk-produk industri yang dihasilkan. Menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk mengelola lalu lintas pelayaran sehingga dapat memberikan keuntungan dalam mengembangkan dan membangun kawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sarana prasarana perhubungan yang dapat memenuhi standar pelayaran internasional.

A. Potensi Geografis Indonesia Sebagai Keuntungan Pembangunan Nasional

Upaya bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang maju dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya sehingga dapat memenuhi kriteria karakteristik negara maju dari awalnya negara berkembang. Semua potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tersebut merupakan anugerah dari Tuhan kepada Bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia kita wajib bersyukur atas anugerah tersebut, selain berupaya keras untuk mengelola sumber daya alam tersebut, Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang maju dengan mempelajari lokasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya Indonesia.

Dalam memahami betapa pentingnya peran dari sumber daya alam untuk mendukung pembangunan nasional pada sektor ekonomi salah satu contoh dengan melihat pada masyarakat Kalimantan di mana penduduknya memanfaatkan dalam mengolah batu bara dan emas, semua itu akan menghasilkan pendapatan bagi mereka, atau di Riau dengan tambang minyaknya. Sampai dengan sekarang ini banyak kalangan yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan di suatu negara mengalami kemiskinan dikarenakan negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam bagus, rendahnya pendapatan di suatu negara antara lain disebabkan oleh minimnya sumber-sumber daya alam yang tersedia baik dalam arti jumlah, jenis maupun kualitas. Tanpa adanya sumber daya alam di suatu negara maka

tidak banyak harapan negara tersebut akan berhasil dalam pembangunan ekonomi dan begitu pula sebaliknya, sehingga peran sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Sumber daya alam merupakan segala macam sumber daya yang bersifat heterogen dan kompleks baik yang berwujud sumber daya alam yang siap dipakai maupun yang masih tersimpan di alam. Sumber daya alam meliputi semua sumber daya yang di umi baik benda hidup maupun benda mati yang berguna untuk kehidupan manusia dan pengelolaannya harus memenuhi kriteria-kriteria dengan teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Sumber daya alam itu sendiri terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Peran sumber daya alam hayati terhadap pembangunan perekonomian adalah:

1. menaikkan produk domestik
2. dapat menyediakan lapangan pekerjaan
3. menyejahterakan para petani
4. menyediakan bahan pangan nasional
5. menjadikan bisnis pertumbuhan perekonomian

Selain sumber daya alam hayati terdapat sumber daya alam non hayati seperti:

1. Sumber daya alam bahan tambang

Keberadaan bahan tambang di Indonesia sangat banyak bahkan sampai diperebutkan oleh masyarakat dunia. Daya tarik Indonesia tidak hanya kepada pertanian saja tetapi bahan tambang menjadi salah satu potensi yang ada di Indonesia. Bahan tambang di Indonesia banyak dikelola oleh perusahaan asing. Bahan tambang di Indonesia terdapat pada daratan dan laut. Pengelolaan bahan tambang itu sendiri memerlukan modal yang besar, tenaga ahli dan teknologi. Peran barang tambang untuk pembangunan ekonomi adalah sebagai bahan dasar infrastruktur maupun sebagai sumber energi transportasi.

2. Panas bumi

Salah satu contoh energi panas bumi adalah panas sinar matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia, tetapi sinar matahari dapat digunakan sebagai energi alternatif yaitu digunakan sebagai sumber daya listrik.

3. Air

Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan air menjadi meningkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun energi. Air memegang peranan penting bagi kebutuhan manusia yaitu untuk sarana transportasi dan untuk pembangkit tenaga listrik.

B. Pembangunan Ekonomi Dalam Konsep Berkelanjutan

Dalam melaksanakan konsep pembangunan ekonomi untuk mendukung program pembangunan nasional adalah dengan melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dengan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas sehingga apabila dalam pengelolaannya tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang harus dilakukan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem dalam mendukung kehidupannya. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi di masa kini maupun masa mendatang. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 pembangunan yang pada dasarnya berorientasi ekonomi dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan:

1. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam
2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya
3. Kegiatannya harus dapat meningkatkan sumber daya yang bisa digunakan atau sumber daya yang dapat diperbaharui.

Sutamihardja (2004) menyatakan bahwa sasaran berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya, pertama, Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan berusaha untuk menekan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kedua, pengamanan terhadap kelestarian lingkungan alam dalam rangka menjamin kualitas kehidupan tetap baik bagi generasi mendatang. Ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata-

mata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Keempat, mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa mendatang. Kelima, mempertahankan manfaat pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Keenam, menjaga mutu atau kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu

1. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan

Pembangunan yang berorientasi dengan pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi oleh hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, merata peran, merata ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Pemerataan bukanlah suatu hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal menyeluruh, terdapat kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini yang berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhan.

2. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi sebagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

3. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat

atau cara merusak alam. Hanya dengan pengertian memanfaatkan keterkaitan sistem alam dan sistem sosial maka pelaksanaan pembangunan akan lebih integratif lebih memungkinkan dalam konsep pelaksanaan pembangunan.

4. Pembangunan dengan perspektif jangka panjang

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur *discounting* Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan sehingga saat ini kerangka jangka pendek pemikiran terkait dengan pengambilan keputusan ekonomi perlu dipertimbangkan. Keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan capaian terhadap kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup keberlangsungan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

C. Kedaulatan Wilayah Sebagai Landasan Ketahanan Nasional

Negara Kesatuan Republik Indonesia /NKRI atau Nusantara yang merupakan negara kepulauan yang wilayahnya meliputi wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke. NKRI mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah suatu negara merupakan unsur utama berdirinya sebuah negara di samping unsur penduduk yang tetap, unsur pemerintahan yang sah dan kemampuan hubungan dengan luar negeri. Suatu negara akan memperoleh kepastian hukum jika negara-negara lain yang berbatasan dengan wilayah telah menyepakatinya. Kesepakatan tersebut bisa berdasarkan pada asas warisan pemerintahan sebelumnya atau karena perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional (Aliansi Kebangsaan dkk., 2019).

Terkait dengan perbatasan, tidak cukup apabila hanya bersandar kepada aturan hukum internasional tetapi diperlukan juga peraturan hukum nasional yang mampu merespon kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Batas wilayah perbatasan di suatu negara menempati posisi yang

sangat penting untuk dilihat dari aspek geografis, hukum dan politis. Secara hukum batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum internasional suatu negara, secara politik batas wilayah merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang sesuatu yang ada dalam wilayah tersebut (Dam, 2010). Pada wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara. Wilayah perbatasan antar negara memegang peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pada sisi teritorial wilayah perbatasan merupakan perwujudan yang nyata dari kedaulatan suatu negara. Secara geospasial, wilayah tersebut merupakan batas dengan negara lain. Peran penting wilayah perbatasan terhadap kedaulatan negara terkait juga dengan penduduknya karena mereka berpotensi positif dan negatif dalam menjaga kedaulatan negara.

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum internasional. Dengan secara hukum dan politis apabila persoalan kedaulatan perbatasan dapat diminimalkan hal ini tentu saja akan membawa dampak terhadap pembangunan nasional, sehingga konsep dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan di segenap aspek kehidupan nasional yang diusahakan akan terwujud secara selaras, serasi dan seimbang. Apabila kondisi demikian dapat diwujudkan maka perspektif memperkuat kekuatan pertahanan negara dapat memberikan sumbangan sistem pertahanan negara, kesadaran bela negara dan menjadi landasan Ketahanan Nasional.

INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Istilah Poros Maritim Dunia pertama kali dimunculkan pada saat forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit*) di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014 oleh Presiden Jokowi (Limbong, 2015). Pada kesempatan itu Presiden Jokowi menyampaikan konsep kelautan yang disebut sebagai Poros maritim Dunia (Darmawan, 2015).

Pengembangan sektor kelautan menjadi fokus utama Indonesia dan menekankan 5 pilar utama dalam Poros maritim Dunia yaitu

1. Budaya Maritim (*Maritime Culture*) yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim;
2. Ekonomi maritim (*Maritime Economic*), yaitu mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa;
3. Konektivitas maritim (*Maritime Infrastructure*), yaitu memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut;
4. Diplomasi maritim (*Maritime Security*), yaitu optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim; dan
5. Keamanan maritim (*Maritime Diplomacy*), yaitu mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

A. Strategi Mewujudkan Poros Maritim

1. Membangun Sistem Konektivitas Laut

Pembangunan sistem konektivitas maritim merupakan kunci dari terwujudnya Indonesia sebagai pintu gerbang dunia. Sentralisasi konektivitas maritim harus menjadi pilihan kemandirian yang bersifat strategis dalam Politik Poros Maritim Dunia (Tippe & Fitriani, 2015). Kemandirian tersebut berarti Indonesia telah menancapkan jangkar keseimbangan struktur kekuatan kawasan di Asia Pasifik. meletakkan fondasi dasar yang kokoh untuk membangun sistem konektivitas maritim tersebut memerlukan antisipasi perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan lingkungan strategis, dalam perspektif geopolitik, adalah diwujudkan oleh persaingan dan kerja sama antar bangsa di bidang politik, ekonomi dan militer. Domain maritim merupakan salah satu isu kerja sama antar bangsa baik dalam satu kawasan maupun di luar kawasan. Bagi Bangsa Indonesia penataan sistem konektivitas maritim merupakan penguatan yang komprehensif, yang memberikan makna, bahwa laut merupakan pemersatu, bukan sebagai pemisah baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Perwujudannya adalah dengan menciptakan

pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, infrastruktur maritim yang berlandaskan sistem tata ruang tata ruang wilayah dan kearifan lokal. Pemikiran tentang tol laut, merupakan bagian dari, keuangan maupun sistem pertahanan dalam satu kawasan.

2. Pengembangan Ekonomi Kelautan

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang wilayahnya sebagian besar, terdiri atas laut yang sudah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional dalam konvensi Hukum Laut 1982. Sehingga, wajar apabila Indonesia berusaha untuk mengembangkan perekonomian maritim sebagai landasan dalam meningkatkan perekonomian negara. Tujuan pembangunan maritim adalah menegakkan martabat dan kedaulatan negara atas wilayah, dan kekayaan sumber daya laut di dalamnya, serta memperkokoh kesatuan antar wilayah kepulauan di Indonesia. Pembangunan Maritim ini, pada dasarnya adalah, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar pulau termasuk di wilayah perbatasan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang terkait dengan ekonomi sektoral di bidang maritim, keutuhan dan kedaulatan negara, kelestarian sumber daya dan lingkungan laut, serta menyelesaikan konflik-konflik sosial akibat pemanfaatan ruang laut yang sama dengan kepentingan yang berbeda. Perwujudan pengembangan perekonomian kelautan memerlukan pola pikir untuk membangun perekonomian maritim yang meliputi sebagai berikut:

a) Pembangunan Berbasis Ekonomi Biru

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi maritim yang sejauh ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor perikanan juga menciptakan efek yang berantai, yang terbukti, menggerakkan sektor lain seperti sektor perdagangan, sektor industri, sektor pendidikan yang terkait dengan riset dan penelitian. Perikanan sebagai kegiatan ekonomi juga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi perikanan seharusnya terus dimajukan dan dikembangkan serta menjadi prioritas, agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Mengakomodir hal tersebut, maka diperlukan adanya inovasi dan kreativitas serta optimalisasi peran dari masing-masing *stakeholder*, dalam hal ini adalah pemerintah, agar kegiatan perikanan tetap berkontribusi dalam pembangunan perekonomian negara dan terjaganya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perikanan yang mengarah kepada proses industri

harus menjaga keberlanjutan usaha, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian perairan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka muncul konsep Ekonomi Biru yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada era Menteri Fadel Muhammad (2009 - 2011) dan digaungkan lagi oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono (2020).

Ekonomi Biru merupakan konsep untuk mengoptimalkan sumber daya perairan, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai macam kegiatan yang inovatif dan kreatif, dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Konsep Ekonomi biru menitik beratkan kepada efisiensi, yang dapat mendorong kepada adanya pengembangan investasi dan bisnis perikanan, dengan tetap menjaga lingkungan hidup tetap lestari. Hal yang mendasar dari Ekonomi biru ini adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam yang kegiatan tidak merusak ekosistem alam. Limbah dari sisa hasil produksi dari kegiatan perikanan dalam kondisi tidak mencemari perairan atau merusak lingkungan. Limbah-limbah kimia maupun organik apabila tidak dikelola dengan baik, pada akhirnya akan mencemari lingkungan yang berakibat kepada penurunan produksi perikanan. Melalui sistem Ekonomi Biru, proses di mana bahan baku berikut proses produksinya berasal dari alam semesta dan mengikuti cara alam bekerja. Ekonomi biru merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang kurang baik, dan menciptakan peluang yang bersifat keberlanjutan. Konsep ini juga memberikan solusi yang baik dalam mentransfer ekonomi sekaligus menghasilkan suatu komunitas yang lebih baik di masa datang, dengan mempertahankan sistem kelestarian alamnya. Konsep Ekonomi Biru ini dikembangkan untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi dunia yang bersifat eksploitatif, dan merusak lingkungan alam. Konsep ekonomi biru adalah suatu kegiatan eksplotatif yang tidak melebihi daya dukung dan daya tampung suatu sumber daya perikanan dan lingkungan lautnya, sehingga proses keberlanjutan akan tetap terjaga.

b) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pesisir

Pengembangan ekonomi lokal terutama pada daerah pesisir pada prinsipnya sejalan dengan otonomi daerah, namun pelaksanaannya cenderung dengan melaksanakan eksploitasi sumber daya alam. Peraturan daerah yang ada lebih berorientasi kepada eksploitasi sumber daya pesisir, tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya dan regulasi lain, sehingga

berdampak kepada kerusakan fisik ekosistem. Kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, harus terpadu dan dilaksanakan secara massal, dengan berbasis kemasyarakatan. Konsep keberlanjutan dalam budaya maritim lokal, atau hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya laut seperti Panglima Laot, Seke, Sasi harus diakui keberadaannya, dan ditingkatkan penghargaannya, sehingga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Wilayah pesisir, di dalam pemikiran pembangunan ekonomi regional, memiliki beberapa hal sebagai pilar penting untuk membangun kekuatan ekonomi. Pilar yang pertama adalah keunggulan sumber daya alam. Secara faktual, di wilayah pesisir terdapat konsentrasi-konsentrasi keunggulan wilayah yang dipunyai dan tidak dimiliki oleh wilayah lain. Keunggulan tersebut seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan adanya keterkaitan antara masyarakat pesisir yang tinggal/hidup dengan sumber daya wilayah pesisir yang dimanfaatkannya. Pilar kedua, kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi. Kegiatan usaha, dalam skala spasial, berdasarkan skala ekonomi, umumnya terjadi pengelompokan industri sejenis (*cluster of industry*), misalkan industri pengalengan ikan. Faktor pengelompokan tersebut terjadi karena biaya produksi, di mana ditentukan oleh biaya buruh dan bahan baku, biaya transaksi, dan faktor kenyamanan berusaha. Pilar ketiga, pengelolaan sumber daya pesisir harusnya bersandar kepada kepentingan publik dan kelestarian lingkungan. Terdapat empat aspek dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terpadu, yaitu keterpaduan antara berbagai sektor dan swasta yang berasosiasi, keterpaduan antara berbagai level pemerintahan dari mulai pemerintah pusat, kabupaten, kecamatan dan desa, integrasi antara pemanfaatan ekosistem darat dan ekosistem laut, dan integrasi antara teknologi dengan manajemen yang baik. Pilar keempat, pembangunan wilayah pesisir dan kelautan harus menyadari bahwa sumber daya pesisir dan laut bersifat milik bersama dengan akses yang bersifat akses yang bersifat terbuka. Hal ini berarti kepemilikan berada di bawah kontrol pemerintah atau lebih mengarah kepada sifat sumber daya yang merupakan *public domain*, sehingga sifat sumber daya tersebut bukanlah tidak ada pemilikinya. Hal ini akan menimbulkan tidak efisien secara ekonomi karena semua pihak akan berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut secara besar-besaran, jika tidak maka pihak lain yang akan mendapatkan keuntungannya. Hal ini yang terjadi pada daerah tertentu

yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga pihak-pihak yang memiliki teknologi tinggi mampu mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Selain itu, perlu juga disadari bahwa saat ini telah terjadi degradasi lingkungan pesisir dan laut, sebagai akibat dari kebijakan pembangunan sumber daya yang hanya terkonsentrasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan. Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan menggunakan peralatan yang semakin modern telah merusak sebagian wilayah pesisir dan laut di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah tidak ditemuinya lagi jenis ikan tertentu akibat degradasi lingkungan. Hal ini harus diperhatikan, karena degradasi lingkungan merupakan ancaman bagi kehidupan masyarakat daerah pesisir dan laut. Pilar kelima, pembangunan daerah pesisir dan laut harus memperhatikan masalah kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Kegiatan perikanan di Indonesia melibatkan banyak *stakeholders* termasuk di wilayah pesisir. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan di daerah pesisir dan laut yakni faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan faktor musim, dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Sedangkan faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya pemasaran, tidak berfungsinya koperasi nelayan yang ada, susahny bahan bakar bagi nelayan, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang ada. Di samping itu harus ada komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menegakkan peraturan hukum yang berlaku agar dapat menghindari terjadinya konflik sosial dan ekonomi. Kearifan lokal harus dapat diakomodasikan sebagai salah satu pranata hukum yang dapat memperkecil terjadinya konflik antar nelayan. Salah satu kearifan lokal ini adalah melalui penyusunan tata ruang wilayah pesisir.

c) Pengembangan Keragaman Sumber Daya dan Pemanfaatan Energi Laut

Seiring dengan peningkatan kebutuhan sumber daya energi yang meningkat drastis, inovasi-inovasi baru mengenai sumber daya energi juga berkembang dengan cepat. Dengan hadirnya inovasi-inovasi baru tersebut diharapkan dapat menangani permintaan kebutuhan energi dunia yang sangat besar, apalagi cadangan energi yang tidak dapat diperbaharui semakin menipis. Cadangan minyak bumi, sebagai sumber energi utama yang dimiliki oleh Indonesia, diperkirakan dalam 25 tahun mendatang akan habis. Semakin

berkurangnya sumber daya yang berasal dari fosil khususnya minyak bumi, yang sampai sekarang masih menjadi tulang punggung dan komponen utama penghasil energi, maka Indonesia harus semakin sadar untuk mencari energi alternatif. Indonesia harus dapat mengurangi ketergantungan dari pemakaian energi fosil khususnya minyak bumi, namun harus tetap dapat menyediakan energi listrik untuk seluruh penduduknya. Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi sumber daya energi setempat untuk proses produksi energi yang tidak merusak kelestarian alam. Pengembangan sumber daya energi alternatif perlu mempertimbangkan berapa lamakah sumber daya tersebut mampu untuk menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik alam yang luar biasa, wilayah Indonesia memiliki sumber daya energi alternatif yang sangat berlimpah. *Ocean energy resources* yang dimiliki Indonesia merupakan yang terbaik dan terbesar di dunia. Upaya dalam pemanfaatan energi alternatif tersebut perlu adanya kajian yang lebih serius dan mendalam sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan sektor energi. Energi kelautan merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia. Tidak mengherankan apabila negara-negara maju sudah memanfaatkan energi laut ini sebagai sumber energi alternatif. Teknologi Pembangkit Listrik Pasang Surut (PLPS) merupakan salah satu pembangkit listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga listrik dengan memanfaatkan pasang surut air laut. Pada prinsipnya teknologi tersebut tidak jauh berbeda dengan teknologi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) seperti yang diterapkan pada waduk-waduk di Indonesia, dimana air laut pada saat terjadi pasang ditampung pada suatu wilayah yang dibendung, dan pada saat air laut terjadi surut air laut dialirkan kembali ke laut. Pemutaran turbin dilakukan dengan memanfaatkan aliran air laut pada saat keluar dan masuk dari laut dan menuju laut.

Selain dengan memanfaatkan pasang surut air laut, perbedaan temperatur di bawah laut dapat digunakan sebagai ide pemanfaatan energi dari laut. Secara ilmiah temperatur di permukaan laut cenderung lebih hangat karena panas dari sinar matahari diserap oleh air laut dan temperatur di dalam laut tetap dalam kondisi dingin bahkan perairan yang lebih dalam kana semakin dingin. Pembangkit listrik yang dapat memanfaatkan perbedaan temperatur tersebut akan menghasilkan energi yang disebut dengan *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC). Perbedaan temperatur antara permukaan yang

hangat dengan air laut dalam yang dingin dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan baik. Adapun negara-negara yang sudah menggunakan sistem OTEC ini adalah Jepang, India dan Hawaii. Selain menghasilkan energi listrik penggunaannya dapat juga dikombinasikan dengan fungsi yang lain seperti menghasilkan air pendingin, produksi air minum (air tawar), ekstraksi mineral, dan produksi hidrogen secara elektrolisis. Di samping pasang surut air laut dan perbedaan temperatur yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif adalah pemanfaatan energi gelombang laut (*Wave Energy*). Penemuan teknologi terbaru ini dipublikasikan oleh peneliti Universitas Oregon, AS yang diberi nama *Permanent Magnet Linear Buoy*. Prinsip dasar dari teknologi ini dipasang untuk memanfaatkan energi gelombang laut di permukaan. *Buoy* ditempatkan di permukaan laut dengan posisi sebagian tubuh *buoy* tenggelam dan sebagian lagi mengapung. Gelombang laut yang terus menerus mengalir akan berirama bolak balik, kemudian menghantam atau menggerakkan *buoy* naik turun. Prinsip kerja *buoy* ini mirip dengan dinamo sepeda yang berbentuk silindris dengan perangkat penghasil listrik pada bagian dalamnya, jadi terdapat perangkat elektrik berupa koil (kumparan kawat penghantar) yang mengelilingi batang magnet di dalam *buoy*. Saat ombak menghantam/mengenaikan *buoy*, maka *buoy* tersebut akan bergerak naik turun secara relatif terhadap batang magnet sehingga akan menimbulkan beda potensial, lalu membangkitkan listrik.

Energi listrik dari gelombang laut ini merupakan energi yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan dampak polusi udara dan suara. Instalasi jangkar/ bodi pengait *buoy* di laut dapat berfungsi ditempeli oleh planula karang dan organisme laut lainnya, sehingga akan membentuk koloni ekosistem laut, dan selanjutnya menguntungkan untuk kehidupan ikan dan binatang laut lainnya.

d) Pembangunan Sektor Pariwisata Bahari

Pengembangan kawasan wisata bahari merupakan salah satu bentuk pengelolaan kawasan yang berupaya untuk memberikan manfaat terutama bagi perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatan potensi dan jasa lingkungan. Masyarakat pesisir, dalam pengembangan kawasan bahari, merupakan masyarakat yang mengelola kehidupannya, mengembangkan kreativitas dan inovasi, untuk mengoptimalkan potensi kelautan. Optimalisasi potensi kelautan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

dalam peran sertanya, baik dalam konservasi lingkungan laut, maupun dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan lingkungan laut secara optimal bukan berarti melupakan faktor yang sangat penting bagi pengembangan kawasan wisata bahari. Faktor penting tersebut adalah upaya perbaikan terhadap kawasan yang rusak, dan perbaikan terhadap keanekaragaman potensi yang telah berkurang. Pembangunan wisata bahari pada hakikatnya adalah upaya dalam mengembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan lautan di Indonesia, yang berupa kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai macam ikan hias.

Ada 3 (tiga) komponen yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengembangan industri pariwisata bahari, antara lain:

1. Akses menuju daerah tujuan wisata.

Kemudahan para wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata seperti tersedianya sarana prasarana antara lain bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, jalan dan jembatan yang memadai, kemudahan dalam memperoleh visa kunjungan, jadwal angkutan yang tepat waktu, tarif angkutan yang ekonomis dan efektif, promosi yang memadai, ketersediaan sarana komunikasi yang memadai dan lain sebagainya.

2. Fasilitas tujuan wisata.

Memberikan pelayanan kebutuhan para wisatawan yang sudah datang ke daerah tujuan wisata seperti hotel dan akomodasi lainnya antar lain restoran atau tempat makan, pusat hiburan, pusat perbelanjaan atau toko cendera mata, pusat kerajinan atau galeri.

3. Atraksi wisata pada daerah tujuan wisata.

Daya tarik yang menjadi alasan kunjungan wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata di antaranya meliputi *natural source* seperti flora dan fauna, keindahan alam, pegunungan, pantai, danau, air terjun, ngarai dan gua dan lain sebagainya. Kondisi geografis Indonesia yang 70% merupakan lautan dan memiliki potensi besar bagi pengembangan dan pembangunan, wilayah kelautan Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati laut yang besar sehingga Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Kekayaan laut yang sangat berlimpah seharusnya menjadikan laut sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia dan

menjadikan Indonesia sebagai penghasil hasil laut terbesar mempunyai potensi pengembangan perekonomian dari pemanfaatan perairan di antaranya pada sektor pariwisata bahari.

Pemerintah perlu mendorong dan memenuhi faktor-faktor penunjang untuk mendukung potensi wisata bahari di berbagai daerah yang mempunyai potensi tujuan wisata di Indonesia. Integrasi dalam suatu sistem perencanaan dan pengelola pembangunan wisata bahari berarti harus mengelola kualitas, lingkungan, keamanan. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi pariwisata baharu secara nasional berada di bawah kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun demikian perlu ditunjang kementerian lainnya dalam hal pembangunan infrastruktur serta fasilitas di daerah tujuan wisata potensial. Pemerintah daerah sebagai pelaksana seharusnya terlibat dalam melakukan pengembangan dan pembangunan. Keterlibatan investor swasta dapat dipastikan akan memberikan dukungan yang signifikan terutama dalam pembangunan fasilitas dan akomodasi dan atraksi wisata serta pendukung lainnya.

e) Pembangunan Perikanan

Sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar sektor perikanan menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia. Selain itu sektor perikanan menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia, namun secara empiris pembangunan sektor perikanan selama ini kurang mendapat perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik ekonomi serta iklim sosial yang sangat kondusif. Dalam kaitan ini koordinasi dan lintas sektor serta *stakeholder* lainnya menjadi salah satu syarat yang sangat penting. Secara teoritis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan antara pertumbuhan perekonomian nasional, sumber daya perikanan, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah dan pasar. Pembangunan perikanan bertujuan untuk meningkatkan taraf pendapatan masyarakat nelayan dengan jalan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja dan usaha. Namun, mengingat kegiatan perikanan sangat tergantung dengan faktor alam, dan ketersediaan sumber daya pada suatu perairan yang menyebabkan adanya fluktuasi perikanan

sangat jelas, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi aktivitas para nelayan dalam bekerja. Sumber daya perikanan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable source*), tetapi dalam pemanfaatannya harus rasional supaya tetap terjaga keseimbangan produksi dan kelestarian sumber daya alamnya. Hal ini perlu adanya penegasan karena sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang milik bersama sehingga perlu adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaannya. Melihat kondisi sekarang ini khususnya perikanan tangkap, telah mengalami *over fishing* di beberapa daerah, dan adanya tren penurunan jumlah produksi perikanan tangkap di dunia, maka pembangunan perikanan Indonesia ke depannya lebih difokuskan kepada peningkatan produksi di perikanan budidaya. Di samping itu permasalahan perikanan Indonesia masih sangat kompleks. Masalah pertama, masih lemahnya akurasi data statistik perikanan. Hal ini akan menyebabkan kendala dalam penerapan kebijakan pengembangan sektor perikanan. Dampak sistemiknya adalah rawannya hubungan dagang internasional. Masalah kedua, lemahnya armada perikanan tangkap nasional. Berbagai sumber menyatakan bahwa dari 70% armada yang beroperasi di wilayah ZEE merupakan milik asing dan memiliki produktivitas yang rendah. Masalah ketiga, permasalahan *illegal fishing* (pencurian ikan) dan lemahnya penegakkan hukum yang telah menghilangkan potensi ekspor perikanan Indonesia sangat besar. Selain merugikan negara *illegal fishing*, juga merugikan para nelayan tradisional karena menggunakan alat tangkap jenis *trawl* yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut sehingga berujung kepada rendahnya hasil tangkap para nelayan tradisional. Masalah keempat, pelayanan perijinan usaha perikanan disinyalir masih ada berbelit-belit, dan masih ada indikasi pungutan liar.

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan harus ada kesamaan dengan pembangunan perikanan yaitu pembangunan perikanan yang memanfaatkan sumber daya ikan, beserta ekosistemnya secara optimal, untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama para petani ikan dan nelayan secara berkelanjutan. Ada 3 (tiga) syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mewujudkan hal tersebut. Syarat pertama, sektor perikanan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui peningkatan devisa. Syarat kedua, sektor perikanan harus mampu memberikan keuntungan kepada pelakunya dengan meningkatnya taraf kesejahteraan para pelaku perikanan. Syarat ketiga, pembangunan perikanan yang akan

dilaksanakan selain dapat menguntungkan secara ekonomi juga ramah terhadap lingkungannya.

Pada proses pengembangannya, sektor perikanan, tidak hanya terkait dalam usaha perikanan tangkap dan budidaya saja, tetapi peluang bisnisnya dapat dilihat dari 2 (dua) faktor. Faktor pertama, berupa faktor internal berupa sumber daya laut dan perikanan, potensi sumber daya manusia, teknologi, sarana prasarana serta pemasaran. Faktor kedua, berupa faktor eksternal, berupa segala aspek yang berkaitan dengan permintaan produk perikanan dan syarat-syarat yang menyertai permintaan tersebut.

f) Pengembangan Industri Maritim

Industri maritim merupakan salah satu industri strategis yang dipilih sebagai salah satu bagian dari berbagai ujung tombak industri berbasis teknologi. Industri maritim juga merupakan strategi global, demi melancarkan pembangunan dalam negeri yang mempunyai peran penting dalam persaingan dunia usaha, di tingkat internasional. Industri maritim Indonesia mempunyai potensi untuk menjawab tantangan dimasa depan dan memberikan nilai tambah yang cukup tinggi untuk devisa negara. Secara umum, industri maritim nasional relatif masih tertinggal dari berbagai negara, padahal industri maritim ini sangat menentukan terkait dengan kemampuan nasional, dalam memanfaatkan potensi laut di wilayah Indonesia. Kemampuan bangsa Indonesia dalam industri maritim sangat terbatas, karena tingginya nilai investasi yang ditanamkannya, serta masih sangat terbatas kemampuan teknologi dan kualitas sumber daya manusianya. Produk dari industri maritim di Indonesia, secara umum, belum bisa sebagai pesaing produk-produk impor, untuk itu diperlukan suatu strategi yang komprehensif dalam pengembangannya. Strategi pengembangan ekonomi pada sektor industri maritim diarahkan untuk membangun industri maritim yang kokoh, efisien, mandiri dan bersih dari limbah, serta mampu untuk menambah nilai ekonomi yang tinggi guna mempercepat pertumbuhan perekonomian kelautan nasional. Langkah-langkah yang perlu diciptakan dalam pengembangan industri maritim, antara lain, menciptakan industri maritim nasional yang hemat energi dan bersih dari limbah, mengembangkan kawasan industri maritim yang terpadu, mengembangkan dan melakukan inovasi untuk memperkuat industri bioteknologi kelautan yang ramah terhadap lingkungan.

Penjabaran-penjabaran dari arah strategi tersebut membutuhkan upaya-upaya berupa implementasi bisnis pada sektor industri maritim. Industri maritim, pada hakikatnya, memiliki cakupan yang sangat luas dan bersifat integral dengan industri lain di daratan seperti industri galangan kapal, mesin-mesin kapal, pengolahan minyak dan gas. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan industri maritim harus dipandang dalam sudut pandang yang menyeluruh dan terpadu. Membangun industri maritim antara sektor satu dengan sektor lain harus mempunyai keterkaitan, baik dalam proses bisnis, maupun dalam pemasaran. Dengan adanya pengembangan industri maritim tersebut, diharapkan terjadi proses transformasi sosial ekonomi dalam masyarakat pesisir. Hal ini menjadikan industri maritim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan ekonomi dan menentukan pertumbuhan bidang kelautan nasional. Permasalahan dalam pengembangan industri maritim yang terjadi saat ini adalah bagaimanakah mensinergikan kebijakan pemerintah, kepentingan pelaku usaha industri maritim dengan kebutuhan masyarakat yang bergerak di bidang kelautan. Kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah seharusnya dapat diharmonisasikan untuk mendorong terciptanya kesesuaian antara material yang dihasilkan oleh produksi industri maritim dan memenuhi kebutuhan masyarakat nasional, maupun kebutuhan luar negeri. Ekosistem ini diharapkan mampu mewadahi aktivitas industri maritim yang besar dan kompetitif.

1) Pengelolaan Kebijakan dan Pengembangan Infrastruktur

Pada dasarnya memahami dunia maritim dapat dilakukan dengan mengamati sejumlah aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung di laut. Di permukaan laut terdapat kegiatan pelayaran dan aktivitas nelayan, kemudian tengah-tengah/kolom laut (antara atas dan dasar laut) terdapat kegiatan yang berhubungan dengan *living resources* atau sumber-sumber hayati, dan di dasar lautnya terdapat kegiatan penambangan baik mineral maupun gas. Kegiatan maritim juga perlu dipahami terkait orientasinya. Orientasi maritim berbeda dengan orientasi darat. Pembangunan yang berorientasi darat berhenti ketika bertemu dengan laut. Sebaliknya, Pembangunan yang berorientasi laut, justru memulai kegiatan ketika menemui laut, dan bisa dikembangkan hingga ke darat. Pembangunan di dalam zona maritim, di berbagai negara, termasuk Indonesia, kebijakan dalam bidang maritim akan melibatkan dua unsur penting yaitu zona maritim dan aktor maritim. Zona maritim itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu zona

nasional dan zona trans-nasional. Zona atau batas wilayah laut, adalah batas yang disepakati secara dokumen, tidak seperti zona atau batas wilayah darat, yang ditandai dengan menggunakan tanda atau patok dengan adanya gunung, sungai atau pembatas lainnya. Batas wilayah laut tidak mempunyai tanda yang riil. Oleh karena itu wilayah nasional dan wilayah trans-nasional menjadi sangat elastis, sehingga keadaan seperti ini sering kali menyebabkan terjadinya konflik wilayah.

Indonesia mempunyai kebijakan maritim berdasarkan zona nasional yang memiliki 4 (empat) butir penting. Pertama, kebijakan yang terkait dengan laut teritorial (karena Indonesia sebagai negara kepulauan). Kedua, kebijakan wilayah pantai. Ketiga, kebijakan nasional yang berhubungan dengan *contiguous zone* (zona kedekatan wilayah). Keempat, kebijakan maritim berdasarkan Zona ekonomi eksklusif. Kebijakan terkait dengan zona trans-nasional mengatur 3 (tiga) hal yaitu:

- a) Kebijakan maritim yang mengatur eksploitasi *seabird resources* (umumnya di wilayah laut lepas atau *high seas*) di tingkat internasional. Indonesia sudah mempunyai Internasional *seabird authority* berdasarkan konvensi Jamaika.
- b) Kebijakan maritim yang mengatur tentang kebebasan bernavigasi untuk mengatur dan mengamankan selat-selat yang merupakan bagian dari wilayah teritorial.
- c) Kebijakan maritim yang berkaitan dengan manajemen *living resources* atau sumber daya hayati. Pengaturan ini dibuat karena sumber-sumber daya hayati suatu negara tidak seluruhnya dapat diklaim sebagai milik atau dalam penguasaan suatu negara. Contoh adalah ikan tuna. Meskipun banyak didapati di wilayah Indonesia namun karena sifatnya yang terus bergerak tidak hanya di perairan Indonesia maka jenis ikan ini dimasukkan dalam bagian dari zona trans-nasional.

Kebijakan maritim berdasarkan aktor maritim dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

- a) *State Sector*. Kategori di sektor ini sedikitnya ada 4 (empat) unsur negara yang menjalankan kebijakan maritim yaitu Kementerian Luar Negeri yang berbasis hukum diplomatik, aktor berbasis militer di masa perang (TNI AL), aktor berbasis penegakkan hukum di masa damai seperti polisi,

kepabeanaan, serta aktor berbasis fungsional dan sumber daya seperti Kementerian kelautan dan perikanan, serta Perhubungan Laut.

- b) *Civilian Sector*. Peran aktor yang berbasis profit dalam bidang perkapalan, perikanan dan pertambangan. Selain itu ada aktor berbasis non profit yaitu LSM yang umumnya sangat fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan maritim harus mampu memadukan semua hal tersebut baik dari sisi wilayah maupun aktor-aktornya dan tidak memprioritaskan satu sisi saja. Selain itu, kebijakan maritim harus bisa membedakan antara masalah yang secara spesifik merupakan kebijakan maritim, dan dengan kebijakan luar negeri terlebih lagi kebijakan yang harus menggunakan kekuatan senjata.

2) Kebijakan konektivitas

Kebijakan konektivitas sebenarnya sangat terkait dengan pembangunan infrastruktur. Dokumen yang dihasilkan oleh Bank Dunia, Asian Development Bank, maupun G20 mengharuskan adanya konektivitas dalam pembangunan infrastruktur, yang kemudian dikenal sebagai agenda pembangunan. Agenda ini sangat berbeda dengan agenda pasar. Suatu negara tidak mungkin akan bersaing melawan agenda pasar yang bermuatan liberalisasi, dan kompetisi yang sangat tinggi, tanpa dibarengi dengan agenda pembangunan infrastruktur. Secara teoritis, pembangunan infrastruktur akan mengakibatkan terjadinya penurunan biaya logistik, sehingga harga produk akan relatif lebih murah, dan mampu bersaing. Ketika persaingan menguat, barulah dilakukan pembangunan konektivitas. Hal ini tidak bisa dihindari, mengingat keterbatasan anggaran negara. Kebijakan konektivitas maritim dalam konteks ekonomi, yang berorientasi pada penguatan daya saing, mengharuskan adanya *public private partnership*. Negara-negara maju seperti Tiongkok dapat melesat semaju sekarang ini setelah melakukan pembangunan infrastruktur. Hal ini yang belum dilakukan oleh Indonesia selama ini, dikarenakan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah dengan melibatkan pihak swasta. Pembangunan proyek konektivitas tidak bisa sepenuhnya didukung oleh anggaran fiskal negara, tetapi juga melibatkan sipil yang berbasis profit pada berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut seperti pertambangan, perikanan, perkapalan, dan lain sebagainya. Wilayah aktor swasta ini diprioritaskan pada pembangunan pelabuhan dan proyek-proyek di zona nasional, dengan didukung oleh aktor

pemerintah, yang berbasis fungsional dan sumber daya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.

Ketika pembangunan infrastruktur telah dilakukan oleh Indonesia, antara lain dalam bentuk pelabuhan, maka setidaknya muncul dua tantangan baru, yang harus disikapi, antara lain:

- a) Pertama, Indonesia perlu meningkatkan transportasi antar pulau di selat-selat untuk memudahkan lalu lintas maritim, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan koridor kewilayahan maritim.
- b) Kedua, mampu bersikap konsisten. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa permasalahan infrastruktur merupakan permasalahan institusional. Ketidakmampuan melaksanakan pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya karena faktor ketiadaan anggaran. Ada hal yang tidak kalah pentingnya, yakni karena masalah konsistensi, dari soal regulasi, prosedur, mekanisme dan sebagainya. Hal ini merupakan masalah institusi yang harus dibenahi. Investor tidak akan tertarik apabila akan menanamkan investasinya jika tidak ada kepastian hukum atau kepastian institusi yang menaunginya. Dalam melakukan investasi di negara manapun membutuhkan jaminan institusional dan ketika mendapatkan kepastian secara hukum dan mekanisme dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa kepercayaan dari pihak investor.

Dua masalah besar inilah yang harus diatasi dalam pembangunan konektivitas maritim Indonesia, keduanya harus dibenahi dan berjalan beriringan serta saling terkait.

PERSANTUNAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla. yang telah memberi dukungan sehingga penulisan serta penerbitan artikel ini dapat terlaksana.

PUSTAKA RUJUKAN

- Aliansi Kebangsaan, Suluh Nuswantara Bakti, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri TNI-POLRI. 2019. *Menggalang Ketahanan Nasional*. Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. ISBN: 978-623-241-006-0.
- Dam, S. 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta : Bumi Aksara. ISBN: 978-979-010-911-7. xv+315.
- Darmawan, dkk. 2015. *Maritim Review: Upaya Mewujudkan Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL).
- Limbong, B. 2015. *Poros Maritim*. Penerbit Pustaka Margaretha. Jakarta. ISBN: 978-602-18773-5-7.
- Pranowo, W.S., A.R. Tisiana Dwi Kuswardani, T.L. Kepel, U.R. Kadarwati, S. Makarim, S. Husrin. 2006. Ekspedisi INSTANT 2003-2005: *Menguak Arus Lintas Indonesia*. ISBN: 979-3768-06-1
- Putri, A.S. 2020. *Potensi Lokasi Indonesia dan Upaya Pemanfaatannya*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/27/193000669/potensi-lokasi-indonesia-dan-upaya-pemanfaatannya> [Diakses 21 April 2022]
- Tippe, S., & Fitriati, R. 2015. *Peta Potensi Maritim Indonesia menuju Poros Maritim Dunia*. Penerbit Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta. ISBN: 978-602-72029-1-7. xxvi+304.
- Maghfiroh, N.L. 2021. *Letak Geografis Indonesia: Pengaruh dan Keuntungannya*. <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/letak-geografis-indonesia-pengaruh-dan-keuntungannya> [Diakses 21 April 2022].
- Nilawanti, L. 2021. *Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia?* <https://www.gramedia.com/literasi/apa-hubungan-rempah-rempah-dan-penjajahan-di-indonesia/> [Diakses 21 April 2022].
- Restu. 2021. *Pengaruh Letak Geografis Indonesia*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengaruh-letak-geografis-indonesia/> [Diakses 21 April 2022].
- Susmoro, H. 2019. Peran hidrografi dalam mendukung pertahanan laut di Indonesia. Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL ISBN: 978-602-51221-5-6.

PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI SEBAGAI PENGOPTIMALAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL

Karina Dewi, S.H.

Analisis Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta.



Bonus demografi sangat menguntungkan dari sisi pembangunan negara dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi dalam sumber daya manusianya melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan investasi

Karina Dewi



PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut NKRI) merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas. Batas wilayah Indonesia secara astronomis, berada pada garis lintang utara 6° (Pulau We), lintang selatan pada 11° (Pulau Rote), dan batas paling barat 95° (Sabang), hingga 141° bujur timur (Merauke), dengan luas sekitar 7,81 juta km², memiliki 17.499 pulau dan terdapat 34 provinsi (Fajri & Safrezi, 2021). Berdasarkan hasil data kependudukan semester II Tahun 2021 Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273.879.750 jiwa (Kemendagri, 2022). Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2020 berdasarkan perhitungan BPS yaitu sebesar 1,25% dan pada tahun 2021 sebesar 0,98% (BPS, 2022a).

Pada saat ini Indonesia telah memasuki era bonus demografi dimana persentase usia produktif lebih tinggi dari pada usia lansia. Pada tahun 2020, berdasarkan data BPS bahwa persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,72%, sedangkan persentase penduduk lansia sebesar 9,78%. Komposisi penduduk Indonesia sebagai berikut: (1) Penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 dengan perkiraan usia sekarang >75 tahun (*Pre-Boomer*) sebesar 1,87%; (2) Penduduk yang lahir tahun 1946-1964 dengan perkiraan usia sekarang 56-74 tahun (*Baby Boomer*) sebesar 11,56%; (3) Penduduk yang lahir tahun 1965-1980 dengan perkiraan usia sekarang 40-55 tahun (*Gen X*) sebesar 21,88%; (4) Penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia sekarang 24-39 tahun (*Milenial*) sebesar 25,87%; (5) Penduduk yang lahir tahun 1997 dengan perkiraan usia sekarang 8-23 tahun (*Gen Z*) sebesar 27,94%; dan (6) Penduduk yang lahir tahun 2013 dan seterusnya perkiraan usia sekarang sampai dengan 7 tahun (*Post Gen Z*) sebesar 10,88% (BPS, 2020).

Bonus demografi merupakan fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan sumber daya manusia. Bonus demografi ini bisa menjadi hal baik untuk pembangunan negara dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi dalam sumber daya manusianya melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan investasi (Afriadi, 2017). Para ahli demografi memprediksikan pada tahun 2020-2030, Indonesia akan dihadiahi

bonus demografi (Umar, 2017). Bonus demografi dapat dilihat dengan parameter *Dependency Ratio* (angka beban ketergantungan).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah ini dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara salah satunya dari PNBP sumber daya alam. PNBP sumber daya alam dapat berupa batubara, migas, dan lain-lain. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan negara PNBP sumber daya alam sebesar Rp.121.950,11 Milyar (BPS, 2022b). Jumlah penduduk yang terus meningkat dan cadangan sumber daya alam yang semakin menipis masih menjadi permasalahan di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dengan cara pemanfaatan demografi yang melimpah akan menciptakan ketahanan nasional. Ketahanan nasional dapat meliputi, ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan pertahanan keamanan, ketahanan posisi geografis, ketahanan demografi, dan ketahanan sumber kekayaan alam. Kebijakan strategis dan spesifik sangat dibutuhkan bagi kaum muda sehingga pasar kerja mampu menyerap sesuai dengan dinamika struktur penduduk, khususnya dalam menghadapi ledakan penduduk usia kerja yang telah dimulai (Umar, 2017).

ASPEK DEMOGRAFI

Demografi berasal dari kata “*demos*” yang berarti penduduk dan kata “*grafein*” yang berarti gambaran. Pressat (1985) mengatakan bahwa demografi adalah studi tentang populasi manusia dalam hubungannya dengan perubahan yang terjadi akibat kelahiran, kematian, dan migrasi (Harmadi, 2016). Philip M. Hauser dan Dudley Duncan (1959) mendefinisikan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status (Harmadi, 2016). Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran ke ruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, 2016).

Demografi terbagi menjadi dua yaitu demografi murni (*pure demography*) dan ilmu kependudukan (*population study*). Hubungan antara kependudukan dengan sumber daya alam sangat berkaitan erat, karena sumber daya alam juga sebagai sumber pendapatan dan pangan penduduk. Dalam bukunya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, Thomas Robert Malthus mengembangkan demikian Daniel Malthus tentang hubungan antara penduduk dengan pangan. Teorinya mengajukan tiga hal penting yaitu (Harmadi, 2016):

- a. Penduduk dibatasi oleh sumber-sumber subsistensi pangan;
- b. Jumlah penduduk akan meningkat apabila sumber-sumber subsistensi meningkat, kecuali kalau ada faktor-faktor penghambat; dan
- c. Faktor penghambat tersebut yang menekan perkembangan penduduk serta menekan dampaknya pada tingkat subsistensi dapat dipecahkan melalui ketahanan moral, kejahatan dan kesengsaraan.

Menurut Lembaga Demografi FEUI dalam Harmadi (2016) dalam demografi ada tiga fenomena yang merupakan bagian penting dari penduduk yaitu:

- a. Dinamika kependudukan (*Change In Population*).
- b. Komposisi Kependudukan (*Population Composition*).
- c. Besar dan persebaran penduduk (*Size and Population Distribusi*)

Transisi demografi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan perubahan terhadap parameter demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Menurut beberapa ahli, perubahan struktur umur penduduk akibat transisi demografi, mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan penduduk usia kerja akan memiliki hubungan positif dengan GDP per kapita (Harmadi, 2016). Perubahan struktur umur penduduk akibat transisi demografi berdampak pada (Harmadi, 2016):

- a. peningkatan jumlah tenaga kerja yang apabila mendapatkan kesempatan kerja produktif akan meningkatkan total output;
- b. peningkatan tabungan; dan
- c. tersedianya *human capital* yang jumlahnya lebih banyak.

Oleh sebab itu, bonus demografi dapat dimanfaatkan apabila penduduk usia kerja yang jumlahnya sangat besar tersebut dapat memperoleh

kesempatan kerja yang produktif (Harmadi, 2016). Kesempatan kerja yang produktif dapat diperoleh apabila kualitas sumber daya manusia yang baik untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia (Harmadi, 2016).

Bonus demografi merupakan suatu kondisi perubahan struktur umur penduduk sebagai akibat dari proses transisi demografi, yaitu penurunan angka kelahiran dan angka kematian (Harmadi, 2016). Pada masa di mana penduduk dengan usia produktif jauh lebih banyak daripada penduduk yang usianya tidak produktif, maka akan berpengaruh pada rasio ketergantungan, di mana beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang usianya tidak produktif mencapai titik terendah. Bonus demografi ini terjadi hanya satu atau dua dekade saja, karena seiring berjalannya waktu penduduk lansia akan bertambah.

Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami bonus demografi sebagaimana terlihat berdasarkan data BPS bahwa persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,72%, sedangkan persentase penduduk lansia sebesar 9,78%. Bahkan pada tahun 2045 prospek Indonesia tahun 2045 terhadap demografi, yaitu penduduk Indonesia sebanyak 309 juta penduduk, dengan 52% usia produktif, 72% hidup di perkotaan dan 80% berpenghasilan menengah (Setjen Wantannas, 2022). Di masa bonus demografi menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi dan daya saing yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang efektif untuk mendorong kualitas sumber daya manusia (Setjen Wantannas, 2022). Jika diperhatikan lebih seksama, bonus demografi akan menjadi pilar peningkatan produktifitas suatu negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif tersebut benar-benar mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dan memiliki tabungan yang dapat dimobilisasi menjadi investasi (Ahmad dkk., 2021). Akan tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana penduduk usia produktif yang jumlahnya besar tidak terserap oleh lapangan pekerjaan, maka akan menjadi beban ekonomi karena penduduk usia produktif yang tidak memiliki pendapatan akan tetap menjadi beban bagi penduduk yang bekerja dan akan memicu terjadinya angka pengangguran yang tinggi (Ahmad dkk., 2021).

Upaya pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi secara maksimal dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk usia produktif, yaitu melalui pendidikan karakter, pelatihan,

menciptakan lapangan pekerjaan dan praktek lapangan, pemetaan penduduk usia produktif berdasarkan keahliannya sesuai dengan kebutuhan, melindungi penduduk yang sudah bekerja agar dapat terus bekerja dengan produktifitas tinggi, mempersiapkan sumber daya manusia untuk angkatan kerja yang baru agar kompetensi mereka sesuai dengan yang dibutuhkan pasar. Menurut Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam sambutan pada acara webinar, bahwa bonus demografi berupa melimpahnya jumlah penduduk usia produktif harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Ramdhan & Maryati, 2021). Muhadjir mengatakan bahwa strategi pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan demografi ada lima sebagai berikut (Ramdhan & Maryati, 2021).

- a. Meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi kesehatan dan pendidikan;
- b. Meningkatkan kualitas penduduk dengan memastikan anak-anak menjalani pendidikan minimal selama 12 tahun;
- c. Peningkatan akses lulusan sekolah menengah atas dan sekolah yang sederajat untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi dengan program KIP Kuliah serta revitalisasi perguruan tinggi berbasis vokasi untuk membentuk tenaga siap kerja;
- d. Membantu lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan melalui program Kartu Prakerja dan menjalankan program pendidikan pranikah; dan
- e. Memberikan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan untuk mewujudkan kesejahteraan warga lanjut usia.

Bukan hanya itu saja tetapi pemerintah juga perlu memperhatikan pendidikan *non-formal* seperti pelatihan keterampilan untuk mengelola sumber daya alam yang nantinya bisa menjadi usaha penduduk. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan dapat menjadi sebuah peluang yang sangat besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik contohnya dengan membuat sebuah produk nasional dengan sumber daya alam yang memadai dan bernilai jual. Indonesia sudah mempunyai kuantitas yang memadai namun kualitas sumber daya manusianya belum unggul. Jadi, bonus demografi ini harus dikelola menggunakan pendidikan dan penguasaan teknologi informasi. Di era bonus demografi ini maka untuk penduduk usia produktif

harus memiliki empat *skill milenial* yang sangat berguna di era digital, yaitu kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*), manajemen diri (*self-management*), bekerja sama dengan orang lain (*working with team*), dan kemampuan memahami perkembangan teknologi (*technology and development*) (UMSU, 2022).

ASPEK SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia (UMSU, 2022). Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan sumber daya alam sebagaimana telah dinyatakan jelas dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUD 1945 mengamanatkan pemerintah dan seluruh masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain (Helmi, 2012). Menurut Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Ph.D dalam paparan kuliah umumnya, bahwa Indonesia adalah salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi sebesar 465.000 ton per tahun, serta produksi karet dan kopi Indonesia juga merupakan salah satu produksi terbesar di dunia dengan jumlah sebesar 2,80 juta ton, dan kopi sebesar 465.000 ton per tahun dan juga potensi laut dan keanekaragaman hayati yang begitu besar (UI, 2022).

Menurut Salamuddin Daeng, bahwa Indonesia dalam hal sumber daya alam merupakan negara dengan kekayaan alam terlengkap di dunia (Setjen Wantannas, 2022). Namun, jika dalam pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik maka laju eksploitasi sumber daya alam akan sangat cepat yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan beban pemulihan yang besar, serta pada akhirnya sumber daya alam habis tetapi perekonomian negara mengalami kemunduran. Sumber daya alam memiliki nilai jual atau nilai ekonomi yang dapat menghidupi negara. Sumber daya alam merupakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sumber daya alam termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut struktur APBN, PNBP sumber daya alam terdiri dari PNBP Migas dan PNBP Non Migas. PNBP Migas berupa Minyak Bumi dan Gas Bumi, sedangkan PNBP Non

Migas berupa mineral dan batubara (minerba), kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa peran sumber daya alam sangatlah besar untuk negara. Negara kita yang merupakan negara yang sangat melimpah sumber daya alamnya namun belum bisa juga menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sumber daya alam juga sebagai penerimaan pendapatan negara, tetapi dalam penerimaan untuk negara tidaklah sebanding dengan eksploitasi sumber daya alam yang sudah berjalan sampai saat ini. Jika pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan baik dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, maka mungkin negara bisa membayar seluruh utangnya dalam jangka waktu 10 tahun. Bahwa Salamuddin Daeng dalam paparannya memberikan saran, yaitu monetisasi sumber daya alam, serta menghentikan kegiatan ilegal dalam ekonomi sumber daya alam dan penyitaan terhadap seluruh uang hasil kejahatan sumber daya alam. Adapun kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya (Pramoda & Koeshendrajana, 2012):

- a. Mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.
- b. Menegakan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.
- c. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap.
- d. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat global.
- e. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu.
- g. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya (Romarina, 2016). Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung (Romarina, 2016).

ASPEK KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Kusrahmadi, 2011). Menurut Dadang Solihin, ada delapan aspek pada ketahanan nasional, meliputi (Solihin, 2015):

- a. Ketahanan Ideologi, kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila.
- b. Ketahanan Politik, kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis.
- c. Ketahanan Ekonomi, kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila yang mampu memelihara stabilitas ekonomi.
- d. Ketahanan Sosial Budaya, kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia.
- e. Ketahanan Pertahanan Keamanan, kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela Negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan.

- f. Ketahanan Posisi Geografis, posisi letak geografis Indonesia terletak pada posisi silang dunia, antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
- g. Ketahanan Demografi, jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 250 juta jiwa, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, serta kemajemukan budaya. (potensi sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional)
- h. Ketahanan Sumber Kekayaan Alam, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat dan laut terbatas jumlahnya sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, disamping keberadaan sumber kekayaan alam merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

Sumber daya alam merupakan suatu kebutuhan bagi negara yang harus dipenuhi. Dengan sifat sumber daya alam yang tidak tersebar secara merata, maka tiap antar negara menjalin hubungan internasional untuk memenuhi kebutuhan di negaranya. Apabila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi, maka negara tersebut dengan berbagai cara akan berusaha memenuhinya, sehingga dapat menimbulkan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya dan hankam (Kusrahmadi, 2011). Oleh karena itu, kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional (Kusrahmadi, 2011). Agar dapat mengatasi kerawanan dan ancaman yang mungkin timbul, maka diperlukan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan asas maksimal, lestari dan berdaya saing (Kusrahmadi, 2011). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan ketahanan nasional (Kusrahmadi, 2011).

Masuknya era bonus demografi akan mempengaruhi ketahanan nasional. Ketika tingginya angka penduduk usia produktif, tetapi tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, maka akan menimbulkan tingginya angka pengangguran. Dampak pengangguran ini akan menimbulkan krisis moneter yang berimbas negatif pada ekonomi negara. Tingginya angka penduduk usia produktif, namun kualitasnya tidak unggul maka akan mengalami ketimpangan sosial ekonomi, yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

PUSTAKA RUJUKAN

- Afriadi, R. 2017. Reformasi Peraturan Agraria dalam Menghadapi Bonus Demografi. *Jurnal Masyarakat Maritim* 1(1): 21-35
- Ahmad, N., Nafsiyati, H., & Ahmad, F. 2021. Mengoptimalkan Pendidikan Karakter pada Generasi Milenial Sebagai Bingkai Pembentuk Generasi Kreatif dan Inovatif dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030. *Jurnal Mau'izhah* 11(2): 1 - 27
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022a. Laju Pertumbuhan Penduduk 2021. *Datasheet*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html> [Diunduh 23 Mei 2022 20.53 WIB].
- [BPS]. Badan Pusat Statistik. 2022b. Realisasi Pendapatan Negara 2020-2022. *Datasheet*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html> [Diunduh 24 Mei 2022 09.10 WIB].
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020. Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021.
- Fajri, D.L. & Safrezi. Batas Wilayah Indonesia Secara Astronomis dan Geografis. Diakses dari <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61cd553cf3504/batas-wilayah-indonesia-secara-astronomis-dan-geografis>, pada 23 Mei 2022 (20.42 WIB).
- Harmadi, S.H.B. 2016. Analisis Data Demografi, dalam Modul 1 ESPA4535 halaman 1-2. Universitas Terbuka. ISBN: 978-602-392-071-6. 276 hal.
- Helmi. 2013. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. ISBN: 978-979-007-453-8.
- [Kemendagri] Kementerian Dalam Negeri. 2022. 273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate versi Kemendagri. *Berita*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri> [Diakses 23 Mei 2022 20.52 WIB].
- [Kemenkeu RI] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. Arah dan Tantangan Kebijakan Fiskal untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Paparan dari Kementerian Keuangan RI dalam Ramusmat Apstranas Bidang Ekonomi Setjen Wantannas pada tanggal 13 April 2022.
- Kusrahmadi, S.D. 2011. Ketahanan Nasional. Materi Penataran Dosen MKU. Universitas Negeri Yogyakarta. 15 halaman.
- Pramoda, R. & Koeshendrajana, S. 2012. Kebijakan Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Borneo Administrator* 8(2): 206 – 229.
- Ramdhan, A. & Maryati. 2021. Pemerintah Jalankan Lima Strategi Untuk Memanfaatkan Bonus Demografi. *Berita Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/1982235/pemerintah-jalankan-lima-strategi-untuk-memanfaatkan-bonus-demografi> [Diakses 24 Mei 2022 19.42 WIB].

- Romarina, A. 2016. Economic Resilience pada Industri Kreatif Guna Menghadapi Globalisasi dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial* 15(1): 35 - 52.
- Setjen Wantannas. 2022. Sumber Daya Alam dan Fiskal, dalam paparannya pada kegiatan Ramusmat Apstranas Bidang Ekonomi Setjen Wantannas pada tanggal 13 April 2022.
- Solihin, D. 2015. Bela Negara dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pembangunan Bangsa. *Materi Dialog Rektor dengan Badan Kepegawaian Negara*, 11 Desember 2015, Swiss Belhotel-Bandung.
- [UI] Universitas Indonesia. Melepas Ketergantungan Pada SDA Memaksimalkan Potensi Indonesia. <https://www.ui.ac.id/melepas-ketergantungan-pada-sda-memaksimalkan-potensi-indonesia/> [Diakses 24 Mei 2022].
- [UMSU] Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sumber Daya Alam Yang Tidak Dapat Diperbaharui. <https://feb.umsu.ac.id/sumber-daya-alam-yang-tidak-dapat-diperbaharui/> [Diakses 24 Mei 2022].
- Umar, M.A. 2017. Bonus Demografi sebagai Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Genta Mulia* 8(2): 90-99.

**PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI BANGSA GUNA MEWUJUDKAN
KETAHANAN NASIONAL MENUJU INDONESIA
EMAS 2045**

Natalina Pakpahan, S.I.Kom.

Analisis Publikasi Kelompok Persidangan dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta.



Nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa telah diyakini kebenarannya dan memberi motivasi untuk terus berjuang menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin

Natalina Pakpahan



KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Pancasila lahir melalui melalui proses panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, di mana oleh pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan sederhana namun mendalam, yang meliputi lima prinsip atau lima sila yang kemudian diberi nama Pancasila. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi Dasar Negara Indonesia, secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Kaelan (2002) menyatakan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang lahir dari hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik dan mulia yang menjadi watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila bersifat mengikat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tertuang di dalam konstitusi negara dan seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan sumber kejiwaan masyarakat yang memberi pedoman bahwa kodrat manusia ialah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Atas dasar alasan historis inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila untuk mendasari penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangun atau konstruksi pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini harus di sosialisasikan, di internalisasikan, dan di institusionalkan kepada semua warga bangsa secara terprogram dan berkesinambungan, sehingga segenap komponen bangsa akan mempunyai kesadaran dan pengetahuan akan nilai-nilai nasionalnya untuk memperkuat jati diri dan wawasan kebangsaannya.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan ideologi dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara sehingga berkedudukan sebagai ideologi negara, merupakan rujukan yang paling dasar atau fundamental atas semua aturan hukum yang akan dibuat untuk mengatur seluruh kehidupan negara dan bangsa sehingga berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan juga sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi negara bermakna bahwa sila-sila dalam Pancasila nilai-nilainya merupakan ide dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang dicita-citakan. Nilai-nilai filosofi untuk mengatur tata kehidupan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila selanjutnya ditetapkan sebagai Dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kedudukan yuridis formal karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, yaitu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara semakin kuat dengan adanya Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan pencabutan Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1978 tentang P4, dimana dalam Pasal I menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional juga merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam mengatur tata kehidupan bernegara. UUD 1945 sebagai dasar hukum berisi norma-norma dasar tertulis yang merupakan landasan konstitusional untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai sumber hukum memiliki fungsi sebagai kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan sadar bagi semua tata peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta masyarakat Indonesia.

Kedudukan Pancasila juga merupakan cita hukum atau sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam negara. Pancasila sebagai cita hukum harus menguasai dan melingkupi hukum dasar (konstitusi) dan norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (M.D. Mahfud, 2010). Sehingga sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum yang bersifat konstitutif dan sebagai dasar hukum yang bersifat regulatif. Hal ini bermakna bahwa hukum dasar (konstitusi) negara Indonesia dan semua produk hukum positif yang bersifat mengatur (regulatif), nilai-nilai yang dikandungnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila (Widjojo, 2016).

Pancasila merupakan hasil pemikiran dan kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang sumbernya tidak lain adalah dari kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk (*plural*) dengan

berbagai ragam budaya, suku bangsa, agama, serta bahasa (multikultural). Ketika bangsa Indonesia berupaya untuk membentuk bangsa yang merdeka dan mendirikan negara yang berdaulat, maka para Pendiri Bangsa (*the Founding Fathers*) bersepakat (mengadakan Perjanjian Luhur) untuk menetapkan cita-cita luhur (falsafah hidup) bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dikemudian hari dan yang akan mendasari semua penyelenggaraan kehidupan dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, Pancasila merupakan falsafah hidup yang menjadi cita-cita dan sekaligus landasan moral bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa dalam hal ini Pancasila yang meliputi nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan telah diyakini kebenarannya dan memberi motivasi untuk terus berjuang menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Seperti yang disebutkan dalam Aliansi Kebangsaan (2019), Pancasila memiliki keharusan sebagai dasar atas tiga hal berikut, yaitu:

1. Pendalaman spritualitas dan rasionalitas pembentuk jatidiri bangsa atau sebagai filsafat bangsa yang diarahkan pada tujuan bangsa dan negara (yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945).
2. Sumber hukum bagi bangsa dan negara, baik pada tingkatan UUD maupun peraturan perundangan di bawahnya.
3. Sumber tata nilai untuk membangun budaya dan karakter bangsa.

Wawasan Nusantara sebagai landasan visioner dalam menyelenggarakan kehidupan nasional berbangsa dan bernegara merupakan ajaran yang diyakini agar tidak terjadi penyimpangan dalam perjuangan menggapai dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Kebangsaan (Aliansi Kebangsaan, 2019) diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun Isi wawasan nusantara adalah perwujudan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan.

Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan wawasan nusantara yang tidak lain adalah pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional, sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

PANCASILA DAN PERKEMBANGAN IDEOLOGI DUNIA

Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa (Maharani dkk., 2019).

Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila terbuka dalam arti tidak menutup diri terhadap segala hal yang baik dari luar, namun keterbukaan Pancasila ini tidak berarti keterbukaan tanpa acuan, yang anarkistik yang justru akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi bebas, radikal dan lepas dari sifat dasarnya, seperti sikap dan tindakan masyarakat yang mulai menggejala dewasa ini. Menurut Arief (2010), ada beberapa jalur yang dapat digunakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila, yaitu jalur pendidikan, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, jalur media masa, jalur organisasi politik, jalur organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Dari pemaparan di atas, dirasa perlu sekali menghidupkan kembali mata kuliah Pancasila di setiap perguruan tinggi, dalam rangka "*nation character building*" yang selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, mengingat posisi strategis mahasiswa sebagai kader pimpinan bangsa di masa depan.

Pancasila merupakan ideologi yang masuk akal dan dijalankan di Indonesia jika Indonesia tetap ingin mempertahankan persatuan dan

keragamannya secara bersamaan. Berbagai ancaman yang dihadapi baik datang dari dalam maupun dari luar yang terkait ideologi seperti DI/TII, NII, PKI, sampai sekarang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tetap menunjukkan ketangguhannya.

Ketangguhan Pancasila berkontestasi dengan ideologi-ideologi besar maupun alternatif tersebut, bukan hanya karena faktor internal ideologi itu sendiri, yaitu kebulatan dan keutuhannya yang mengagumkan, namun juga karena dukungan faktor eksternal yaitu barisan penjaga ideologi Pancasila, baik yang formal seperti Presiden dan jajaran kabinetnya, para penatar Pancasila lulusan Lemhannas RI, para guru dan dosen pengajar dan pendidik Pancasila, maupun informal, seperti para tokoh agama, suku dan adat, serta komunitas warga di tingkat akar rumput, yang tidak pernah mengenal kata menyerah dalam memperjuangkan penegakan keluhuran nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sehari-hari. Supaya tetap tangguh ideologi Pancasila maka yang perlu dilakukan antara lain: (1) Penguatan dan radikalisasi ideologi Pancasila tidak hanya ditujukan kepada para kader pemimpin di bidang pemerintahan (seperti lewat aneka kursus “wajib” yang diadakan oleh Lemhannas), namun juga bagi para pemimpin dan pengurus ormas, partai politik, organisasi Serikat Buruh, para pimpinan universitas, sekolah baik negeri maupun swasta, pondok pesantren dan pusat-pusat pembelajaran agama serta aliran kepercayaan. (2) Ideologi Pancasila sebagai benteng identitas nasional perlu lebih digalakkan lagi di wilayah perbatasan atau titik-titik terluar batas wilayah NKRI Ideologi Pancasila sebagai ikhtiar pembangunan karakter bangsa perlu kembali dimasukkan sebagai kurikulum wajib di semua tingkat pendidikan formal di seluruh Indonesia, hanya saja dihindari cara-cara penyampaian yang indoktrinatif dan semi-militeristik seperti pola P4 di masa Orde Baru. Para guru, dosen, dan penatar Pancasila memegang peranan penting dan tak tergantikan untuk secara kreatif dan inspiratif memperkaya metode pengajaran, sosialisasi, dan internalisasi ideologi Pancasila bagi siswa didiknya (Surajiyo, 2020).

IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *national resilience* karena dianggap memiliki pengertian yang dinamik, aktif, dan proaktif. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan. Ketahanan nasional juga

mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasionalnya (Surono, 2019).

Hubungan antara ketahanan nasional dengan ideologi Pancasila merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ideologi Pancasila merupakan alat pemersatu dan penguat ketahanan nasional. Pada awal pembentukan negara Indonesia. Ideologi Pancasila disepakati secara politik yang mendasari dibentuknya negara Indonesia. Ideologi ini akan digunakan sebagai arah dan cita-cita membangun bangsa dan negara. Ideologi Pancasila dibangun sebagai gagasan atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Pancasila juga memiliki ciri sebagai ideologi terbuka, yang berarti nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan jaman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat dinamis inilah yang sangat dibutuhkan dalam tetap menjaga ketahanan nasional di tengah arus perubahan modern. Di samping itu Pancasila juga memiliki sifat sebagai ideologi yang komprehensif. Sifat inilah yang sangat penting dalam mendasari ketahanan nasional. Ideologi komprehensif adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial dan menyeluruh. Ideologi Pancasila tidak berpihak pada golongan tertentu karena dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia itu mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang sifatnya beragam. Ciri komprehensif lainnya adalah terletak pada esensinya, yaitu nilai-nilai Pancasila merupakan prinsip dasar dalam hidup bersama dalam suatu kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dari suatu bangsa yang beraneka ragam budaya dan agama. Kondisi keanekaragaman tersebut bersepakat mendirikan suatu negara-bangsa demi terwujudnya cita-cita bersama yaitu suatu kualitas kehidupan dalam suatu negara (Kaelan, 2002).

Salah satu elemen penting dalam menggapai ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Untuk Indonesia, ideologi yang dimaksudkan adalah ideologi Pancasila. Berbicara tentang ideologi Pancasila, suka tidak suka, kita juga harus merujuk pada pidato Ir. Soekarno dalam Sidang BPUPK

tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut ia menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia (Tim Panitia Kongres Pancasila IX, 2017). Selain itu, peran Pancasila dalam perdamaian dunia juga memegang peran yang sangat vital karena mampu menjadi ideologi penyeimbang antara sosialisme dan kapitalisme. Hal tersebut sesuai dengan semangat dan cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia yang menginginkan terwujudnya perdamaian dunia.

PRINSIP KETAHANAN IDEOLOGI PANCASILA

Ketahanan ideologi Pancasila dapat dimaknai sebagai kondisi dinamik ideologi bangsa Indonesia yang berisi ketangguhan dan keuletan yang membentuk kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (Surono, 2019). Indonesia tentu saja mengalami dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan sekarang di era Revolusi Industri 4.0 akan menjadi catatan sejarah bagaimana Pancasila digunakan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga memunculkan sebuah ketahanan ideologi. Sifat keterbukaan Pancasila selalu dipertanyakan dalam setiap rentang waktu dalam menghadapi fenomena yang ada. Keterbukaan seperti apa yang diharapkan untuk tetap mendudukkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Bagaimana juga individu seharusnya bersikap dalam setiap dinamika bangsa, mengingat problem keseharian senantiasa dapat menjadi penghambat atau pendorong suatu pandangan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi ialah sistem nilai.

Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat baik secara individual maupun sosial. Pembahasan ketahanan ideologi di Indonesia relevan sekali jika dikaitkan dengan proses bagaimana ideologi dibangun dan dipertahankan karena selalu berhimpitan dengan persoalan kepentingan individu dan sosial. Tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan ideologi di era globalisasi adalah merebaknya perilaku masyarakat yang cenderung memilih liberalisasi sebagai nilai yang dianggap positif, seraya mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Kemunduran moral telah melepaskan nilai Pancasila, juga nilai ke-Tuhanan dengan mengalirnya radikalisme dan konflik antar umat beragama, luntarnya nilai kemanusiaan dengan perbuatan yang tidak beradab, dan sebagainya. Nilai-nilai yang dibangun kemudian dapat mengancam nilai persatuan dan kesejahteraan manusia. Berkaitan dengan ideologi, (Surono,

2019) menyebutkan ada beberapa aspek berpengaruh pada ketahanan ideologi, yaitu (1). Wilayah perbatasan relatif jauh dari pantauan pemerintah pusat. (2) Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak memadai. (3). Kecenderungan masyarakat setempat kepada negara tetangga. (4). Penggunaan mata uang asing (di wilayah perbatasan tertentu). (5). Maraknya penyelundupan. (6) Pemalsuan dokumen. (7). Pemanfaatan jalan setapak. (8). Terjalannya hubungan keluarga di antara masyarakat perbatasan. (9). Tenaga kerja. (10). Banyaknya pulau-pulau kecil di sekitar perbatasan. (11). Kesenjangan tingkat ekonomi.

Indonesia dengan posisi berada di antara dua benua dan dua samudra sangat rawan dengan kondisi seperti di atas, jika tidak dapat mengelola sumber daya manusia, alam, dan fasilitas yang seharusnya diberikan. Mengingat secara geografis Indonesia wilayahnya berjauhan, maka pulau-pulau kecil, pulau dalam perbatasan, sangat rawan terhadap ancaman ketahanan ideologi. Kesenjangan ekonomi merembet pada model tenaga kerja, ketrampilan dan jenis pekerjaan, eksploitasi perempuan misalnya, menjadi persoalan dalam hal ini. Masyarakat harus menyadari bahwa perubahan perilaku dengan membawa nilai yang baru tentu akan berpengaruh pada bangunan negara yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam nilai Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila harus dijadikan sebagai alat untuk menjaga munculnya disintegrasi bangsa.

Dalam hal ini, pemerintah senantiasa memberikan prioritas pembangunan pada kawasan perbatasan negara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan menetapkan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kota pusat pertumbuhannya sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Dalam pembangunan kawasan perbatasan negara, Pemerintah menerapkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada tiga pendekatan, yaitu keamanan, kesejahteraan dan lingkungan hidup secara proporsional dan terintegrasi. Pembangunan daerah perbatasan memerlukan kerangka penangan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat.

Dalam konteks inilah mengemukakan kembali ideologi Pancasila dalam kehidupan ekonomi terasa sangat relevan. Wawasan ekonomi Pancasila memberikan semacam pegangan kepada setiap pelaku ekonomi, terutama pemerintah, dalam melaksanakan upaya memajukan kehidupan ekonomi negara, bangsa dan masyarakat. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat Pancasila. Dengan demikian, pembangunan Ekonomi Kerakyatan harus mengedepankan kebijakan untuk kemakmuran/ kesejahteraan rakyat guna mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat

Pancasila sebagai filter mampu beradaptasi dengan dinamika dunia, dan tak ada satupun nilai yang harus ditanggalkan. Berdampingan dengan ideologi dunia, Pancasila mempunyai nilai universal dan secara khusus konkret mempunyai makna sebagai alat yang disepakati secara politis menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Persoalan yang seringkali muncul terlebih dahulu adalah primordialisme, yang diakibatkan oleh prasangka buruk (negatif) dan stereotip. Ketika prasangka buruk dan stereotip dikedepankan tanpa didasari oleh pengetahuan dan bukti historis yang benar dan memadai, maka tumbuhlah benih-benih konflik antar individu/etnis/sub etnis/agama/ budaya yang bersumber dari pemahaman secara parsial terhadap perilakunya serta simpulan yang tidak adil.

Para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai *Theory of Everything* permasalahan sosial sebagaimana disebutkan dalam tulisan Aliansi Kebangsaan (2019). Pancasila sebagai hiper-paradigma mampu menjelaskan seluruh fenomena sosial hukum dalam kesatuan penjelasan secara integral. Sehingga apabila dilakukan analisis Ketahanan Nasional berdasarkan paradigma budaya dan peradaban yang berakar pada Pancasila dapat disimpulkan menjadi tiga yaitu:

Pertama, kemauan untuk bersatu atau hasrat hidup bersama berakar pada kemampuan faktor mental-spiritual yang didasari oleh nilai-nilai dari Sila 1, 2, dan 3. Namun, kekuatan persatuan dan kesatuan Indonesia hanya akan kokoh bertahan jika Sila ke 5 dilaksanakan dengan benar dan konsekuen.

Kedua, kemampuan manajemen nasional perwujudan faktor institusional-politik yang didasari nilai-nilai Sila 4, berwujud kebijakan publik sesuai nalar publik, menunjukkan kekuatan kelembagaan sosial budaya bangsa merujuk pada nilai-nilai dari kelima sila Pancasila.

Ketiga, penguasaan teknologi yang merupakan perwujudan faktor material-teknologikal, guna membangun sistem perekonomian yang kuat bagi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, didasari oleh kelima sila dari Pancasila.

IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional di bidang politik adalah kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT dari dalam maupun dari luar, yang langsung atau tidak langsung membahayakan kehidupan politik bangsa dan negara (Arief, 2010) Agar tercipta kondisi Ketahanan Nasional Indonesia yang kuat, maka perlu diciptakannya sistem politik yang kondusif bagi terciptanya kondisi tersebut, berdasarkan Pancasila (Arief, 2010).

Ketahanan Nasional Indonesia di bidang politik menghadapi ancaman yang bersumber dari dalam negeri, yaitu berupa kegiatan subversi untuk merongrong ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan kegiatan politik praktis kelompok-kelompok non formal yang secara langsung atau tidak langsung menghalang-halangi upaya perwujudan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari luar negeri, berupa kegiatan subversi asing yang merugikan kepentingan Indonesia maupun negara-negara ASEAN.

Dalam menghadapi dinamika perubahan zaman, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk konsisten dengan nilai-nilai dasar kebangsaan yang tercantum dalam Pancasila, serta menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam tahapan yang lebih kongkrit dalam kehidupan politik. Urgensi ini amat dirasakan oleh masyarakat majemuk seperti Indonesia yang senantiasa berada dalam suasana perbenturan berbagai nilai hidup yang berkembang, baik karena interaksi budaya dengan dunia luar, maupun karena kemajemukan nilai di dalam budaya bangsa.

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pemerintah NKRI adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia selama ini telah melaksanakan

hubungan dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri melalui forum bilateral maupun multilateral diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya, politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendidikan serta rasional dan luwes dalam pendekatan yang didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Politik luar negeri Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Aturan ini mencakup penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Kebijakan luar negeri Indonesia secara aktif berupaya meningkatkan kesetaraan yang lebih tinggi dalam hubungan yang telah terjalin dengan Negara-negara di seluruh bumi. Promosi perdagangan, investasi dan pariwisata merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri membawa sumbangan nyata bagi pembangunan nasional. Politik luar negeri Indonesia secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global, sebagai suatu Negara yang mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan yang ada.

PUSTAKA RUJUKAN

- Aliansi Kebangsaan, Suluh Nuswantara Bakti, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri TNI-POLRI. 2019. Menggalang Ketahanan Nasional. Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. ISBN: 978-623-241-006-0.
- Arief, U. 2010. Menciptakan Sistem Politik Berdasarkan Pancasila Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional. *Jurnal Sosial Humaniorah* 3(2): 139 – 147.
- Kaelan, M.S. 2002. Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Penerbit Paradigma, Yogyakarta. ISBN: 979-865-800-0. viii+263.
- Maharani, S.D., Surono, Sutarmanto, H., & Zubaidi, A. 2019. Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional* 25(2): 277-294.
- M.D. Mahfud, M. 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers. Jakarta. ISBN: 978-979-769-311-4. xiv+310.
- Surajiyo, 2020. Keunggulan Dan Ketangguhan Ideologi Pancasila. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 3(4): 145 - 155.
- Tim Panitia Kongres Pancasila IX (Ed.). 2017. Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila. UGM Press, Yogyakarta. ISBN: 978-602-386-248-1.
- Widjojo, A. 2016. Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 2(1): 7–18. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v2i1.489>.

PERANAN OTONOMI DAERAH DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

Daniel Maruli Tua Manik, S.E.¹

Karina Dewi, S.H.²

¹Auditor Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,
Jakarta

²Analisis Hukum, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta



*Proses pembangunan selain mempertimbangkan aspek
pertumbuhan dan pemerataan juga harus
Mempertimbangkan dampak dari aktivitas ekonomi
terhadap kehidupan sosial masyarakat*

Daniel Maruli Tua Manik & Karina Dewi



PENDAHULUAN

Pada era disrupsi saat ini, dimulai dari munculnya isu perubahan iklim yang mengarah pada *global warming*, pembatasan aktivitas sosial akibat pandemi covid-19 dan semakin gencarnya revolusi industri, mengisyaratkan bahwa telah terjadi perubahan struktur perekonomian yang semula digerakan oleh pemanfaatan sumber daya menjadi ke arah produktivitas tinggi (Pantjoro, 2021).

Sejak munculnya revolusi industri 1.0 pada pertengahan abad ke 18 terjadi revolusi di berbagai sektor seperti pertanian, manufaktur, pertambangan dan transportasi, munculnya mesin membantu dalam efisiensi jumlah beban pekerjaan walaupun masih terbatas, berlanjut pada revolusi industri 2.0 dimana pada awal abad 20 telah mulai ditemukan pipa gas, air dan alat telekomunikasi semakin mempermudah hidup manusia. Mulai ditemukannya telepon genggam, mesin kontrol, dan termasuk didalamnya komputer mengarahkan manusia ke arah digital sebagai penanda revolusi industri 3.0. saat ini revolusi 4.0 dan 5.0 fokus pada pemberdayaan manusia, teknologi dan data, revolusi industri mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sistem transportasi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi produksi, distribusi dan produktivitas yang tinggi sehingga mampu menghasilkan barang lebih murah dan menyejahterakan masyarakat (Niode, 2009).

Selain dampak positif, perlu menjadi perhatian bahwa perubahan tersebut juga membawa dampak negatif, di antaranya:

1. Terjadinya urbanisasi, dengan terjadinya peningkatan jumlah populasi masyarakat di kota besar.
2. Tergantikannya peran manusia oleh mesin, menambah banyaknya jumlah pengangguran (Velarosdela, 2021).
3. Munculnya pabrik-pabrik manufaktur mengakibatkan bertambahnya limbah industri mulai dari pencemaran air, udara hingga tanah.
4. Persaingan yang tidak seimbang antara perusahaan besar dan kecil.
5. Tergerusnya lahan pertanian akibat berkembangnya lahan industri
6. Munculnya kesenjangan ekonomi masyarakat.

Melihat kembali tujuan negara Indonesia yang tercantum pada Alinea ke-4 UUD 1945

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ..."

Dijelaskan juga pada Pasal 33 UUD 1945:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jelas bahwa sistem ekonomi negara Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan, negara hadir untuk kemakmuran rakyat dengan menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, agar tidak terjadi persaingan yang menggusur rakyat kecil dan lemah. Pemerintah harus mampu mengantisipasi dampak tersebut, sehingga tidak merongrong semangat ekonomi kerakyatan dan hal ini perlu dilakukan penanganan agar kepentingan nasional Indonesia sebagai tujuan negara dapat tercapai.

Sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi negara Indonesia tergambar melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberdayaan UMKM salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, merujuk pada UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM pemberdayaan UMKM diperlukan menyeluruh, optimal dan berkesinambungan, melalui iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha akan meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Era digital saat ini mau tidak mau UMKM harus mampu memanfaatkan ekonomi digital namun terdapat kondisi belum meratanya infrastruktur jaringan internet hingga ke pelosok daerah di Indonesia, selain itu UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mengatur secara detail tentang perlindungan data pengguna teknologi digital ditambah kurangnya literasi digital di masyarakat mengakibatkan salah kaprah menjadi hambatan perkembangan UMKM (Amran, 2020; Khadijah, 2021).

Kemandirian ekonomi adalah cita-cita bangsa Indonesia, belum adanya daya saing produk dalam negeri menyebabkan belum meningkatnya penggunaan produk dalam negeri sehingga masih ketergantungan terhadap produk impor padahal Indonesia memiliki potensi SDA dan SDM melimpah. Permasalahan lain terkait kemandirian ekonomi adalah belum terintegrasinya industri pariwisata dengan industri kreatif dan UMKM, dimana industri pariwisata seharusnya menjadi prioritas pemulihan karena saat terjadinya pandemik, sektor pariwisata adalah yang paling terdampak.

PROSES PEMBANGUNAN

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara namun lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial sering kali diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan juga harus mempertimbangkan dampak dari aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik. Pembangunan negara yang sedang berkembang pada awalnya identik dengan upaya meningkatkan pendapatan per-kapita dengan melakukan berbagai macam strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita-nya diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran dan kemiskinan dapat terpecahkan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional per kapita yang riil. Inilah yang mendorong lahirnya ekonomi pembangunan, yang menjadikan kebutuhan, yang mendesak, selain untuk mendorong semangat mengejar ketinggalan dengan negara lainnya. Setidaknya terdapat 3 (tiga) pilar utama dibalik munculnya teori

pembangunan, yaitu: pertumbuhan ekonomi, bantuan dari luar negeri, dan perencanaan. Pembentukan modal dianggap kunci menuju ke arah keberhasilan pembangunan, tetapi sayangnya modal yang sangat besar tersebut tidak dimiliki oleh negara di dunia ketiga, yang dalam kenyataannya lebih mempunyai kekayaan alam dan sumber daya manusia dalam jumlah yang besar. Jalan pintas pun ditempuh, dengan mengundang pemodal asing, untuk menutupi kesenjangan yang terjadi antara tabungan dan investasi, maupun kesenjangan kebutuhan devisa. Pada gilirannya, agar tercapai target pertumbuhan ekonomi, maka perencanaan makro maupun sektoral menjadi semacam kondisi yang memadai (*sufficient condition*).

Kenyataan membuktikan bahwa pembangunan yang menjadi obsesi banyak negara tidak berjalan sesuai seperti yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi memang pesat dan modernisasi dapat diwujudkan, tetapi diiringi oleh persoalan pembangunan yang senantiasa sangat aktual. Persoalan tersebut seperti masalah pengangguran, tingkat urbanisasi yang tinggi yang dapat meningkatkan kelompok masyarakat miskin di kota besar, dinikmatinya hasil pembangunan pada golongan tertentu saja, kesenjangan kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Banyak kemudian yang memunculkan adanya krisis dalam pembangunan. Krisis tersebut seperti krisis ekonomi yang melanda, atau krisis institusi, atau krisis negara. Inilah yang menandai reorientasi pembangunan. Proses evolusi ekonomi pembangunan terlihat pada dimensi baru dalam pembangunan, seperti pendekatan kebutuhan pokok, pembangunan mandiri dan *ethnodevelopment*.

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi selalu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif, oleh karena itu diperlukan tolak ukur terjadinya pembangunan. Paradigma tradisional terkait dengan pembangunan ekonomi cenderung diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai pemahamannya adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun tertentu dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier, 1995). Pemahaman proses itu sendiri merupakan berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi, dengan kata lain pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan.

Perubahan yang pertama, yakni perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Penekanan kepada pendapatan per kapita tidak hanya kenaikan pendapatan nasional riil tetapi juga perhatian pembangunan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pendapatan nasional riil sering kali tidak diikuti oleh perbaikan kualitas hidup. Bila pertumbuhan penduduk melebihi atau sama dengan pendapatan nasional maka pendapatan per kapita bisa menurun atau tidak berubah, dan ini tidak dapat disebut dengan pembangunan ekonomi. Indikator yang digunakan dalam indikator pembangunan ekonomi meliputi aspek ekonomi dan aspek sosial.

Dalam aspek ekonomi tujuan operasional dan analitik, kriteria utama Bank Dunia dalam mengklarifikasikan kinerja perekonomian suatu negara adalah *Gross National Income* (GNI) atau Produk Nasional Bruto per kapita. GNI per-kapita merupakan pendapatan nasional bruto dibagi jumlah populasi penduduk. Bank dunia mengklasifikasikan negara berdasarkan tingkat GNI per kapita-nya meliputi :

- a. Negara berpenghasilan rendah adalah negara-negara dengan GNI per kapita kurang atau sama dengan US\$ 1.035;
- b. Negara berpenghasilan menengah adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita lebih dari US\$ 1.036. Dalam kelompok negara berpenghasilan menengah dibagi menjadi: (1) negara berpenghasilan menengah papan bawah dengan GNI per kapita US\$ 1.036 hingga US\$ 4.045; (2) Negara berpenghasilan menengah ke atas dengan GNI per kapita US\$ 4.046 hingga US\$ 12.535; dan
- c. Negara berpenghasilan tinggi adalah kelompok negara dengan GNI US\$ 12.535 atau lebih pada tahun 2020.

Negara berpenghasilan rendah dan menengah yang disebut negara sedang berkembang (*developing countries*). Semua negara-negara dengan katagori kelompok ini akan mengalami tahapan pembangunan yang sama, klasifikasi menurut penghasilan tidak selalu mencerminkan status pembangunan namun pada umumnya negara sedang berkembang memiliki karakteristik yang relatif sama, yaitu: (1) tingkat kehidupannya rendah dengan ciri penghasilan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan; (2) tingkat produktivitasnya yang rendah; (3) pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungannya yang tinggi; (4) tingkat pengangguran dan setengah penganggurannya yang tinggi dan

cenderung meningkat; (5) ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor primer demikian signifikan; (6) dominan, tergantung dan rentan dalam hubungan internasional.

Dalam aspek sosial, tataran dalam tolak ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan *gross* nasional produk. *Gross* Nasional Produk per kapita, sebagai ukuran tingkat kesejahteraan mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan umum yang sering kali dikemukakan adalah memasukkan produksi yang tidak melalui pasar seperti dalam perekonomian sub sistem, jasa ibu rumah tangga, transaksi barang-barang bekas, kerusakan lingkungan dan masalah distribusi pendapatan. Akibatnya, bermunculan upaya untuk memperbaiki maupun menciptakan indikator lain sebagai pelengkap ataupun alternatif dari indikator kemakmuran yang tradisional. Indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur penelitian, seperti indikator sosial-ekonomi. Indikator-indikator ini dipilih berdasarkan atas tingginya korelasi dalam membentuk indeks pembangunan dengan menggunakan bobot timbangan yang berasal dari berbagai tingkat korelasi. Indeks pembangunan tersebut ternyata mempunyai korelasi yang sangat erat dengan indikator sosial ekonomi dibandingkan dengan korelasi GNP per kapita. Indikator yang sering menjadi rujukan lainnya adalah indikator sosial dan lingkungan hidup, dimana indikator yang digunakan seperti tingkat pendidikan, kesamaan jender, penurunan kematian bayi dan balita, penurunan kematian ibu melahirkan dan lainnya. Sedangkan indikator lingkungan adalah dilihat dari kemampuan mempertahankan dan regenerasi lingkungan. Dari rasio tersebut tentunya dapat diimplementasikan bahwa peningkatan populasi angka kelahiran dan akses kebutuhan lingkungan dalam mencukupi kebutuhan hidup tentu saja akan terlihat meningkat, sehingga dibutuhkan negara untuk mengimplementasikan strategi nasional dalam meningkatkan akses kepada peningkatan sumber daya alamnya, untuk memenuhi jatah populasi yang diperlukan. Contoh nyata yang sering terjadi adalah dampak yang ditimbulkan akibat hilangnya sumber daya lingkungan pada tingkat nasional.

PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Pada masa orde lama pembangunan ekonomi belum banyak berkembang, yang perlu diketahui bahwa pada masa itu, peran pemerintah lebih menonjol ke arah pembangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Pada masa orde baru, barulah pembangunan ekonomi mulai berkembang dengan cepat seiring dengan restrukturisasi. Apabila dilihat dari perkembangan

pembangunan nasional yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru, melalui tahapan Pelita dan konsep dasar pembangunan yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia sedang menjalani suatu proses modernisasi nasional di segala bidang, terutama segala hal yang menyangkut pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini sudah menjadi diskusi para ahli bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan karena akan berkaitan erat dengan usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional.

Apabila dilihat dari segi ketahanan nasional, kemantapan dalam bidang ekonomi akan berdampak positif kepada bidang-bidang kehidupan lain dan tantangan yang terjadi akan mudah dihadapi untuk menyelesaikannya. Pada era reformasi, arah pembangunan ekonomi diarahkan sesuai dengan GBHN tahun 1999-2004 yang pada intinya mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan pembangunan ekonomi tersebut dicapai dengan memperdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta berbasis sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri (Nugraha, 2020). Sasaran utama dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan stabil, turunnya jumlah pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, tersedianya lapangan pekerjaan, serta ketahanan ekonomi nasional yang semakin kuat, dan meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan terjadinya kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang. Menurut Todaro (1998), pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut. Terwujudnya pembangunan ekonomi, maka perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan bertambah, serta kesempatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya juga semakin luas. Dalam pembangunan ekonomi, memberikan pilihan yang bebas kepada masyarakat luas untuk

dapat mengembangkan potensinya. Sedangkan dalam perekonomian yang primitif, masyarakat dipaksa bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tidak mati. Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang tersedia.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan/pertambahan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi dalam negara tersebut terjadi atau tidak. Secara ekonomi, ukuran produktivitas suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi dilihat dari Produk Nasional Bruto atau *Gross National Product* (GNP) dan Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP). Berhasil tidaknya proses pembangunan ekonomi, banyak ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah pemakaian sistem ekonomi yang diterapkan. Di samping itu ada beberapa faktor pendukung yang tidak kalah penting akan perlunya mengadakan pembangunan ekonomi. Faktor tersebut:

1. Adanya kenyataan bahwa banyak negara mengalami perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya tetapi, hanya cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk.
2. Adanya perbedaan tingkat hidup antara negara-negara yang satu dengan negara lain dan perbedaan itu semakin melebar.
3. 67% penduduk dunia hanya menerima kurang dari 17% pendapatan nasional.
4. Adanya kesadaran untuk selalu meningkatkan tingkat pendapatan nasional dari negara-negara sedang berkembang. Usaha-usaha mereka ternyata menimbulkan masalah seperti, masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya (Maharani & Sulistyowati, 2020).
5. Apakah perkembangan itu dinyatakan dalam tingkat kemakmuran ekonomi atau tingkat kesejahteraan, pada umumnya yang penting adalah mereka menghendaki adanya tingkat hidup yang lebih baik. (Sukirno, 2006).

Pembangunan ekonomi yang berjalan dalam suatu negara dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan ekonomi tentu saja menguntungkan masyarakat dan negara namun

bagaimana dengan dampak negatifnya? Setiap tindakan yang diambil atau dipilih pasti ada dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari pembangunan ekonomi tentu saja merugikan masyarakat dan negara yang bisa saja menurunkan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan meningkat. Lalu bagaimana pembangunan ekonomi di suatu negara dapat berjalan dengan baik? Idealnya pembangunan ekonomi dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik karena adanya peran aktif masyarakat dan pemerintah. Apabila pembangunan ekonomi hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja maka pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Jika pembangunan hanya dijalankan oleh pemerintah saja maka akan menjadi pembangunan ekonomi yang diktator yang akhirnya bukan menimbulkan kesejahteraan masyarakat melainkan kesengsaraan. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan. Penduduk merupakan aset penting dalam pembangunan, mengingat penduduk sebagai suatu sumber daya manusia dalam pembangunan. Menurut penulis ada beberapa faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Sumber daya alam;
2. Sumber daya manusia;
3. Modal usaha;
4. Teknologi yang berkembang;
5. Produksi yang dihasilkan;
6. Faktor sosial; dan
7. Faktor politik.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat secara merata. Kesejahteraan yang diidealkan adalah kesejahteraan masyarakat secara merata. Seperti yang diketahui bahwa banyak juga kejadian nyata bahwa kesejahteraan hanya terasa di beberapa kelompok saja. Apakah kesejahteraan yang dinikmati oleh beberapa kelompok saja dapat dikatakan pembangunan ekonomi nasional berhasil maju? tentu saja tidak. Pembangunan ekonomi nasional berhasil jika kesejahteraan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara merata. Tujuan dari pembangunan ekonomi bukan hanya mengecilkan kesenjangan antara pusat dan daerah tetapi juga mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi ini perlu adanya pembagian peran. Agar dengan peran tersebut dapat terlaksanakan pembangunan ekonomi pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Untuk-mewujudkan pembangunan ekonomi yang ideal perlu adanya strategi. Strategi yang dimaksud dapat berupa kebijakan, menciptakan lapangan kerja dan pelatihan, dukungan untuk program usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan investasi. Salah satu strategi pembangunan ekonomi yang sedang meningkat adalah adanya program UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bulan Maret 2021 bahwa jumlah UMKM sebanyak 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian karena UMKM dapat sebagai penyedia lapangan pekerjaan, pencipta pasar baru, dan berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto dan neraca pembayaran. UMKM bagi pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai posisi yang strategis yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu: Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar; Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu; Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar; dan Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Di daerah yang perlu diketahui untuk meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah daerah membebaskan masyarakat daerah untuk mengembangkan potensinya dengan membuat UMKM yang dapat berupa makanan, kerajinan, dan wisata. Diharapkan UMKM di daerah dapat berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Walaupun yang diketahui selama ini adalah tantangan bagi UMKM daerah adalah dapat bertahan menghadapi persaingan di luar daerah maupun luar negeri. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan UMKM di daerah, maka pelaku usaha (masyarakat) perlu meningkatkan kemampuan produksi dan meningkatkan kemampuan potensi dan kreativitas serta daya saing produknya. UMKM selalu dituntut untuk selalu inovatif dalam mengembangkan produknya maupun dalam mengenalkan produknya (pemasaran). UMKM berdaya saing tinggi dicirikan oleh:

1. Tren yang meningkat dari laju pertumbuhan volume produksi;
2. Pangsa pasar (dalam negeri maupun luar negeri) yang terus meningkat;
3. Yang melayani tidak hanya domestik tetapi juga ekspor;
4. Tidak hanya melayani pasar lokal tetapi pasar nasional (untuk kasus pasar domestik), dan tidak hanya melayani pasar di satu negara saja tetapi juga di banyak negara lainnya (untuk kasus ekspor).

Lemahnya kreativitas dan inovasi, kurangnya kemampuan dalam membaca peluang, permodalan usaha serta lemahnya strategi pemasaran menjadi masalah pokok dalam UMKM, karena sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan jika promosi dalam hal pemasaran kurang, maka produk yang dihasilkan tersebut tidak dapat bersaing. Untuk itu, pemerintah ke depannya diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM, tidak saja dari segi teknis tetapi juga manajerial. Pemerintah perlu pula mengupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan memberikan keamanan dalam berusaha salah satunya dengan penyederhanaan prosedur perijinan usaha dan juga pajak. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kemitraan UMKM merupakan upaya, agar UMKM dapat beradaptasi dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing, sehingga UMKM tersebut dapat berkembang, dan mampu menyejahterakan anggotanya. Capaian tersebut tentunya berperan dalam penguatan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dalam mengembangkan dan memajukan UMKM yang diperhatikan bukan hanya mengenai produk dan pemasarannya, tetapi juga perlu sebuah pelatihan bagi pelaku usaha maupun tenaga kerjanya. Pelatihan tersebut dimaksud untuk dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja atau pelaku UMKM. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi, yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya (Suyono, 2018). Pelatihan dan pendidikan yang berbasis peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM sebagai langkah strategi pemberdayaan. Menurut Effendi M. Guntur (Guntur, 2009), pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk

memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Bukan hanya pelatihan, pemasaran, produksi, maupun manajemennya saja tetapi kerja sama yang beriringan antara pemerintah dengan masyarakat (pelaku usaha) juga sangat penting (Widiyati & Listyani, 2016). Di sinilah peran pemerintah dan masyarakat (pelaku usaha) bekerja sama. Pemerintah mempunyai kesempatan untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan UMKM untuk memajukan pembangunan ekonomi dengan cara membuat kebijakan, menyediakan sarana dan kesempatan, serta memberikan pelatihan bagi masyarakat. Masyarakat (pelaku usaha) mempunyai potensi untuk mengenali kebutuhan orang banyak dengan inovatif. Jika hubungan tersebut antara pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa UMKM menjadi strategi pembangunan ekonomi yang berhasil.

PEMBERDAYAAN UMKM DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI NASIONAL

Pada periode pandemi Covid-19 tahun 2021 telah mengalami penurunan, hal ini juga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan data infografis Biro Pusat Statistik (BPS), TPT menurun 0,58 persen poin dibanding Agustus 2020. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penurunan TPT tersebut, tidak lepas dari beberapa peran pemerintah. Salah satu peran nyata pemerintah adalah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikeluarkan pada tahun 2020.

Program PEN sampai dengan tahun 2021 masih berjalan, dan secara anggaran meningkat, dari tahun 2020 sebesar 695,2 triliun rupiah menjadi 744,7 triliun rupiah pada tahun 2021. Anggaran tersebut ditujukan bagi UMKM dan Korporasi sebesar 162,40 triliun rupiah dengan beberapa program di antaranya adalah subsidi bunga UMKM KUR dan Non-KUR sebesar 42,17 triliun rupiah, BPUM (unit usaha) 15,36 triliun rupiah, penjaminan lost limit UMKM dan Korporasi 2 triliun rupiah, pembebasan rekmin, biaya beban, abonemen 2,11 triliun rupiah, penempatan dana cadangan 30,25 triliun rupiah, penempatan dana cadangan 30,25 triliun rupiah, IJP UMKM dan korporasi 5,66 triliun rupiah. Program PEN akan dilanjutkan di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 414 triliun

rupiah, yang difokuskan kepada bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi. Alokasi anggaran ini berpotensi meningkat mengikuti kebutuhan penanganan Covid-19 (Kementerian Keuangan, 2021).



Gambar 5. Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Sumber: Kemenkeu, 2021)

Program PEN yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2020 bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tim Koordinator PMO Sektor Transportasi dan Finansial KPPIP menyatakan ada empat (4) faktor utama dalam pemulihan ekonomi, yaitu: meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga melalui penguatan program bantuan sosial dan percepatan program vaksinasi, melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan regulasi turunannya untuk meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional, mendorong realisasi pengeluaran pemerintah untuk mengungkit percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi, serta peningkatan aktivitas ekspor (Tim Koordinator PMO Sektor Transportasi dan Finansial KPPIP 2021).

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat dukungan pemerintah yang cukup besar bagi UMKM dan korporasi. Beberapa dukungan pemerintah tersebut berupa peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui kebijakan KUR, yaitu peningkatan plafon pembiayaan KUR 2021 yang mencapai 285 triliun rupiah. Pemerintah juga memberikan relaksasi kebijakan KUR untuk memudahkan pembiayaan bagi UMKM selama masa pandemi. Tentunya

kebijakan ini berisiko defisit APBN yang semakin tinggi, tapi bagaimanakah hal tersebut menjadi program untuk Pemulihan Ekonomi Nasional?

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan momentum penguatan kinerja ekonomi domestik terutama ditopang oleh berlanjutnya kebijakan fiskal *countercyclical* dalam APBN 2021 (Librianty, 2021). Kebijakan fiskal *countercyclical* adalah kebijakan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pemungutan pajak selama masa resesi. Dampak dari pengambilan kebijakan ini terjadinya defisit yang mengakibatkan pembengkakan APBN. Namun, hal ini harus dilakukan sebagai bentuk dari respon pemerintah terhadap kondisi perekonomian yang sedang dihadapi. Sri Mulyani meyakini bahwa dengan menerapkan kebijakan *countercyclical*, stimulus yang diberikan pemerintah bisa mendorong ekonomi meski berisiko defisit APBN yang semakin tinggi. Bila ekonomi menurun, penerimaan pajak lemah, maka pemerintah harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan defisit. Langkah pemerintah bila dilakukan dengan penghematan akan menyebabkan terjadinya *procyclical*. Hal ini sesuai dengan Fauzia (2020) yang menyatakan bahwa bila ekonomi lemah, dan pemerintah mengambil langkah untuk memotong semua belanja, akan mengakibatkan penurunan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian diwujudkan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sejalan dengan program PEN, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sugiri, 2020). Memberikan kemudahan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha melalui perizinan usaha berbasis risiko secara elektronik. Pelindungan dalam bentuk penyediaan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan usaha kecil, restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan dan bantuan bentuk lain (Sari dkk., 2017). Pemberdayaan UMKM melalui penyusunan basis data tunggal UMKM, penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik dengan kewajiban menyediakan tempat promosi dan pengembangan UMKM sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan tempat strategis lainnya, hak kekayaan intelektual, jaminan fasilitas kredit, Implementasi pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil, kewajiban pengalokasian anggaran instansi pemerintah dalam menggunakan produk barang/jasa usaha mikro dan koperasi alokasi

minimal 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa, memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan laporan keuangan mikro dan kecil, usaha besar harus bermitra dengan usaha mikro dan kecil, pemberian insentif pajak, pemerintah daerah memberikan bantuan modal kepada usaha mikro kecil dan koperasi dan yang terakhir pemerintah menyelenggarakan program inkubasi (Yuwannita & Ariani, 2016).

Strategi pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan program PEN, khususnya bagi para pelaku usaha berperan dalam peningkatan ekonomi, dilihat dari aspek peningkatan jumlah pelaku usaha UMKM. Data pada bulan Maret menunjukkan jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Keberadaan UMKM tersebut mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia (Kemenkop UKM, 2021).

Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari Program PEN yang diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang terus menunjukkan tren perbaikan. Hal ini sesuai dengan data dari Kemenko-Perekonomian (2021) yang menunjukkan perbaikan di awal Triwulan IV Tahun 2021. Aktivitas manufaktur telah kembali ke level ekspansif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga menunjukkan perbaikan yang signifikan hingga ke level optimis, yakni 118,5. Sejalan dengan konsistensi penurunan kasus harian Covid-19 yang diiringi dengan pelanggaran PPKM di berbagai daerah, dan diperkirakan akan kembali menguat di Triwulan IV-2021.

Tetapi di balik keberhasilan tersebut, (Saadah, 2019) mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi UMKM, yaitu pembiayaan, teknologi dan inovasi produk, riset pasar dan terakhir inefisiensi. Inefisiensi erat kaitannya dengan pengendalian internal perusahaan yang mencakup berbagai aspek (Arfah, 2011; Ariani, 2016; Wirawan dkk., 2021). Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Widiatmika, 2013; Mulyadi dalam Saadah, 2019). Kendala yang dihadapi oleh UMKM tersebut tentu saja tidak bisa diatasi bila hanya dengan memberikan bantuan modal. Sehingga pemerintah ke depannya diharapkan dapat membantu

meningkatkan pengetahuan para pelaku UKM, tidak saja dari segi teknis tetapi juga manajerial, untuk menekan inefisiensi. Peningkatan kapasitas UKM merupakan upaya, agar UKM dapat beradaptasi dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing, sehingga UMKM tersebut dapat berkembang, dan mampu mensejahterakan anggotanya (Herman, 2021). Capaian tersebut tentunya berperan dalam penguatan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

KEMANDIRIAN EKONOMI DAN KETAHANAN NASIONAL

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang sebagaimana kita ketahui bahwa hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberikan corak dan warna terhadap kehidupan perekonomian dari negara tersebut. Sistem perekonomian yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Didalamnya menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian nasional dengan asas kekeluargaan dengan tujuan utama yaitu kesejahteraan bangsa. Secara makro sistem perekonomian Indonesia dengan menggunakan terminologi nasional dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Era globalisasi menuntut negara untuk senantiasa mewaspadai dan tidak mungkin menutup diri dari perkembangan dan perubahan sistem ekonomi yang menglobal. Oleh karena itu, negara harus mampu mengintegrasikan ekonomi nasional dengan ekonomi global secara adaptif dan dinamis sehingga diperoleh hasil optimal bagi kepentingan nasional dan tujuan nasional.

Ketahanan Nasional dalam bidang ekonomi dapat tercermin dalam berbagai kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mana dalam bangsa tersebut dapat memelihara kemandirian ekonomi nasional. Kokohnya ketahanan ekonomi nasional pada suatu negara dapat dinilai dari kemampuan negara dalam memelihara stabilitas ekonomi yang baik dan dinamis serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebagaimana berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketahanan nasional dibidang ekonomi merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan banyak dimensi, diantaranya:

1. Stabilitas ekonomi;
2. Tingkat integritas ekonomi;
3. Ketahanan sistem ekonomi terhadap guncangan dari luar sistem ekonomi;
4. *Margin of safety* dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. Keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional;
6. Kemantapan ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional; dan
7. Tingkat integritas ekonomi nasional dengan ekonomi global.

(Sulisworo dkk., 2012) menyatakan bahwa salah satu sifat ketahanan nasional Indonesia adalah mandiri, artinya ketahanan nasional Indonesia percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, berdiri diatas identitas, integritas, dan kepribadian bangsa, kemandirian juga merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Ketika menerima *defile* di Banda Aceh pada tahun 1958, Presiden RI Soekarno menyampaikan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar bangsa Indonesia salah satunya harus memiliki ketahanan ekonomi. Hal tersebut seiring dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi yang terutama bersumber dari dalam negeri agar Indonesia mampu bertahan apabila terjadi guncangan lingkungan global, dijelaskan pula bahwa untuk dapat mandiri secara ekonomi, terdapat beberapa hal fundamental yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan, yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing, pendalaman jasa keuangan yang inklusif serta reformasi struktural sehingga tidak mudah terguncang oleh perubahan global yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu menjadi pemain utama dalam persaingan perdagangan global. (Humas Sekretariat Kabinet RI, 2019)

Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perwujudan dari upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis

nasional, Undang-Undang ini salah satunya diselenggarakan berdasarkan kemandirian bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan potensi dirinya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto juga menerangkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya reformasi struktural untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, mempermudah pembukaan usaha-usaha baru, meningkatkan investasi, serta mengatasi berbagai masalah tumpang tindih regulasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan sebagai salah satu upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi dalam jangka menengah-panjang (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021).

Undang-undang Cipta Kerja juga melibatkan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin berusaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya, penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan peran masyarakat, membantu penyusunan Amdal bagi usaha/kegiatan UMKM yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, pembinaan usaha perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perlindungan hutan, penyelenggaraan panas bumi, bidang ketenagalistrikan, dan sebagainya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut penelitian Tolosang (2018), pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Diperkuat dalam penelitian Karenina dkk (2021), dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah maka daerah tersebut tidak dapat melaksanakan otonomi daerah.

PENUTUP

UMKM sebagai perwujudan dari ekonomi kerakyatan di era digital memerlukan banyak perhatian dari pemerintah agar terjadi peningkatan literasi digital, selain itu infrastruktur jaringan internet dan regulasi yang lebih rinci mengenai ITE akan membantu keamanan pelaku usaha, hal ini juga harus diimbangi oleh peningkatan penggunaan produk dalam negeri agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia.

PUSTAKA RUJUKAN

- Amran, S. 2020. Implementasi Kebijakan Sistem *On Line* Dalam Pengembangan Koperasi Di Era Digitalisasi. *Bunga Rampai 2020 Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)*: 133-140.
- Arfah, 2011. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Investasi* 7(2): 137-153.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. *Berita Resmi Statistik* No. 86/11/Th. XXIII, 5 November 2020.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto Triwulan 3-2020. *Berita Resmi Statistik* No. 85/11/Th. XXIII, 5 November 2020.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. *Berita Resmi Statistik* No.86/11/Th. XXIII, 5 November 2020.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto Triwulan-3 2021. *Berita Resmi Statistik* No.83/11/Th. XXIV, 5 November 2021.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021. *Berita Resmi Statistik* No.84/11/Th. XXIV, 5 November 2021.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit). <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html> [diakses 17 Desember 2021]
- Guntur, E.M. 2009. Kube Sebagai Suatu Paradigma Alternatif Dalam Membangun Soko Guru Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Penerbit Sagung Seto. ISBN: 978-602-867-400-3. x+258.
- Herman. 2021. Jumlah UMKM *Go Digital* Naik 99% Selama Pandemi. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/835765/jumlah-umkm-go-digital-naik-99-selama-pandemi> [diakses 18 Desember 2021]
- Karenina, S., Andayani, K.D., Aditya, I.A., Wasil, M., 2021. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia* 2 (1): 27.
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan. 2020. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PP 23/2020). *Infografis*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf> [diakses 15 Desember 2021]
- [KemenKopUKM] Kementerian Koperasi dan UKM. Covid-19 Menjadi Momentum Transformasi Koperasi ke Ekonomi Digital. <https://kemenkopukm.go.id/read/pandemi-covid-19-menjadi-momentum-transformasi-koperasi-ke-ekonomi-digital> [diakses 19 Desember 2021]

- [KemenkoEkonomi] Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. 2021. Pertumbuhan Ekonomi ke Depan Masih Bergantung pada Pengendalian Pandemi dan Kesiapan Bertransformasi. *Siaran Pers* No. HM.4.6/472/SET.M.EKON.3/12/2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3536/pertumbuhan-ekonomi-ke-depan-masih-bergantung-pada-pengendalian-pandemi-dan-kesiapan-bertransformasi> [diakses 19 Desember 2021]
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021 <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3029/kemandirian-ekonomi-untuk-menjawab-tantangan-zaman-di-masa-pandemi>
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan. 2021. Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/> [diakses 19 Desember 2021]
- Khadijah, N. 2021. UMK Dapat Prioritas Tempat Usaha 30 Persen di Infrastruktur Publik, Simak Penjelasannya. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-011564661/umk-dapat-prioritas-tempat-usaha-30-persen-di-infrastruktur-publik-simak-penjelasannya> [diakses 18 Desember 2021]
- Librianty, A. 2021. Sri Mulyani Ungkap Momentum Penguatan Ekonomi Nasional. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4548813/sri-mulyani-ungkap-momentum-penguatan-ekonomi-nasional> [diakses 15 Desember 2021]
- Maharani, A.M. & Sulistyowati R., 2020. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dan Implikasinya pada Integritas UKM di Bojonegoro. *Jurnal SUBSTANSI* 4(2): 157-172.
- Meier, G.M. 1995. *Leading Issues in Economic Development*. ISBN: 978-019-507-180-1.
- Mulyana (2021). Menaker ingatkan tidak boleh ada potongan subsidi upah oleh bank. *Berita Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/2399217/menaker-ingatkan-tidak-boleh-ada-potongan-subsidi-upah-oleh-bank> [Diakses 21 April 2022]
- Niode, I.Y. 2009. Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Oikos-Nomos* 2(1): 1-10
- Nugraha, H. 2020. Membangun *Good Cooperative Governance* Untuk Perkoperasian di Indonesia. *Bunga Rampai 2020 Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)*. 27-36.
- Pantjoro, T.H. 2021. Pandemi Covid-19, Disrupsi Bonus Demografi dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. 9(2): 83-100.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional.

- Saadah, K. 2019. Efektivitas Penerapan Pengendalian *Intern* pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Bandung. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11(2): 141 – 156.
- Sari, M.D.R.M., Purnamawati, I.G.A., Prayudi, M.A., 2017. Pengaruh Penilaian Risiko, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Pengendalian, dan Pemantauan Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undhiksa* 8(2): 1-12.
- Sekretariat Kabinet RI , 2019 <https://setkab.go.id/perlu-kemandirian-ekonomi-menkeu-kalau-amerika-eropa-rrc-bersin-dunia-terkena-flu/>
- Sugiri, D. 2020. Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal STIE Putra Bangsa* 19(1): 76-86.
- Sukirno, S. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Penerbit Prenada Media Group. Jakarta. ISBN: 979-3925-37-X. xii+347.
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., Arif, D.B., 2012. Geostrategi Indonesia. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional.
- Suyono, E. 2018. Pentingnya Sistem Pengendalian Manajemen dalam Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 16(1): 64-83.
- Tim Koordinator PMO Sektor Transportasi dan Finance KPPIP, 2021. Pemulihan Ekonomi Nasional 2021: Penanggulangan Pandemi Dan Bangkitnya Ekonomi Masyarakat. <https://kppip.go.id/berita/pemulihan-ekonomi-nasional-2021-penanggulangan-pandemi-dan-bangkitnya-ekonomi-masyarakat/> [Diakses 21 April 2022]
- Todaro, M.P. 1998. Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Volume 1. Penerbit Erlangga. ISBN: 978-979-411-619-7.
- Tolosang K.D. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 18 (3): 82
- Velarosdela, R.N. 2021. Sri Mulyani: Jumlah Pengangguran Turun Jadi 9,1 Juta Jiwa. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all> [diakses 19 Desember 2021]
- Widiatmika, I.D.M.O., 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Komponen Pengendalian Intern pada Efektivitas Usaha Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 2(3): 559-578.
- Widiyati, S. & Listyani, T.T., 2016. Variabel Penentu Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam Rangka Peningkatan Kinerja. *Prosiding 1*: 629-638.

- Wirawan, S., Djajadikerta, H. & Setiawan, A., 2021. Penerapan Pengendalian Intern pada 13 UMKM di Bandung. *Jurnal Administrasi Bisnis* 10(1): 33-44.
- Yuwannita, A. & Ariani, N.E., 2016. Analisis Hubungan Pengendalian Internal Versi Coso Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan pada Baitul Qiradh Anggota Pusat Koperasi Syariah Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1(1): 199-209.

MEMBANGUN PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERKARAKTER

Ari Purnomo, S.T., M.Si.¹,

Nadia Talita Putri, S.IP.²,

Natalina Pakpahan, S.I.Kom.³

¹ Kepala Bagian Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta.

² Analis Persandian Kelompok Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta.

³ Analis Publikasi Kelompok Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta.



Komponen paling utama adalah masalah moral dari para stakeholder. Moral ini yang menjadikan pondasi utama untuk berjalannya sistem pendidikan nasional

Ari Purnomo, Nadia Talita Putri, & Natalina Pakpahan



PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan nasional, untuk itu kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan sehingga memberikan daya saing yang tinggi. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia unggul sebagai modal utama sistem ketahanan nasional yang tangguh, pendidikan memegang salah satu peranan yang penting. Dengan sistem pendidikan nasional yang baik dan benar tentunya akan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kondisi inilah yang akan mendukung terwujudnya strategi keamanan nasional yang kuat. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh sebagai modal utama ketahanan nasional yang tangguh, Bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam kendala dan permasalahan sama seperti negara-negara yang lainnya terutama pada bidang pendidikan. Dengan berbagai macam permasalahan pada bidang yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk membenahi sistem pendidikan nasional harus menjadi hal utama. Mengidentifikasi permasalahan dalam sistem pendidikan nasional merupakan langkah yang mendasar untuk segera di tangani secara komprehensif sehingga mendapatkan solusi terbaik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 pada pasal 31, konsekuensi dari mencerdaskan kehidupan bangsa berarti seluruh komponen bangsa bertanggung jawab untuk ikut dalam mewujudkannya. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak karena pada hakikatnya pendidikan dibutuhkan oleh setiap manusia supaya secara fungsional manusia memiliki kecerdasan baik kecerdasan *intelligence*, *spiritual* maupun emosional untuk menjalani kehidupannya dengan bertanggung jawab baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan akan berjalan dengan baik apabila pendidikan dapat peran secara proporsif, konstektual dan komprehensif. Berjalannya pendidikan tentunya dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan menuju ke arah sesuai dengan tujuannya. Untuk mencapai hal itu, tentu saja harus ditopang oleh perangkat pendidikan yang dibutuhkan seperti perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Pendidikan yang demikian akan mampu untuk menjawab segala permasalahan pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti perkembangan jaman yang selalu berubah.

PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah telah menuangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pengertian dari Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman. Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis. Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional meliputi:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

A. Regulasi Pendidikan yang Komprehensif

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum sepenuhnya mengakomodasikan dan menjawab berbagai dinamika pendidikan di masa kini. Dalam praktiknya terdapat beberapa regulasi yang parsial meskipun mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan pada akhir Bulan Maret 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur beberapa hal terkait dengan Pendidikan termasuk kurikulum, hanya saja materi tentang Pancasila tidak tertuang dalam mata pelajaran atau mata kuliah pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang diwajibkan dalam kurikulum tersebut. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi. Pada Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Tumpang tindihnya kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, kepemimpinan birokrasi pendidikan yang lemah dan belum adanya *blueprint* pendidikan nasional serta arah pendidikan merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pada Tahun 2017 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menilai masih banyak tumpang tindih kewenangan kebijakan pendidikan antara kementerian dan pemerintah Daerah. Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, kewenangan SMA/SMK dialihkan kepada Provinsi. Namun permasalahannya bukan terletak pada pengalihan kewenangan tersebut melainkan belum adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota belum tertata dengan baik. Fenomena yang terjadi adalah seluruh pembangunan sarana prasarana pendidikan dianggap menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, dalam hal sumber daya manusia dalam pendistribusian tenaga pengajar/guru lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Karier tenaga pengajar juga masih terdapat politisasi kepala sekolah dan guru oleh kepala daerah, belum adanya kejelasan pola karier sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, kurangnya pelatihan untuk peningkatan kemampuan guru dan tenaga administrasi pada dinas dan sekolah, sertifikasi sebatas peningkatan kompetensi prosedural yang belum substansial. Selain belum komprehensifnya dan lemahnya kepemimpinan

birokrasi pendidikan, sistem pendidikan nasional belum mengakar kepada falsafah budaya bangsa. Filosofi pendidikan yang berdasar kepada Pancasila belum benar-benar terintegrasi dalam mata pelajaran dan cenderung meniru kepada budaya-budaya barat. Bila kita melihat dengan cermat calon peminat Sekolah Tinggi, profesi yang dicari oleh lulusan Sekolah Menengah Atas jumlah fakultas yang disediakan oleh lembaga pendidikan di seluruh universitas di Indonesia tidak banyak pilihan dan menyediakan terkait dengan parameter kebutuhan pembangunan Nasional atau jurusan bidang bahasa, budaya, sastra serta pada bidang sesuai kultur daerah. Kondisi tersebut tentu sangat membahayakan terhadap kondisi kemajuan pendidikan dalam pembangunan Pendidikan Nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian jalur pendidikan pada Pasal 1 angka 7 wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, jalur pendidikan meliputi:

1. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
2. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; dan
3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Sedangkan pada pasal 1 angka 8, tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari:

1. Pendidikan Dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah dapat berbentuk: Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
2. Pendidikan Menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan bentuk lainnya yang sederajat; dan

3. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Menurut Pasal 1 angka 9 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan meliputi:

1. Pendidikan Umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu;
3. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
4. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
5. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana;
6. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama; dan
7. Pendidikan Khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah.

B. Rekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul sebagai modal dalam pembangunan Nasional dan ketahanan nasional yang tangguh, Indonesia mengalami beberapa permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Beberapa kajian internasional mengenai mutu pendidikan di Indonesia seperti *PISA (Programme For Science Assesment)*, *TIMMS (The Trends in Internasional Mathematics and Science study)*, *PIRLS (The Progress in Internasional Reading Literacy Study)* dan beberapa kajian lainnya menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kualitas sistem pendidikan yang tergolong rendah di dunia, secara khusus hasil survei *PIRLS* pada Tahun 1916, menempatkan posisi Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang di survei. Survei dilakukan oleh lembaga *The World's Most Literate Nations (WMLM)* yang diseponsori oleh *UNESCO*. Dari sekian banyak metode sistem pembelajaran yang ada, Indonesia belum menganut sistem (*HOTS) Higher Order Thinking Skills*, melainkan masih menggunakan metode *Lower-Medium Order Thinking Skills*. Literasi minat baca masyarakat di Indonesia masih sangat rendah seperti yang disampaikan oleh Bank Dunia melalui dokumen Indonesia *Economic Quarterly* pada Bulan Juni 2018 yang berjudul Pendidikan untuk Pertumbuhan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa peserta didik di Indonesia dianggap *functional illiterate* atau buta huruf secara fungsi. Hal ini ternyata sudah dibiarkan terjadi selama 20 tahun dengan anggaran pendidikan yang semakin meningkat. Dari kondisi yang demikian perlu adanya rekonstruksi sistem pendidikan nasional untuk mempercepat pembangunan sumber daya yang unggul.

Keterpurukan dunia pendidikan di Indonesia, tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang panjang ketika penjajah Belanda masuk ke Indonesia sampai 320 tahun lamanya. Di masa penjajahan Belanda masyarakat terbagi menjadi tiga bagian kelompok besar yang terdiri dari masyarakat biasa, masyarakat keraton dan masyarakat Timur asing. Penjajah Belanda memberikan peran dari tiga komunitas masyarakat tersebut secara diskriminatif. Masyarakat keraton dijadikan tangan kanan dalam bidang pemerintahan, masyarakat Timur asing dijadikan tangan kanan di pada bidang perekonomian dan masyarakat biasa mayoritas dijadikan tenaga kerja paksa untuk kepentingan ekonomi Belanda. Diskriminasi sosial pada masa penjajahan belanda juga terjadi pada bidang pendidikan. Untuk kalangan Bangsa Belanda disediakan sekolah terbaik, kemudian menyusul untuk

kalangan bangsawan dan Timur asing, sedangkan untuk rakyat biasa hanya tersedia sekolah seadanya (Toenlio, 2004). Pengalaman pahit ini terakumulasi dalam budaya bangsa sehingga menjadi salah satu faktor yang membentuk stratifikasi sosial yang tertutup. Bagi kelompok masyarakat yang marginal akan kesulitan untuk mendapatkan akses dibidang pendidikan karena kemampuan ekonomi yang terbatas. Akibatnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak semakin sulit. Dengan lahirnya Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap sebagai katalisator dalam bentuk pendidikan sebagai lahan untuk dunia perindustrian dan dunia usaha, tetapi pemerintah melakukan pendesentralisasian pendidikan pada tiap daerah. Kebijakan pendesentralisasian pendidikan tersebut dipandang sebagai melempar tanggung jawab pemerintah kepada daerah dan Perguruan Tinggi. Dalam menanggapi permasalahan ini diperlukan adanya keterlibatan semua elemen dalam sistem pendidikan nasional sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rekonstruksi sistem pendidikan nasional dimulai dengan komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem pendidikan Nasional dan bagaimana fungsi dari komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Regulasi pendidikan;
2. Pemerintah;
3. Tenaga pendidik/guru/dosen;
4. Peserta didik;
5. Lembaga pendidikan;
6. Lembaga pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Lembaga bidang Industri dan jasa;
8. Lembaga profesi; dan
9. Lembaga sosial kemasyarakatan.

Fungsi komponen-komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional tersebut sebagai berikut:

1. Regulasi Pemerintah. Regulasi Pemerintah ini digunakan sebagai payung hukum dalam mengatur sistematika pendidikan yang mengakomodasi aspirasi dari berbagai bidang dalam sistem pendidikan nasional;
2. Pemerintah. Pemerintah bertugas sebagai penyelenggara segala aspek dan dinamika dari Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan aturan-aturan yang dibutuhkan, melaksanakan pengawasan, menindak segala pelanggaran dengan adil dan tegas;
3. Tenaga Pendidik/guru/dosen/instruktur. Tenaga pendidik/guru/dosen bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertanggung jawab atas semua yang terkait dengan proses pendidikan;
4. Peserta Didik. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam memahami, mengamalkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang diterima dalam proses kegiatan belajar mengajar serta pembelajaran lainnya;
5. Lembaga Pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu supaya lebih baik melalui interaksi sosial dan lingkungan;
6. Lembaga pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wahana yang berperan dalam bidang riset yang terkait dengan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan;
7. Lembaga bidang Industri dan jasa. Lembaga bidang Industri dan jasa sebagai lembaga pengguna hasil dari lembaga pendidikan untuk menghasilkan berbagai macam komoditi pada bidang industri dan jasa bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta bangsa negara;
8. Lembaga profesi. Lembaga profesi adalah wadah bagi para pekerja profesi guna mengembangkan lebih dalam pada bidang profesinya yang geluti; dan
9. Lembaga sosial kemasyarakatan. Lembaga sosial kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah yang berperan sebagai penyeimbang sistem pendidikan nasional.

Dari semua komponen pendidikan di atas masing-masing mempunyai peran yang berkesinambungan. Pemerintah dan regulasinya mempunyai peran yang sangat penting tetapi peran pemerintah tidak saja sebagai pembuat Undang-Undang sistem pendidikan nasional saja tetapi harus pula menyediakan peraturan turunan untuk menindaklanjuti dari Undang-Undang Sistem pendidikan nasional sehingga terjalin hubungan antara lembaga pendidikan dengan lembaga-lembaga yang lainnya siklus hasil didik sebagai sumber daya manusia dapat tersalurkan dengan baik. Selain itu, sarana prasarana pendidikan juga harus dilengkapi dengan baik. Fasilitas berupa laboratorium, perpustakaan, akses informasi berupa jaringan internet juga harus terpenuhi, tenaga pendidik yang tersertifikasi juga mempunyai andil yang sangat besar dalam proses belajar mengajar.

Gambaran lain yang memberikan dampak buruk terkait dengan pendidikan nasional adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah sehingga banyak terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran pendidikan yang tidak terselenggara dengan baik sehingga dibutuhkan komponen lembaga sosial kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang dalam turut serta mengawasi kegiatan belajar mengajar pada lembaga pendidikan. Hadirnya lembaga sosial kemasyarakatan sebagai anggota dewan sekolah ataupun anggota dewan perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari semua komponen di atas hal yang paling utama adalah masalah moral dari para *stakeholder*. Moral ini yang menjadikan pondasi utama untuk berjalannya sistem pendidikan nasional.

C. Tata Kelola Sistem Pendidikan Nasional

Tata kelola pendidikan merupakan suatu proses dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian pendidikan agar tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tujuan tata kelola sistem pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan khususnya peningkatan mutu pembelajaran di samping akses pendidikan. Pendidikan yang bermutu sangat penting agar peserta didik dapat melaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber Daya manusia sangat berpengaruh dalam tata kelola pendidikan. Pada tingkat satuan pendidikan peran sumber daya manusia sangat menentukan mutu pendidikan. Tata kelola yang baik dapat menghasilkan produk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan kapasitas yang baik dalam pengelola pendidikan. Selain pengorganisasian kemampuan tenaga pengajar

juga perlu ditingkatkan. Keefektifan cara mengajar akan berimplikasi pada optimal atau tidaknya terhadap daya serap peserta didik, bila ini tidak ada evaluasi yang baik maka akan terjadi kualitas hasil peserta didik akan cenderung rendah. Perlu adanya peningkatan kemampuan tenaga pendidik seperti melanjutkan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), optimalisasi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan tenaga Kependidikan (L4TK) dan lain sebagainya.

Infrastruktur pendidikan masih perlu adanya evaluasi. Infrastruktur yang belum memadai menjadi akar permasalahan yang serius untuk masa depan pendidikan nasional. Akibat yang ditimbulkan dari belum memadainya infrastruktur pendidikan adalah para tenaga pendidik dan peserta didik tidak dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik sehingga kualitas peserta didik cenderung tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah perlu untuk mendukung secara penuh agar sekolah dapat memenuhi standar terkait sarana prasarana infrastruktur sekolah. Terkait dengan kurikulum, sistem pendidikan di Indonesia masih menggunakan kurikulum yang tidak cukup praktis dan operasional yang diterjemahkan oleh tenaga pengajar ke dalam materi pembelajaran dan aktivitas di ruang kelas. Kurikulum yang belum fleksibel dan berbasis bahan ajar menjadi akar permasalahan yang belum tertangani secara tepat. Hal ini menyebabkan para peserta didik belum dapat memahami materi pelajaran secara mendalam dan tidak dapat mengimplementasikan dengan baik sehingga kualitas peserta didik menjadi cenderung rendah dan belum berkompoten. Dengan demikian perlu adanya penyederhanaan kurikulum sehingga pendalaman terhadap materi bahan ajar lebih mendalam sesuai dengan yang diinginkan. Selain kurikulum yang kaku, kurikulum alam sistem pendidikan nasional belum menyesuaikan dengan potensi daerah. Penyeragaman kurikulum di seluruh sekolah di Indonesia belum seimbang. Penyeragaman tersebut memiliki implikasi pada besarnya ketimpangan hasil pembelajaran antara di Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Implikasi ini cenderung membuat kualitas hasil didik di luar Pulau Jawa selalu menjadi yang terbelakang.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNGGUL DAN BERKARAKTER

Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Melanjutkan mimpi para pendiri bangsa terdahulu, Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinannya memberikan perhatian besar terhadap penguatan karakter bangsa. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada tanggal 6 September 2017, Presiden memiliki cita-cita menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu sejajar dengan negara maju lainnya. Salah satu upaya membangun bangsa yang besar itu adalah dengan membekali generasi muda dengan karakter kuat.

A. Membentuk Sumber daya Manusia yang Berkarakter dan Cinta Tanah Air

Secara demografi, Bangsa Indonesia berada pada urutan keempat untuk angka jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menyikapi hal ini tentu bangsa Indonesia membutuhkan generasi unggul yang dapat memajukan dan menaikkan derajat bangsa. Salah satu upaya untuk menghasilkan generasi yang unggul adalah dengan adanya pendidikan berkarakter. Di samping itu, Bangsa Indonesia telah mencetuskan 5 pilar pemersatu bangsa yaitu Pancasila yang hendaknya dipahami oleh seluruh generasi penerus bangsa melalui pendidikan di sekolah. Dikutip dari laporan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam Buku Arah Kompetensi General Indonesia Menuju 2045 Cetakan I tahun 2020, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 319 juta jiwa pada 2045. Dari jumlah tersebut, 223 juta jiwa atau sekitar 70% penduduk Indonesia masuk dalam kelas pendapatan menengah. Tingkat harapan hidup penduduk Indonesia pada 2045 akan meningkat menjadi 76 tahun dan sekitar 73% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Selanjutnya tingkat kecerdasan bangsa juga akan meningkat pula. Jumlah mahasiswa di bidang *science*, *technology*, *engineering* dan *mathematics* mencapai 9,4 juta orang dengan jumlah lulusan

sebesar 2,8 juta. Membangun karakter merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter sangat penting dalam upaya membangun kualitas individu para calon generasi bangsa. Pendidikan karakter akan menjadi jawaban atas dinamika perubahan masa depan sekaligus memberi bekal keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Karakter yang kuat membentuk individu menjadi pelaku perubahan bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian generasi penerus bangsa. Sebagaimana Thomas Lickona (1991) menyebutkan bahwa pendidikan karakter sangat terkait dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Jika ketiga hal ini diimplementasikan lebih jauh, maka nilai-nilai karakter dapat diwujudkan melalui sikap antara lain: cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, hormat, santun, kasih sayang, peduli, kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, keadilan, baik dan rendah hati, toleran, cinta damai, dan persatuan. Dimensi-dimensi yang termasuk dalam *moral knowing* yang akan mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*). *Moral feeling* merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri (*Conscience*), percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*empathy*), kerendahan hati (*humility*), cinta kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*). Nilai-nilai inilah yang menjadi identitas Generasi 2045. Generasi 2045 merupakan generasi yang jauh dari perilaku amoral, destruktif, anarkis, dan korup, serta sangat dekat dengan perilaku cerdas spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Dengan demikian untuk mewujudkan tercapainya Generasi 2045 ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 telah menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara garis besar, berbagai kompetensi pendidikan menuju Generasi 2045 yang diajukan menurut BSNP dalam buku AK-2020 yaitu meliputi: Kompetensi Dasar serta Kompetensi Holistik Terintegrasi. Kompetensi dasar merupakan kemampuan mendasar yang dimiliki oleh seorang manusia untuk menopang kehidupannya. Kompetensi dasar akan berkembang melalui usaha dan proses belajar, yakni belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk mengerjakan (*learning to do*), belajar untuk menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan untuk hidup bersama (*learning to live together*). Untuk dapat belajar, seseorang harus menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat menguasainya. Oleh karena itu, diperlukan lima kompetensi untuk mendukung kompetensi dasar yakni (1) kompetensi keberagamaan (*religiosity*), (2) kompetensi kewarganegaraan (*citizenship competence*), (3) literasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), (4) kompetensi digital serta (5) kompetensi belajar untuk belajar.

- Kompetensi keberagamaan adalah kemampuan mendasar yang erat kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk melakukan atau mendemonstrasikan sesuatu yang tidak hanya mengandalkan usaha diri, namun juga mengandalkan kepada kekuasaan dan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan menjalankan ajaran agama yang di anut.
- Kompetensi kewarganegaraan menyandang seperangkat pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan sebagai manusia yang dapat memberikan kecakapan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kompetensi ini berperan penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan bangsa (*national sovereignty*). Kompetensi kewarganegaraan, juga sangat penting nilainya bagi pembentukan generasi Indonesia yang memahami identitasnya sebagai warga negara Indonesia di tengah percaturan nilai-nilai masyarakat global.

- Kompetisi keilmuan pada abad 21 tidak lepas dari literasi data dan STEMAL (*Science, Technology, Engineering, Mathematics, Art, Language*). Kompetisi ini menyangkut kemampuan individu untuk dapat membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi (*big data*) dunia digital dengan mengembangkan literasi sains melalui penemuan fakta dan teori sains alami maupun sains sosial; literasi teknologi dengan kemampuan mengembangkan dan menemukan terobosan kreatif aplikasi pemrograman dan digital; literasi rekayasa dengan mengembangkan mesin-mesin kreatif yang dapat mempermudah pekerjaan manusia terlebih di Era Revolusi Industri keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global; selanjutnya literasi seni kemampuan mengapresiasi dan mengembangkan serta mengaktualisasi seni sebagai ciri khas seni budaya bangsa serta literasi Bahasa dengan menguasai Bahasa internasional sebagai saran komunikasi global.
- Kebutuhan kompetensi digital merupakan hal yang tidak terelakkan dan lebih komprehensif dibandingkan keterampilan digital. Kompetensi digital merupakan keterampilan menggunakan teknologi digital secara kritis, kreatif, kolaboratif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Kompetensi ini juga terkait dengan kompetensi komunikasi dan berkolaborasi dalam penggunaan teknologi digital. Selanjutnya seseorang yang memiliki kompetensi digital dapat mengembangkan dan melakukan elaborasi konten digital. Hal lain yang terpenting adalah kemampuan terkait etika, keamanan data dan informasi digital. Sehingga pada akhirnya tidak hanya dapat menggunakan teknologi, namun juga keterampilan dalam berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, tanpa mengabaikan etika dalam penggunaan teknologi sebagai warga digital yang bertanggung jawab.
- Kompetisi Belajar untuk belajar merupakan kemampuan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya yang ditandai dengan semangat atau kemauan belajar untuk belajar serta kemauan belajar kembali dengan melepaskan pembelajaran lampau (*to unlearn*) untuk dapat belajar kembali agar kebutuhan dasar manusia sebagai manusia dapat terpenuhi. Belajar untuk mengetahui diperlukan dalam rangka menguasai ilmu

pengetahuan (*knowledge*). Belajar berbuat diperlukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didasari dengan sikap (*attitude*). Belajar untuk menjadi diri sendiri dan belajar untuk hidup bersama memerlukan keyakinan nilai-nilai (*values*) yang tidak dapat lepas dari keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Kompetensi holistik terintegrasi terdiri dari: (1) kompetensi untuk hidup (biologis); (2) kompetensi untuk kehidupan (sosial, budaya, dan alam); dan (3) kompetensi untuk penghidupan (ekonomi). Kompetensi-kompetensi inilah selanjutnya menjadi acuan dalam strategi transformasi pendidikan. Arah kompetensi generasi Indonesia menuju 2045 mengarah pada terbangunnya kesatuan antara kompetensi dasar dan kompetensi holistik terintegrasi. Arah kompetensi tersebut, merupakan respons perkembangan geopolitik dan geostrategis baik secara regional maupun internasional, dan juga respon terhadap berbagai tantangan bangsa yang tidak ringan dan kompleks. Perkembangan dan dinamika perubahan menghadirkan berbagai isu seperti ketahanan pangan dan keamanan energi, bonus demografi, perubahan ekonomi regional dan internasional, kondisi geografis, perkembangan teknologi dan inovasi, serta dinamika sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu tantangan dalam revolusi teknologi, kualitas pendidikan, populasi dan sumber daya manusia, sosial, politik, ekonomi dan budaya, ekologi, kesehatan, bencana, religiusitas, kesetaraan dan kesadaran gender, kepekaan budaya, menjadi bagian penting yang dianalisis dalam buku ini. Isu-isu tersebut berkembang seiring dengan kompetisi antar bangsa yang semakin ketat dan sengit. Agar bisa memenangkan kompetisi itu Indonesia menjaga keberadaan dan keutuhannya dalam bingkai ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam mengantisipasi pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang akan menjalani kehidupan di masa yang akan datang, terutama arah kompetensi 2045 dan selanjutnya, diperlukan suatu model kurikulum yang lebih sesuai.

B. Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Siap Pakai

Pembinaan kurikulum merupakan upaya atau usaha yang dilakukan agar kurikulum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembinaan kurikulum seyogyanya dilakukan dari tingkat pusat ke tingkat Dinas Provinsi, dilanjutkan ke tingkat dinas kabupaten, berlanjut ke Dinas Kota dan berakhir di tingkat sekolah. Pembinaan kurikulum menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi proses pendidikan pada suatu negara.

Adapun cakupan pembinaan kurikulum yang dilaksanakan dalam pendidikan nasional meliputi:

1. Pendidikan Kurikulum Struktural.

Pembinaan kurikulum struktural dilaksanakan secara bertahap mulai dari pembinaan kurikulum tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, satuan pendidikan. Hal ini perlu dilakukan untuk penyamaan arah dan tujuan terkait dengan materi pendidikan secara nasional.

2. Pembinaan Kurikulum secara fungsional.

Pembinaan kurikulum secara fungsional yang tahapannya dilakukan oleh lembaga dan/atau orang yang berfungsi untuk membina dalam pembinaan dan pengimplementasian kurikulum yang tentunya berbidang kurikulum. Adapun pembinaan kurikulum diberikan oleh Lembaga Penjamin Mutu pendidikan (LPMP) kepada guru-guru dalam bentuk:

- a) Kelompok kerja Guru;
- b) Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
- c) Kelompok Kerja Kepada Sekolah; dan
- d) Kelompok Kerja Pengawas sekolah.

3. Pembinaan Kurikulum Kolegial

Pembinaan kurikulum secara kolegial dilaksanakan pada pembinaan profesi. Pembinaan ini dilakukan antar mereka yang seprofesi yang setra dan berlangsung secara terus menerus (kolegial). Dalam pendidikan, interaksi tersebut dapat terjadi pada Pusat Kegiatan Guru, kelompok guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah. Pembinaan kurikulum ini dapat pula dilakukan oleh guru kepada guru.

4. Pembinaan Kurikulum oleh atasan/Pimpinan

Pembinaan kurikulum dilakukan dari atasan kepada bawahannya. Pimpinan harus selalu memberikan arahan kepada bawahannya dengan maksud untuk melihat apakah yang dilakukan bawahannya sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum, agar tujuan yang akan dicapai dapat berjalan sebagai mana mestinya. Pembinaan kurikulum dilakukan dari tingkat pusat berlanjut ke Dinas provinsi, ke Dinas Kabupaten dan berakhir pada sekolah-sekolah.

Merujuk pada pendapat Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memfasilitasi kemandirian peserta didik. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara melatih dan membiasakan peserta didik untuk berpikir merdeka, dapat mengatur diri sendiri serta tidak bergantung kepada orang lain. Melalui proses semacam ini diharapkan dapat menghasilkan individu yang matang, yaitu pribadi yang dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Dengan pemikiran tersebut, maka model kurikulum yang digunakan adalah Model Kurikulum Elektik atau *Eclectic Curriculum Model* yang merupakan rangkuman aplikasi konsep kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum teknologi, dan kurikulum akademi sesuai dengan kepentingannya. Pada model kurikulum yang diajukan ini, konsep dasar yang digunakan untuk membangun model kurikulum adalah Kurikulum Akademis yang menerapkan Kurikulum Inti (*Core Curriculum*) dengan menyediakan paket-paket pilihan (*Elective Package*). Dalam penyediaan paket pilihan ini, baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya menerapkan konsep kurikulum humanistik dalam arti memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan potensi-potensi yang dimiliki. Dengan demikian kurikulum ini selain menyediakan paket kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik, yaitu kurikulum inti yang pada hakikatnya merupakan kurikulum pendidikan umum, juga disediakan kurikulum yang berorientasi pada peserta didik, yang merupakan penerapan kurikulum humanistik, melalui penyediaan paket pilihan. Bahan-bahan ajar dan aktivitas mempelajari paket pilihan dapat dipilih selain dari berbagai sumber yang mengacu kepada berbagai disiplin ilmu, juga dapat dipilih dari bahan ajar yang bersumber dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Maksud utama dari pilihan bahan-bahan ajar yang bersumber dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah agar peserta didik memahami dan mampu mencari solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat itu dalam kerangka melakukan rekonstruksi sosial. Dalam implementasinya pun dilakukan proses dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*), yang permasalahan yang menjadi bahan untuk dipelajari didasarkan atas hasil analisis kebutuhan, yang pada dasarnya merupakan aplikasi konsep dari kurikulum rekonstruksi sosial. Jika dilihat dari ranah pendidikan untuk kebijakan yang diambil untuk Indonesia Emas 2045 secara dasar kebijakan perubahan kurikulum 2013, elemen-elemen perubahan, dan implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perubahan

kurikulum 2013 didasarkan pada tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam rangka menyiapkan generasi yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Kebijakan kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Strategi yang perlu digunakan di bidang pendidikan adalah harus mampu mendongkrak kualitas guru dan siswa atau pelajar dan tenaga didik. Artinya yang berperan utama adalah seorang pendidik yang merupakan pejuang awal sebelum siswa kelak menjadi kader penerus yang lebih berkualitas lagi. Dan dunia pendidikan pada tahun 2045 akan lebih melonjak positif. Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang berat yang berdampak terhadap kualitas pendidikan. *Organisation for Economic Cooperation and Development* menunjukkan hasil penilaian literasi yang rendah, partisipasi pendidikan, pendidikan dan pekerjaan, guru merupakan salah satu indikator dalam pencapaian kualitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan salah satunya adalah kualitas guru. Kualitas guru yang tidak hanya terbatas pada nilai UKG yang seringkali menjadi acuan analisis data, namun data lain menunjukkan permasalahan kualifikasi dan kompetensi guru, seperti ketidakcocokan antara kualifikasi dan mata pelajaran yang diampu, kesejahteraan guru, serta pengembangan profesionalisme guru secara berkesinambungan. Berkaitan dengan pendidikan karakter, peran guru merupakan kunci utama karena mereka adalah aktor utama sebagai *agent of change*. Pelaku perubahan agar menghasilkan manusia Indonesia yang religius, cerdas, produktif, andal dan komprehensif melalui layanan pembelajaran yang prima terhadap peserta didiknya, sehingga terwujud generasi emas tahun 2045. Pendidikan karakter menurut Ki Hadjar Dewantara dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara menggunakan “*sistem among*” sebagai perwujudan konsepsi menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem *among*, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap: *Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa* dan *Tut wuri handayani* yang artinya;

1. Pertama, *Ing Ngarsa Sung Tuladha* artinya seorang pendidik selalu berada di depan untuk memberi teladan. Ia adalah pemimpin yang memberi contoh dalam perkataan dan perbuatannya sehingga pantas diteladani oleh para muridnya;
2. Kedua, *Ing Madya Mangun Karsa* artinya seorang pendidik selalu di tengah-tengah para muridnya dan terus menerus memprakarsai atau

memotivasi peserta didiknya untuk berkarya, membangun niat, semangat, dan menumbuhkan ide-ide agar peserta didiknya produktif dalam berkarya;

3. Ketiga, *Tut Wuri Handayani* artinya seorang pendidik selalu mendukung dan menopang (mendorong) para muridnya berkarya ke arah yang benar bagi hidup masyarakat. Pendidik mengikuti para muridnya dari belakang, memberi kemerdekaan bergerak dan mempengaruhi mereka dengan kekuatannya, kalau perlu dengan paksaan dan ketegasan apabila kebebasan yang diberikan kepada para murid itu di pergunakannya untuk menyeleweng dan akan membahayakan hidupnya (Bartolomeus Samho, 2013). Menjadi hal utama pendidikan karakter di sekolah adalah keberadaan guru sebagai “*Role Model*” atau teladan peserta didik, guru bukan hanya sekadar mengajarkan mata pelajaran, seyogyanya guru harus berinovasi, berkarakter dan berkepribadian dalam mendidik siswa. Guru akan menjadi model individu yang berkarakter dan dapat diamati oleh peserta didik secara langsung, maka peserta didik akan cenderung lebih mudah menirukan kepribadian guru yang berkarakter tanpa paksaan, maka dengan meniru tersebut secara berkelanjutan kepribadian peserta didik akan terbentuk menjadi kepribadian berkarakter seperti yang dicontohkan oleh gurunya. Guru 2045 diharapkan memiliki keterampilan menggunakan teknologi dan beradaptasi dengan perkembangan. Guru memiliki keterampilan dalam berinteraksi sosial pada lingkungan multikultural dan mengembangkan *networking* dalam berbagai situasi. Selanjutnya dalam konteks perubahan dan interaksi dengan lingkungan, guru memiliki identitas budaya dan estetika dalam pengembangan kompetensinya. Kompetensi guru ini merupakan kompetensi yang utuh menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena guru merupakan *role model* dalam masyarakat. Kehadiran guru masa depan tetap tidak dapat digantikan dengan teknologi, khususnya dalam pendidikan nilai dan karakter, serta proses pendidikan yang menyentuh hati peserta didik. Dalam spirit Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus diselenggarakan sebagai “Taman yang Menggairahkan”, sebagai “Taman yang Menumbuhkan”, serta sebagai “Taman yang Menguatkan”. Di dalam “Taman Pendidikan”, semua peserta pendidikan merasa aman dan nyaman, karena tidak ada kasta yang berupa jenjang kepintaran (*ranking*), semua peserta pendidikan merasa memiliki tempat dan dihargai keunikan serta pendiriannya dalam taman pendidikan. Dalam taman seperti itulah maka manusia tumbuh dan

ditumbuhkan menjadi manusia yang beradab. Di atas landasan konsep “Taman” yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara (1994) serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk generasi millennial dan prediksi peradaban 2045 yang mencakup: (1) sistem pendidikan yang fleksibel, (2) sistem pendidikan yang terbuka (adaptif), (3) sistem pendidikan integratif (formal & non-formal), (4) sistem pendidikan terkoneksi (orang tua dan masyarakat), dan (5) sistem pendidikan berlandaskan kesetaraan dan inklusivitas. Pada akhirnya Generasi Indonesia menuju 2045 diharapkan menjadi generasi Indonesia unggul, bermartabat, mampu menguasai dan memanfaatkan perkembangan sains dan teknologi untuk melejitkan kemajuan bangsa di berbagai bidang, bahkan mampu berkreasi dan berinovasi untuk memajukan bangsa, sekaligus, generasi yang memiliki karakter keindonesiaan dan komitmen yang tinggi terhadap ideologi dan nilai-nilai Pancasila. Generasi Indonesia menuju 2045 merupakan generasi terdidik yang memiliki segenap kompetensi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman dan mampu melejitkan daya saing bangsa. Generasi Indonesia menuju 2045 merupakan generasi yang kehadirannya dipacu oleh tuntutan kreativitas dan inovasi sehingga mampu tampil sebagai generasi yang produktif dan mumpuni. Oleh karena itu seluruh pemangku kebijakan pemerintahan harus mempunyai kemauan yang kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai bidang pembangunan yang utama dan terpenting dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang memiliki daya saing unggul di tengah-tengah negara di dunia. Keunggulan daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia akan berpengaruh langsung terhadap keunggulan di bidang ekonomi, teknologi, dan industri, sehingga dengan hal tersebut diharapkan menjadikan sumber Daya manusia generasi muda Indonesia menjadi generasi yang siap pakai.

MEWUJUDKAN GENERASI PENERUS YANG UNGGUL DALAM MENYONGSONG INDONESIA EMAS

Pada bab pendahuluan telah dipaparkan bahwa SDM menjadi faktor paling berpengaruh dan krusial dalam membangun negara bangsa, pasalnya negara akan maju apabila ditunjang dengan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan berdaya sanding, yang selanjutnya akan disebut dengan SDM unggul (Maltha, 2014). Seperti yang diketahui, untuk menciptakan SDM unggul tidak hanya sebatas memerlukan *transfer of knowledge*, namun lebih luas lagi yakni bagaimana cara membentuk karakter dan watak SDM

menjadi lebih baik melalui *transfer of value* secara seimbang. Sejalan dengan pemikiran Dr. Khairan Muhammad Arif, M.A., M.Ed. (Arif, 2021) bahwa pembangunan SDM tidak dapat dipisahkan dari pembangunan karakter SDM itu sendiri. Pasalnya SDM unggul dibangun oleh proses dan *output* dari karakter-karakter unggul yang terbagi menjadi tiga jenis, yakni (1) karakter religius, melalui penguatan spiritual, keimanan, dan ketakwaan, (2) karakter moral, melalui penguatan akhlak, pembiasaan/latihan budi pekerti, sikap, dan perilaku sehari-hari, baik dengan pendekatan agama, budaya, maupun lingkungan, serta (3) karakter kinerja, yang merupakan implementasi dari nilai-nilai, pengetahuan, dan budaya kerja yang ada. Bahkan menurut Tripathy (2010) dalam artikelnya yang berjudul “*When going gets Tough, the Soft gets going*”, karakter atau *soft skill* memberikan perbedaan yang begitu signifikan dalam hal produktivitas tenaga kerja, komitmen, dan kepuasan serta efektivitas organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya Tripathy (2010) juga mengungkapkan bahwa memiliki *hard skill* memungkinkan seseorang mencapai kesuksesan, namun *soft skill* yang mampu membuatnya bertahan.

Dewasa ini, pendidikan di Indonesia secara umum lebih menekankan kepada pengetahuan teknis atau *hard skill* saja, dan kurang memberikan perhatian kepada keterampilan yang bersifat *soft skills*. Wijaya (2019) mengemukakan bahwa hal ini disinyalir menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas lulusan yang mampu berkompetisi dan berdaya saing. Oleh karenanya, penting untuk membangun kemampuan peserta didik dalam hal mengelola emosi, menghadapi stres, berkomunikasi, memiliki integrasi, toleransi dan hal lainnya yang merupakan atribut dari *soft skills*. Menurut Illah Sailah dalam Wijaya (2019) *soft skills* dapat dipilah menjadi dua bagian, yakni *intrapersonal skills* yang membuat seseorang dapat ‘mengatur’ dirinya sendiri dan *interpersonal skills* yang diperlukan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Hal ini perlu untuk digalakan untuk menciptakan generasi unggul dalam menyongsong Indonesia emas sebagai visi pembangunan Indonesia pada tahun 2045.

Visi pembangunan Indonesia pada tahun 2045 berdasarkan paparan yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, adalah menjadikan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan ekonomi terbesar dunia, di mana ekonomi modern dengan tingkat kesejahteraan berkualitas dan PDB

per kapita mencapai USD 23.199 menjadi target utama. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia diharapkan untuk meningkatkan kualitas di sektor industri yang memberikan kontribusi terhadap PDB 26%, sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDB 7%, dan sektor pariwisata dengan penyumbang devisa terbesar. Menurutnya hal ini dapat dilakukan apabila Indonesia mampu: (1) memanfaatkan revolusi industri 4.0 sesuai dengan karakteristik masing-masing industri untuk peningkatan efisiensi, (2) meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kemajuan teknologi untuk mempercepat pembangunan ekonomi, serta (3) perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi yang berpengaruh pada struktur tenaga kerja. Visi Pembangunan Indonesia Emas pada tahun 2045 ini tentu dapat dicapai dengan menuntut kualitas SDM, produktivitas, serta penguasaan Iptek yang tinggi.

Dalam meningkatkan kualitas SDM, produktivitas, serta penguasaan Iptek yang tinggi memerlukan konsep pembangunan manusia yang berdasarkan pada tiga pilar pembangunan, yakni (1) layanan dasar dan perlindungan sosial, (2) produktivitas, serta (3) pembangunan karakter yang didukung dengan pertumbuhan penduduk seimbang. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; kualitas anak, perempuan, dan pemuda; serta tata kelola kependudukan. Kemudian pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi; pendidikan tinggi; penguatan Iptek-Inovasi; serta peningkatan prestasi olahraga. Sedangkan pilar pembangunan karakter mencakup pendidikan agama dan karakter; pemahaman dan pengamalan agama; pendidikan kewargaan; serta penguatan keluarga (Bappenas, 2019; Kemdikbud, 2021).

A. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dinamis

Manajemen Sumber Daya manusia merupakan pengembangan SDM yang berfungsi melakukan perencanaan SDM, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karier karyawan serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional pada sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya tidak ada organisasi atau perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM, karena bagian dari manajemen SDM itulah yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai kebutuhan organisasi atau perusahaan

terkait dengan kebutuhan SDM, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Dalam menjalankan kegiatannya, baik di organisasi ataupun di perusahaan, dibutuhkan SDM yang kompeten dibidangnya masing-masing dalam menjalankan SDM dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Demikian pula dengan suatu negara, yang diilustrasikan seperti dalam perusahaan, di mana manajemen terkait SDM sangat perlu untuk memetakan SDM yang dibutuhkan untuk membangun suatu negara besar dari berbagai sektor bidang, sehingga semua sektor harus turut serta dalam perumusannya. Dikatakan oleh Zainal (2005) adanya manajemen SDM sangat penting bagi perusahaan dalam pengelolaan, mengatur, mengurus, dan menggunakan SDM sehingga secara efektif, produktif serta efisien mencapai tujuan perusahaan. Anthony, Kacmar & Parrewe (2002) mengatakan bahwa manajemen SDM memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi dan memelihara karyawan perusahaan. Dari hal tersebut, maka manajemen SDM adalah pendekatan strategik serta berhubungan untuk mengelola aset yang paling berharga milik perusahaan atau organisasi yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan atau organisasi baik secara individu maupun dengan tim dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi dari perusahaan atau organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam menghasilkan barang/jasa tersebut dibutuhkan SDM yang terbagi menjadi tiga yaitu tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) yang memerlukan pendidikan tinggi, tenaga kerja terlatih (*trained labour*) yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu, dan tenaga kerja tidak terdidik (*unskilled labour*) yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan khusus. Dipandang perlu untuk melaksanakan manajemen SDM terhadap SDM yang dimiliki Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045.

Indonesia memiliki potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, pembangunan SDM menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia bila mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia dan *Business World*, di mana pada tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157

negara dan *Business World* mengungkapkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada di peringkat 45 dari 63 negara (Sugiarto, 2019). Berdasarkan data Bappenas (2019) lapangan kerja di Indonesia juga masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah sebesar 58,77% atau setara dengan 72,88 juta orang. Padahal pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas angkatan kerja yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pendapatan serta produktivitas kerja (Nihayang & Kusumanto, 2010).

Kehadiran globalisasi juga memberikan implikasi positif dan negatif secara bersamaan terutama pada tingginya persaingan SDM yang mengharuskan mereka untuk menjadi generasi *digital native*. Mereka yang tidak dapat mengejar dinamika perubahan zaman yang begitu cepat akan mengalami ketertinggalan. Bangsa Indonesia yang berada pada periode Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membutuhkan SDM yang mampu berdaya saing dan berdaya sanding tinggi agar dapat memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, agar mampu *survive* menjadi SDM unggul siap pakai di era informasi ini, para angkatan kerja bahkan para tenaga kerja dituntut untuk memiliki keterampilan berikut: (1) kemampuan berpikir kritis dan kemauan bekerja keras, (2) kreativitas, (3) kolaborasi, (4) pemahaman antar budaya, (5) komunikasi, (6) mampu mengoperasikan komputer, serta (7) kemampuan belajar secara mandiri (Cintamulya, 2015).

Selain ketujuh keterampilan tersebut, menurut Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas (2019), di masa depan para angkatan kerja membutuhkan setidaknya 10 (sepuluh) *soft skill* seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, manajemen SDM, kemampuan berkoordinasi, kemampuan emosional, pengambilan keputusan, *service orientation*, negosiasi, dan *cognitive flexibility*.

Dunia pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yakni: (1) kurangnya relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, (2) rendahnya daya serap lulusan oleh industri, (3) ketidaksesuaian program kompetensi keahlian yang dikembangkan dengan kebutuhan industri, (4) kurangnya pemahaman visi misi dan tujuan pendidikan vokasi antara praktisi di industri, (5) kesenjangan infrastruktur pembelajaran dengan kebutuhan industri, (6) tidak adanya struktur standarisasi karier perkembangan industri, dan (7) iklim akademik yang kurang kondusif dalam pendidikan kejuruan

(Dardiri, 2016). Oleh karena itu, pentingnya upaya lembaga pendidikan sebagai pabrik atau industri komoditas ilmiah yang paling diandalkan dan peran pemerintah untuk menanganinya.

Dr. Khairan Muhammad Arif, M.A., M.Ed. (2021) dalam artikel ilmiahnya menawarkan 5 (lima) strategi lembaga pendidikan untuk membangun SDM unggul yang berkarakter di tengah era disrupsi, yakni:

1. Optimalisasi peran lembaga pendidik dari sekolah wajib (Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas) hingga Perguruan Tinggi dengan cara meningkatkan mutu sekolah;
2. Meningkatkan kompetensi Pengajar. Setidaknya ada 3 (tiga) kompetensi yang harus dimiliki oleh para Pengajar, yakni (a) kompetensi karakter dan budaya, (b) kompetensi pengetahuan tentang manusia modern, dan (c) kompetensi penguasaan teknologi pembelajaran, media, dan sumber belajar modern;
3. Meninjau dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter;
4. Revitalisasi *input* dan proses *output* para peserta didik; dan
5. Merekonstruksi lingkungan belajar dan budaya akademik.

Dalam strategi pembangunan pendidikan (Bappenas, 2019) pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia dengan meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan yang merata, peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan, profesionalisme guru, perubahan metode pembelajaran, budaya sekolah dan baca; serta pendidikan vokasi, *enterpneuership* dan karakter.

Berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh UNDP, pembangunan tidak hanya dianalisis dari pertumbuhan ekonomi saja, namun juga dari sudut SDM-nya. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya menjadi kriteria utama dalam menilai keberhasilan pembangunan negara. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran pembangunan kualitas SDM dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Sugiarto, 2019).

Eddy Cahyono Sugiarto (2019) mengungkapkan bahwa Pemerintah terus menggalakkan revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, serta penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi para tenaga pengajar. Dalam

tataran teknis, Komite Vokasi sebagai wadah kolaborasi antara industri dan pemerintah terus didorong sinergitasnya, dari perancangan program, *design* kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja. Hal ini disebabkan agar kebijakan *link and match* dapat berjalan dengan benar. Selain itu, pengembangan ekosistem talenta nasional dan global terus ditumbuhkembangkan pada berbagai tatanan, diantaranya dengan menata kelembagaan yang didukung dengan kepemimpinan berintegritas, guna memastikan berkembangnya talenta unggul dengan inovasi dan kreatifitasnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan pemerataan pendidikan yang berkualitas dengan memberikan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, bahkan pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pengembangan vokasi untuk mewadahi dan memberikan fasilitas bagi SDM unggul untuk siap pakai yang berkarakter (Bappenas, 2019).

B. Penerapan Hasil Pendidikan Nasional di Indonesia

Ketika berbicara mengenai pendidikan nasional, maka yang dimaksud disini adalah pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan yang berakar pada nilai agama, kebudayaan, Pancasila, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dari segi sosial, spiritual, intelektual, dan profesionalitas dalam bidang keilmuannya (Sulianti dkk., 2020).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan dalam menata pendidikan haruslah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan nilai-nilai luhur bangsa ini berperan penting dalam menyaring arus globalisasi yang terus masif berkembang dan masuk ke Indonesia, baik dari segi perkembangan Iptek maupun budaya luar. Senada dengan itu, Indonesia juga telah lebih dulu melaksanakan penyesuaian yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. VII Tahun 2001 untuk mewujudkan SDM Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Sulianti dkk. (2020), penerapan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan melalui Kurikulum 2013 atau dikenal dengan K-13 sangat berpengaruh, tidak hanya mengembangkan daya intelektual, namun juga mengembangkan sikap serta perilaku para

peserta didik. Hal ini disebabkan nilai-nilai Pancasila selain diberikan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, juga diterapkan pada seluruh mata pelajaran yang lain yang diwujudkan dengan penanaman nilai-nilai karakter pada setiap pembelajaran. Nilai karakter yang berakar dari nilai Pancasila ini membiasakan peserta didik untuk memandang, menganalisis, menyikapi, serta bertindak sesuai dengan karakter yang terdapat dalam Pancasila. Selain itu, para pengajar khususnya di bidang studi PPKn diwajibkan untuk memiliki 5 (lima) karakter yang harus dikuasai, yakni: (1) religius, (2) nasionalisme, (3) mandiri, (4) integritas, dan (5) gotong royong. Karakter-karakter tersebut secara langsung, maupun tidak langsung akan membentuk pembiasaan dan moral para peserta didik serta menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Pembiasaan ini akan membuat peserta didik tangguh mengikuti perkembangan globalisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dalam Pancasila.

C. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul yang Didukung dengan Teknologi

Kemajuan teknologi yang masif dan berjalan beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan peradaban umat manusia tidak terkecuali di Indonesia. Inovasi-inovasi yang diciptakan seperti *artificial intelligent*, *cloud computing*, dan *internet of things* memang memberikan manfaat dan kemudahan bagi kehidupan manusia, namun perlu dipahami bahwa hal ini jangan sampai melalaikan kesiap-siagaan dalam menghadapi tantangan zaman. Pasalnya untuk menghadapi perubahan zaman ini, seluruh elemen masyarakat memerlukan pendidikan yang mendetail dan menyeluruh untuk menjadi *digital talent* seiring dengan akselerasi transformasi digital.

Pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020, memaksa seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan perkembangan digital, baik dari generasi *digital native* hingga generasi transisi digital. Menurut Sugiarto (2021) pada era Revolusi Industri 4.0, SDM Indonesia tidak cukup hanya berbekal kecerdasan akal (IQ) dan kecerdasan emosi (EQ), namun juga membutuhkan kecerdasan digital atau *digital intelligence quotient* (DQ) sebagai kumpulan kompetensi teknis, kognitif, meta-kognitif, dan sosio-emosional yang didasarkan pada nilai-nilai moral universal untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang kehidupan digital.

Kecerdasan digital yang dimiliki oleh para SDM unggul diharapkan mampu menjawab tantangan di ruang digital yang semakin besar. Kecerdasan digital dengan pemanfaatan AI dalam masa pandemi Covid-19 telah terbukti mampu menahan laju keterpurukan pertumbuhan ekonomi. Kini sinyal pemulihan ekonomi terlihat mulai menggeliat dan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang menyokong ekonomi tetap bergerak di tengah pembatasan interaksi dan aktivitas fisik (Sugiarto, 2021).

RESTORASI SOSIAL INDONESIA DI ERA SOCIETY 5.0

Perkembangan globalisasi yang mendorong kemajuan Iptek berpotensi memberikan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, pasalnya sikap diskriminatif atas sara (suku, agama, ras, dan antar golongan), krisis identitas, dan degradasi nilai-nilai luhur mulai mewarnai generasi Indonesia di pergulatan revolusi industri 4.0. Apabila menarik benang merah, hal ini disebabkan oleh: (1) belum siapnya mental dan cara pandang (*mindset*) masyarakat, (2) masih minimnya keteladanan dari para elit pemimpin sebagai model peran (*role model*), (3) masuknya ideologi transnasional melalui berbagai macam media yang mempengaruhi sikap dan orientasi masyarakat, (4) pemahaman dan pengamalan Pancasila masih belum memadai, (5) sikap dan perilaku individualistik di kalangan masyarakat masih cukup menonjol, (6) sikap kurang menghargai keberagaman masih muncul di kalangan masyarakat, (7) semakin menurunnya rasa kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat sebagai implikasi dari paham individualistik, (8) masih terdapat cara pandang yang kurang dari masyarakat tentang pendidikan, (9) sosialisasi program-program dalam mendukung kesetiakawanan sosial di masyarakat kurang masif, serta (10) nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang harus dikembangkan dalam mendukung restorasi sosial bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam menyongsong peradaban *society* 5.0 diperlukan Gerakan Nasional Restorasi Sosial.

Dalam mewujudkan restorasi sosial Indonesia dalam menyongsong perubahan peradaban *society* 5.0 yang dapat dilakukan adalah melalui pembinaan mentalitas Bangsa Indonesia dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, pemanfaatan media sosial secara terkendali dan bertanggung jawab serta didukung dengan penguatan regulasi yang memadai guna menjaga kondusifitas keamanan nasional penting untuk dilaksanakan. Hal ini

dikarenakan Komponen utama *society 5.0* adalah manusia yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

A. Peran Pendidikan Sebagai Regulasi Restorasi Sosial

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pertumbuhan dan pengembangan pendidikan masyarakatnya, hal ini dapat menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kunci dari kualitas generasi suatu negara. Pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia untuk terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, ketertinggalan dan sebagai alat untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Di negara- negara maju sektor pendidikan mendapat perhatian yang utama, mereka mendahulukan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakatnya. Mereka menyadari bahwa kemajuan negara mereka sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya yang dihasilkan pada dunia pendidikan yang bermutu.

Di Indonesia sejauh ini pemerintah juga telah memperluas akses pendidikan untuk warganya melalui berbagai macam program pendidikan reguler, tetapi program tersebut belum dikatakan cukup untuk memberikan hasil yang signifikan karena keluaran dari hasil pendidikan tersebut masih banyak kekurangannya. Berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tetapi sejauh ini belum menampakkan hasilnya. Anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk pendidikan terus meningkat, biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat semakin mahal tetapi mutu pendidikan masih relatif belum ada perubahan. Mengapa kebijakan pembaharuan pendidikan senantiasa dapat dikatakan gagal dalam menjawab problem masyarakat, karena sesungguhnya kegagalan tersebut bukan karena semata-mata terletak kepada bentuk pembaharuan pendidikan yang bersifat tidak menentu, tambal sulam tetapi lebih mendasar lagi karena ketergantungan dari penentu kebijakan pendidikan pada peran pendidikan dalam perubahan sosial yang sudah usang. Ketergantungan ini menyebabkan adanya harapan-harapan yang tidak realistis dan tidak tepat terhadap efikasi pendidikan. Permasalahan akan semakin bertambah ketika materi yang diajarkan cenderung mematikan para peserta didik. Sistem pendidikan di Indonesia belum maksimal dalam memberikan ruang untuk kemandirian serta kreativitas peserta didik. Pendidikan nasional belum memenuhi dan menyentuh kebutuhan nasional

yang bersifat mendesak dan utama yaitu tersedianya orang-orang terdidik yang memiliki kemampuan wiraswasta misalnya. Pendidikan nasional juga belum mampu menghasilkan generasi baru yang berkarakter yang dapat diandalkan untuk mengambil prakarsa demi mewujudkan amanat para pendahulu bangsa untuk memperkuat pondasi NKRI dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai sosok makhluk yang adaptif dan transformatif yang mampu untuk mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya manusia merupakan aset negara yang sangat besar perannya dalam menata seluruh kehidupan, sehingga nasib suatu bangsa tergantung kepada sumber daya manusia pengelolanya. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur hanya dengan fasilitas dan sarana prasarana saja tetapi juga dengan visi, misi idealisme dan konsep pendidikan yang bermutu serta bermartabat sehingga pentingnya penekanan terhadap integritas moralitas harus menjadi faktor utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Pemantapan kualitas sumber daya manusia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi, proses yang dilakukan perlu direncanakan dengan baik dan berkesinambungan. Agar restorasi pendidikan dapat terlaksanakan dengan baik terlebih dahulu ditetapkan suatu program optimalisasi pemantapan kualitas sumber daya manusia yang disusun secara cermat berdasarkan pada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada kualitas yang dibutuhkan saat ini maupun masa yang akan datang. Bagaimanapun restorasi pendidikan dengan mengoptimalkan pemantapan kualitas sumber daya manusia harus diwujudkan agar Negara Kesatuan republik Indonesia mampu menuju suatu kondisi kejayaan bangsa sehingga diharapkan dapat mendukung penegakan kemakmuran rakyat dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

B. Pancasila Sebagai Landasan Transformasi Restorasi Sosial

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai landasan hukum yang mengikat bagi penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, aparatur pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam tatanan kehidupan nasional. Sila-sila yang terkandung di dalamnya menjadikan rumusan dalam mewujudkan pemantapan kualitas sumber daya manusia yang optimal. Sila

pertama yang termuat dalam rumusan Pancasila memberikan landasan kepada pemerintah agar pemantapan kualitas sumber daya manusia dapat menciptakan manusia Indonesia yang bertakwa dan saling bekerja sama antar sesama warga negara meskipun memiliki perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan. Pada sila kedua harus dijadikan acuan dalam pemantapan kualitas sumber daya manusia agar mengedepankan nilai-nilai kesetaraan guna mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beradab sehingga pelaksanaan pembangunan dapat diawaki oleh manusia yang senantiasa mengedepankan kepentingan semua masyarakat dengan berlandaskan pada pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada sila ketiga akan menuntun kepada kualitas sumber daya manusia yang dilandasi dengan jiwa persatuan, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dimana segenap elemen bangsa mau berpartisipasi secara aktif sesuai dengan porsinya. Sila keempat mengamanatkan kepada penerus kebijakan dalam penetapan kualitas sumber daya manusia harus berlandaskan kepada musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan masyarakat serta keputusannya harus dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila kelima akan tercermin kepada upaya menetapkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan sosial secara proporsional yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai kalangan. Dengan merefleksikan Pancasila sebagai landasan transformasi restorasi sosial menjadikan hal yang mutlak untuk dilakukan karena pada dasarnya Pancasila bersifat universal yang dapat merefleksikan semangat gotong-royong dalam kehidupan manusia dan bangsa yang bermartabat. Apabila Pancasila yang dijabarkan dan diterapkan dengan baik, tepat dan benar dalam kehidupan sosial akan menjamin tercapainya tujuan Nasional Indonesia yang akan mendukung tercapainya tatanan dunia baru.

PERSANTUNAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla. yang telah memberi dukungan sehingga penulisan serta penerbitan artikel ini dapat terlaksana.

PUSTAKA RUJUKAN

- Aliansi Kebangsaan, Suluh Nuswantara Bakti, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri. (2020). Jakarta: *Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila*. Kompas.
- Anthony, P.W., Kacmar, M. & Parrewe, P.L. 2002. Human Resource Management a Strategy Approach. *Fourth Edition*. South Western: Advision of Thomson Learning.
- Arif, K.M. 2021. Strategi Membangun SDM yang kompetitif, berkarakter, dan unggul menghadapi era disrupsi. *Jurnal Tahdzib Al-Akhlaq* 4(1): 1 - 11.
- [Bappenas] Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. 2019. Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. <https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id/wpcontent/uploads/2019/02/Bappenas.pdf> [Diakses 10 April 2022].
- Cintamulya, I. 2015. Peranan Pendidikan dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia di Era Informasi dan Pengetahuan. *Jurnal Formatif* 2(2): 90 - 101.
- Dardiri, A. 2016. Soft Skill and Entrepreneurial Career Guidance Model for Enhancing Technical Vocational Education and Training's Graduates Competitiveness. *Innovation of Vocational Technology Education* 12(1):1-8.
- [Kemdikbud] Jendela Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. Terbentuk Karakter Bangsa yang Kuat, Harapan Presiden Menyongsong Generasi Emas 2045. Diakses dari <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/terbentuk-karakter-bangsa-yang-kuat-harapan-presiden-menyongsong-generasi-emas-2045> [Diakses 21 April 2022].
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- Lickona, T. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
- Maltha, H. S. 2014. Indonesia Melompat Tinggi: Strategi Pemantapan Kualitas SDM dalam Penegakan Supremasi Hukum dan Ketahanan Nasional. Jakarta: PT. Gema Insan Seni Produktama.
- Nihayang, D.M. & Kusumanto. 2010. Penentu Upah Regional: Tenaga Kerja Terdidik (Skilled Labour) dan Tidak Terdidik (Unskilled Labor) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 3(1): 28 – 39.

Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Sugiarto, E.C. 2019. *Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju
Indonesia Unggul*. Diakses dari [https://www.setneg.go.id/baca/index/
pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_menuju_indonesia_unggul](https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_menuju_indonesia_unggul)
[Diakses 10 April 2022].

Sugiarto, E.C. 2021. *Kecerdasan Digital, Disrupsi, dan Indonesia Maju*. Diakses
dari [https://setneg.go.id/baca/index/kecerdasan_digital_disrupsi_
dan_indonesia_maju](https://setneg.go.id/baca/index/kecerdasan_digital_disrupsi_dan_indonesia_maju) [Diakses 11 April 2022].

Sulianti, A., Efendi, Y., & Sa'diyah, H. 2020. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam
Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 5(1): 54-65.
doi:<https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n1.2020.pp54-65>

Toenlio, A. 2004. *Sekolah dan Mobilitas Sosial*. Jakarta: Kompas 6 Agustus 2004.

Tripathy, M.M. 2010. *When going gets Tough, the Soft gets going*. Diakses dari
www.selfgrowth.com/articles/Tripathy1.html [Diakses 10 April 2022].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem
Pendidikan Nasional*. [https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/
docs/UU_2003
No_20_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf](https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf) [Diakses 21 April 2022].

Wijaya, Y.D. 2019. *Pembentukan Karakter dengan Mengasah Soft Skill di Sekolah*.
[http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/2019/11/pembentukan-karakter-
dengan-mengasah-soft-skill-di-sekolah/](http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/2019/11/pembentukan-karakter-dengan-mengasah-soft-skill-di-sekolah/) [Diakses 10 April 2022].

Zainal, V.R. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Penerbit
PT Raja Prenada Persada. Jakarta. ISBN: 978-979-769-776-1.

MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEMANDIRIAN BANGSA GUNA MEWUJUDKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Ari Purnomo, S.T., M.Si.¹

Muhamad Bashori Alwi, S.T., M.T.²

¹Kepala Bagian Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

²Kepala Seksi Laboratorium Analisis Evaluasi Simulasi dan Forensik Labpamsisjar Dispamsanal Mabesal, Jakarta



*Kemandirian ekonomi menjadi titik tolak kemandirian
pembangunan sebagai upaya membangun bangsa tanpa
tergantung dengan negara asing*

Ari Purnomo & Muhamad Bashori Alwi



PENDAHULUAN

Rencana pembangunan perekonomian nasional disusun berlandaskan kepada ideologi bangsa yang tertuang dalam Pancasila dalam meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah yang membangun, menegakkan kedaulatan, menjunjung tinggi martabat dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Pembangunan pada bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju dalam upaya menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dapat memberikan kesempatan kepada peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan peluang kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk itu diperlukan terciptanya stabilitas ekonomi yang kuat agar kegiatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terciptanya stabilitas ekonomi yang kuat akan melindungi masyarakat dari penurunan daya beli karena terjadinya kenaikan harga di berbagai sektor. Dengan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat terwujud diperlukan upaya untuk mendorong peran masyarakat dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk membuka sebanyak mungkin kantong-kantong pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung tujuan tersebut agar dapat betul-betul mengarah kepada pencapaian upaya perbaikan kehidupan rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang lebih mandiri dan mendorong Bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju serta sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan segala upaya untuk mewujudkan perekonomian dengan sistem yang baik. Upaya yang sungguh-sungguh dalam mendorong segala macam tindakan ekonomi sangat diperlukan seperti mendorong pertumbuhan investasi, ekspor, pembatasan konsumsi maupun pengeluaran pemerintah. Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri sektor penggerak pada industri strategis untuk lebih digiatkan dengan prioritas utama diarahkan kepada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, sektor kemaritiman dan upaya untuk mendorong kepada bidang industri pengolahan dan pariwisata. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Kemandirian ekonomi nasional telah menjadi tuntutan riil pada era global yang semakin kompetitif. Ketergantungan Indonesia kepada bangsa lain dalam berbagai aspek kehidupan dapat dimaknai sebagai semakin menjauhnya bangsa terhadap cita-cita kemerdekaan untuk terbebas dari berbagai bentuk penjajahan. Sejak awal kemerdekaan, kemandirian ekonomi sejatinya tegas digariskan sebagai cita-cita nasional yang harus direalisasikan melepaskan diri dari ketergantungan berupa hutang, pinjaman, hibah dan sebagainya. Komitmen para pemimpin nasional telah dimulai dengan narasi yang berbeda, namun secara substansi tetap merujuk kepada kemandirian ekonomi nasional yang kuat dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Dengan kemandirian ekonomi akan menjadi titik tolak kemandirian pembangunan, kemandirian pembangunan sebagai upaya membangun bangsa dan negara tanpa tergantung dari negara asing. Kemandirian berbagai sektor sangat diperlukan dalam pembangunan nasional seperti sektor pangan, kemandirian sektor energi, kemandirian sektor teknologi sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju sehingga secara otomatis mendukung sistem pertahanan dan keamanan nasional.

MEMBANGUN PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki suatu situasi dan kondisi masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan dapat dipahami sebagai sesuatu proses terencana untuk meningkatkan kemampuan dari obyek yang diperdayakan dikarenakan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk melepaskan diri dari jurang kemiskinan dan keterbelakangan. Istilah pemberdayaan sendiri adalah sebagai upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipasi dan belajar bersama. Menurut (Maltha, 2014; Aliansi Kebangsaan, 2019; Andy, 2020) pemberdayaan masyarakat adalah mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan dalam hal ini diarahkan guna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu untuk menghasilkan peningkatan dan nilai tambah secara ekonomi

untuk memperbaiki taraf hidup (Christensen & Ames, 1989). Dalam pemberdayaan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah bagaimana untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pengetahuan, ketrampilan dan menumbuhkan kepercayaan diri untuk mampu berdiri sendiri serta mampu untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik dengan kekuatan swadaya sendiri. Kegiatan-kegiatan dalam usaha membangun pemberdayaan tersebut antara lain adalah dengan melaksanakan pendidikan, pelatihan-pelatihan, pendampingan dan keterlibatan lembaga pemerintah dalam menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan dan etos kerja.

A. Modal Sumber Daya Manusia Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Daya saing berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, di mana suatu perekonomian akan memiliki variasi laju pertumbuhan ekonomi yang ditentukan oleh daya saing yang dimiliki (Lakitan, 2012). Konsep daya saing dijelaskan sebagai kemampuan entitas dibandingkan dengan entitas lain pada jajarannya dalam bidang tertentu. Konsep daya saing merujuk pada entitas dari beragam level seperti individu, perusahaan, industri, wilayah atau negara, dan lain sebagainya (Firdausy, 2020). Kemampuan untuk memiliki daya saing tergantung dari pembandingan dan keseimbangan faktor pembentuknya yang menjadikan daya saing sebagai konsep mutlak dan absolut. Pada tataran individu daya mengarah kepada upaya untuk meningkatkan kemampuan dibandingkan dengan kompetitornya dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari individunya tersebut. Daya saing merupakan konsep yang diperlukan untuk tidak hanya untuk mencapai keunggulan tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab jangka panjang untuk memberikan manfaat kepada lingkungan, organisasi, perusahaan dan negara. Daya saing suatu perekonomian tidak saja mencakup dalam pemenuhan kebutuhan namun lebih kepada bagaimana dapat mencapai pada tataran tingkat kesejahteraan yang lebih baik dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Daya saing sangat ditentukan oleh produktivitas yang efisien, pada konteks individu dan perusahaan, tenaga kerja diukur dari produktivitas untuk menghasilkan *output* pada hasil proses produksi. Pada tataran makro merupakan faktor *input* dari pertumbuhan ekonomi. Akumulasinya sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, pelatihan, kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, nilai dan kekayaan sosial yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Pada aspek hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan kinerja pada

perusahaan peran positif dan inovasi sangat diperlukan dalam segi produktivitas. Peran produktivitas sangat tergantung kepada keahlian (*skill*), dan pengetahuan individu yang dikontribusikan dalam pasar tenaga kerja. Hubungan antara sumber daya manusia (individu) dengan daya saing perusahaan, sumber daya manusia adalah kunci utama dari produktivitas perusahaan untuk mencapai suatu keunggulan yang kompetitif.

Dalam konteks negara peran sumber daya manusia secara eksplisit berkaitan erat dengan daya saing. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor lain dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya. Dalam tataran negara, negara-negara bersaing dengan menciptakan komponen-komponen institusi dengan melalui sistem koordinasi dengan sejumlah kebijakan, individu dan masyarakat dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang diinginkan dalam membentuk daya saing suatu negara. Dengan modal kualitas sumber daya manusia yang unggul tujuan pencapaian ekonomi yang kuat akan dapat dipenuhi yang dilandasi dengan sistem pemerintahan yang kuat.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam wacana pembangunan dihubungkan dengan konsep secara mandiri/sendiri, jaringan kerja kelompok dan berkeadilan. Pada dasarnya konsep pemberdayaan masyarakat diletakkan pada kekuatan tingkat individu sosial di mana peran serta masing-masing individu sosial merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses dalam pemberdayaan setiap yang terlibat dalam proses tersebut. Pemberdayaan masyarakat timbul karena adanya kegagalan sekaligus munculnya harapan. Kegagalan merupakan gagalnya berbagai macam model dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan sedangkan munculnya harapan karena adanya mulai dimunculkannya nilai-nilai demokrasi yang berdampak kepada pembangunan manusia seperti persamaan gender, pembinaan sumber daya manusia yang semakin berkembang serta pemberdayaan pembangunan ekonomi kreatif yang memadai. Upaya-upaya dalam memberdayakan masyarakat untuk membangun konsep ekonomi mandiri meliputi antara lain : *pertama*, menciptakan iklim yang dapat memungkinkan potensi dari masyarakat berkembang. Hal ini tentu saja membutuhkan upaya untuk membangun dan menggali potensi masyarakat sekaligus mendorong dan memotivasi supaya masyarakat menjadi terbuka pemikirannya dan berusaha untuk berkembang. *Kedua*, memperkuat sumber daya atau potensi yang

dimiliki oleh masyarakat. Dalam menciptakan peluang sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya menciptakan iklim saja tetapi harus membuat langkah-langkah yang kongkret dan nyata serta membuka akses untuk membuka peluang yang dapat membuat masyarakat memiliki daya potensi yang tinggi. Untuk itu pula diperlukan program-program khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan yang dapat menyentuh di seluruh lapisan masyarakat. *Ketiga*, menjaga eksistensi dan melaksanakan program yang berjenjang serta berkelanjutan (Affandi, 2020). Dalam proses pemberdayaan masyarakat supaya dapat mencegah terjadinya kondisi di mana yang lemah akan bertambah lemah sehingga akan mengakibatkan kemunduran. Upaya perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat bawah diperlukan sebagai upaya untuk memajukan potensi yang sedang berkembang. Pemberdayaan tidak membuat masyarakat menjadi ketergantungan tetapi bertujuan untuk menjadikan mandiri, memupuk dan membangun kemampuan masyarakat secara berkesinambungan

C. Strategi Kemandirian Ekonomi

1. Peningkatan Ekonomi Kreatif

Di Indonesia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki berbagai definisi yang cenderung di sesuaikan dengan kepentingan teknis yang memudahkan *stakeholder* yang mendefinisikan dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah menyatakan bahwa Kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 Juta dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta, Untuk usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta. Kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50 milyar. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM sebagai perusahaan atau industri yang memiliki tenaga kerja 99 orang ke bawah. Sudut pandang yang diambil dalam mendefinisikan dilihat dari kuantitas tenaga kerja. Kemenkop dan UKM (UU No.9 Tahun 1995) menyatakan UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai skala kecil tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta sampai dengan 200 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih kecil atau sama dengan Rp 1 milyar. Sementara Keppres No. 16/1994 mendefinisikan UKM adalah

perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 400 juta. Dari sisi pendefinisian bisa dikatakan belum ada paradigma yang sama terkait dengan definisi UMKM, persepsi yang berbeda baru dari kalangan *stakeholder* pemerintah belum dari kalangan non pemerintah. Masing-masing pihak atau instansi pemerintah memberikan definisi yang disesuaikan dengan kemudahan atau kepentingan pelaksanaan tugasnya masing-masing agar capaian tugas dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Masalah yang dihadapi oleh UMKM secara substansial dan intensitas sangat bervariasi di antara satu dengan lainnya, masalah yang dihadapi tersebut berbeda pula antara satu daerah dengan daerah lain. Sebenarnya permasalahan UMKM bersifat spesifik dan individual masing-masing, namun untuk kepentingan kebijakan dan implementasinya memang perlu untuk dilakukan pengelompokan untuk memandu dan memudahkan berbagai pihak untuk merencanakan kebijakan dan program terkait dengan pengembangan UMKM. Dari perspektif pemberdayaan berbagai kelemahan yang terkait dengan keberadaan UMKM adalah sebagai berikut : (a). Institusi yang membidangi UMKM kurang memadai, (b). Personel kurang sesuai dengan kompetensi, (c). Dukungan APBD belum memadai, (d). Beberapa Perda yang kurang kondusif bagi pengembangan UMKM, (e). Koordinasi lintas sektor yang belum optimal, (f). Lembaga yang mendukung pemberdayaan UMKM belum optimal, (g). Kualitas sumber daya manusia dari segi ketrampilan teknis maupun manajerial masih sangat rendah, (h). Kemampuan dalam penguasaan faktor produksi khususnya modal dan teknologi masih sangat rendah, (i). Akses terhadap sumber daya produktif khususnya sumber daya pembiayaan perbankan masih sangat rendah. Dengan mengutamakan kebijakan pada upaya memperkuat modal pelaku UMKM dan SDM selanjutnya masalah yang lainnya diyakini akan memudahkan UMKM naik kelas dalam skala usaha yang pada gilirannya akan berkembang sesuai perkembangan dari sisi pembangunan yang berkualitas yaitu pertumbuhan lebih merata disertai dengan penguatan daya saing ekonomi bangsa (Firdausy, 2020). Untuk itu dari perspektif *stakeholder* terutama instansi-instansi pemerintah terkait dengan penyeragaman persepsi tentang definisi, karakteristik dan permasalahan UMKM harus direalisasikan dalam prioritas kebijakan dan implementasi yang saling mendukung.

Perkembangan makro unit usaha menurut skala dan tenaga kerja dapat menggambarkan derajat atau posisi penting pada masing-masing kelompok

usaha tersebut dalam aktivitas ekonomi nasional. Dari sisi porsi unit usaha dan penyerapan tenaga kerja peranan UMKM khususnya usaha mikro sangat penting dibandingkan dengan unit usaha skala lainnya bahkan dapat mempresentasikan ekonomi kerakyatan. Bila usaha mikro ini kurang memberikan nilai tambah, maka artinya mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan, namun apabila usaha mikro ini dapat ditingkatkan secara terus menerus akan mampu menghasilkan nilai tambah sehingga mayoritas rakyat akan hidup lebih sejahtera. Salah satu tujuan pokok negara ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, oleh karena itu upaya yang keras untuk meningkatkan pendapatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Dominasi dari tingkat jumlah UMKM dan penyerapan tenaga kerja tidak hanya menggambarkan tingkat pentingnya dari peran UMKM pada masyarakat, tetapi juga menggambarkan ancaman yang buruk tentang mayoritas rakyat dalam kehidupannya yang sulit dan mendekati kemiskinan. Bila tren positif UMKM dapat berkelanjutan serta dapat diupayakan pada tataran yang lebih tinggi, maka dampaknya akan timbul perkembangan usaha akan naik kelas dari skala usaha di bawah ke atas menjadi lebih banyak serta prosesnya akan lebih cepat berkembangnya sehingga pada gilirannya akan menjauh dari keterpurukan usaha bahkan akan dapat mensejahterakan rakyat.

Untuk tumbuh kembangnya UMKM pada masyarakat perlu adanya pembinaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan agar upaya UMKM bertambah kapasitasnya menuju sektor formal dan secara simultan perlu adanya sistem pembiayaan mikro yang bergerak ke arah pertemuan antara kapasitas pemenuhan syarat formalitas UMKM dan syarat-syarat minimal sistem pembiayaan mikro bisa terpenuhi. Di sinilah peran pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendorong bertemunya sistem pembiayaan mikro yang inklusif namun memiliki daya saing dengan UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam sektor informal. Dengan meningkatnya perekonomian kerakyatan tentu akan dapat mendorong perekonomian secara nasional.

2. Mendorong Perdagangan Dalam Negeri

Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bentangan wilayah yang sangat luas dan mempunyai infrastruktur logistik yang belum memadai serta biaya transportasi yang sangat tinggi merupakan tantangan yang tidak mudah bagi penyedia dan pendistribusian komoditas logistik serta

bahan pokok. Kondisi ini memerlukan sinkronisasi dan keselarasan antar sektor ekonomi antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih dan merata. Di samping itu dalam meningkatkan perekonomian di suatu wilayah perhatian terhadap jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat krusial. Jalur perdagangan dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara sehingga masing-masing jalur perlu mendapat perhatian sebelum distribusi komoditas tersebut tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Rangkaian logistik suatu komoditas meliputi manajemen rantai pasok yang menangani aliran barang serta aliran uang agar aman, efektif dan efisien serangkaian dengan proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, transportasi dan pelayanan pengantaran dalam jenis kualitas, jumlah, waktu serta tempat tujuan yang di kehendaki.

Salah satu kelemahan sistem logistik di Indonesia saat ini adalah masih belum mencukupinya memenuhi jumlah permintaan dan pasokan secara akurat dan riil. Sistem logistik tersebut belum dapat mencatat transaksi secara jujur dan transparan sehingga risiko-risiko kebocoran dan kecurangan pada rantai pasok cukup tinggi. Kedua faktor tersebut menyebabkan kelangkaan bahkan menyebabkan kondisi krisis terutama dalam komoditi pangan. Hal ini tentu saja akan menghambat perputaran roda perekonomian bangsa. Salah satu upaya dalam memperbaiki sistem logistik adalah dengan membangun infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus memperbaiki sistem sosial. Solusi dari permasalahan transportasi dan logistik harus mencakup aspek sosial, finansial dan lingkungan untuk membentuk tatanan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kerja sama pada rantai pasokan di mana implementasi pergudangan bersama, pengiriman konsolidasi, serta hukum efisiensi logistik yang komprehensif untuk dilakukan. Selain itu pula perlu ditunjang dengan bisnis platform untuk menyediakan tempat yang menghubungkan antara pelanggan atau permintaan dengan pasokan yang menyediakan layanan. Dengan metode demikian sistem penyimpanan dapat dibagi dan dimaksimalkan pemanfaatannya serta dapat mengurangi beban pengeluaran sekaligus efisiensi penggunaan fasilitas dan menurunkan angka kemacetan dan aktivitas yang berdampak buruk bagi lingkungan.

Pada era sekarang ini tren untuk berbelanja di pasar modern atau supermarket merupakan akibat dari perubahan gaya hidup dari sebagian masyarakat, hal ini dapat terjadi karena faktor kualitas produk yang dijual, tingkat kenyamanan dan keamanan tempat berbelanja serta kepastian ukuran dari barang yang dibeli. Tindakan ini juga akan memperparah mulai adanya

pergeseran penggunaan produk luar negeri yang tanpa disadari secara tidak langsung akan mematikan industri dalam negeri sehingga perlu adanya gerakan untuk membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap kelangsungan industri dalam negeri dengan kembali mencintai produk-produk dalam negeri. Semakin menggiatkan penggunaan produk dalam negeri selain untuk meningkatkan produk lokal tumbuh dan berkembang diharapkan juga tidak terjadi adanya aliran uang orang Indonesia ke luar negeri yang akan memicu penurunan nilai tukar rupiah, serta dengan menggunakan produk lokal roda industri akan bergerak dan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja sehingga kesejahteraan akan meningkat. Tak kalah pentingnya juga, jika penggunaan produksi dalam negeri meningkat dapat memperkuat struktur ekonomi terutama cadangan devisa dalam negeri dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri diperlukan langkah-langkah strategis meliputi antara lain meningkatkan kualitas produksi secara terus menerus, adanya keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri dengan adanya regulasi yang jelas dan mendukung produksi dalam negeri, diperlukan adanya gerakan moral yang dapat secara bersama-sama menumbuhkan semangat mencintai produk dalam negeri, menciptakan sistem pemasaran yang terpadu sehingga menciptakan promosi yang efektif dan efisien serta menjadikan produk yang mempunyai daya saing tinggi. Upaya meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, diperlukan upaya yang simultan agar keinginan menggunakan produksi dalam negeri dapat tumbuh dari kesadaran merasa memiliki produksi dalam negeri dan mencintai serta menggunakan produksi dalam negeri.

3. Membangunan Sektor Maritim

Presiden Soekarno menyinggung soal jongos dalam pidatonya saat meresmikan berdirinya Institut Angkatan Laut (IAL, sekarang AAL) pada 10 Oktober 1951. Soekarno menyatakan : “ **... Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya,... bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi JONGOS-JONGOS DI KAPAL, BUKAN. Tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai ARMADA MILITER, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri....**”

Dari sepenggal kutipan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, mempunyai maksud bahwa kita sebagai bangsa agar memperhatikan sektor maritim, menyadarkan kita bahwa pemanfaatan, pemberdayaan dan pengelolaan sektor maritim belum dilaksanakan secara arif dan bijaksana. Sebagai negara bahari dan mempunyai kepulauan terbesar di dunia, Bangsa Indonesia belum memanfaatkan secara maksimal segala potensi yang ada. Potensi kelautan dan perikanan dapat menghasilkan nilai ekonomi yang sangat fantastis tetapi nilai ekonomi tersebut belum digali sepenuhnya. Padahal apabila potensinya digali lebih dalam mempunyai nilai ekonomi melebihi anggaran pendapatan belanja nasional. Banyak potensi-potensi maritim yang dapat digali untuk membangun sektor perekonomian nasional antara lain Sumber daya terbarukan (meliputi sumber daya perikanan tangkap dan budidaya), sumber daya tidak terbarukan (meliputi sumber daya minyak dan gas bumi, energi gelombang laut, energi pasang surut, energi panas laut, energi angin), pariwisata bahari, industri jasa maritim, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Perekonomian maritim merupakan bagian dari ekonomi sumber daya alam yang obyeknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya kelautan. Pada dasarnya sumber daya alam akan mempunyai keterbatasan atau kelangkaan apabila berinteraksi dengan kebutuhan makhluk hidup. Kelangkaan sumber daya maritim dalam ekonomi maritim dapat dilihat dari perilaku kelebihan tangkap para nelayan dalam upaya mengembangkan potensi perikanan seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak yang berdampak terjadi kerusakan terumbu karang dan banyak ikan-ikan kecil yang mati sehingga menjadi kekhawatiran musnahnya suatu ekosistem di daerah tersebut. Perlu dilaksanakan upaya untuk menjaga keseimbangan dan pemenuhan sumber daya yang dipakai. Sumber daya maritim selama ini digolongkan dengan sumber daya yang dapat diperbaharui, tetapi bila dilihat secara faktual komponen sumber daya maritim terdapat pula sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti mineral, minyak bumi dan gas lepas pantai. Selama ini sudut pandang pemikiran yang sempit bahwa sumber daya maritim yang diidentikkan dengan perikanan dan pariwisata bahari saja untuk dihilangkan karena seharusnya sumber daya maritim dapat dipandang sebagai sumber daya yang cukup luas. Sudut pandang sebagai sumber daya yang bisa diperbaharui karena faktor biologis yang mengakibatkan sumber daya maritim bisa utuh kembali mengakibatkan dampak semua orang akan dapat mengakses sumber daya maritim tersebut sehingga naluri penangkapan

seperti penangkapan ikan membentuk sistem penangkapan yang melebihi kapasitas. Perlu adanya kesepakatan demi kelestarian sumber daya ikan tersebut, kompensasi terhadap lingkungan laut perlu dijaga, perlu rehabilitasi dan konservasi agar rantai kehidupan di laut tidak terputus. Oleh sebab itu diperlukan fondasi pengembangan maritim dalam membangun perekonomian maritim yang pada akhirnya akan membangun perekonomian nasional.

Untuk menciptakan kekuatan maritim yang besar diperlukan pemikiran, tindakan yang tepat dan berkelanjutan yaitu pertama, membangun ekonomi maritim yang potensial yaitu membangun sistem transportasi dan perhubungan laut, pelabuhan dan industri perkapalan, perikanan tangkap dan budidaya, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral di laut yang semuanya menjadi rangkaian ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kota pantai. Kedua, membangun sumber daya maritim yang andal. Untuk membangkitkan ekonomi berbasis maritim dan menghadapi persaingan di bidang maritim yang semakin ketat, kebutuhan akan sumber daya manusia yang tangguh, profesional dan andal sudah menjadi kebutuhan mutlak. Kebutuhan sumber daya manusia tersebut mencakup tenaga kerja di bidang pelayaran, pelabuhan dan perkapalan, penangkapan ikan, wisata bahari, eksplorasi dan eksploitasi laut. Posisi wilayah Indonesia yang strategis dan menguntungkan, menampilkan juga kelemahan dan mendatangkan berbagai macam ancaman, kekuatan dan peluang yang sangat besar, sehingga perlu dibentuk sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan mengerti tentang nilai-nilai budaya bahari, dinamis, demokratis, tidak terbatas kepada egoisme teritorial yang sempit dan melek terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, membuat tata ruang maritim. Untuk memudahkan dalam pengelolaan dan menciptakan kekuatan ekonomi maritim, diperlukan tata ruang maritim yang jelas. Selama ini pembangunan tata ruang hanya terfokus yang berorientasi hanya kepada daratan, belum menyentuh kepada laut. Padahal laut yang mencakup pulau, pesisir dan lautan itu sendiri merupakan satu kesatuan dalam perencanaan. Penataan sistem dan prosedur tata ruang wilayah Indonesia harus berorientasi kepada wawasan maritim dan lingkungan. Dengan demikian akan tercipta tata ruang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang ideal dan berkelanjutan. Keempat, membangun sistem hukum maritim yang ideal. Dengan kepastian sistem hukum yang jelas, sumber- sumber daya ekonomi maritim seperti yang terdapat di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

maupun di daerah perbatasan antar negara menjadi jelas statusnya. Dengan mempunyai sistem hukum yang jelas maka kita telah melindungi seluruh sumber daya ekonomi yang berada di wilayah Laut Indonesia. Walaupun sekarang ini sudah ada berbagai peraturan yang mewadahi terhadap kepentingan maritim tetapi dirasakan masih sangat sektoral sehingga belum mampu mendorong upaya koordinasi yang menghasilkan sinergi antar sektor. Diperlukannya Hukum Maritim sebagai landasan yang bersifat koordinasi atau integratif untuk aturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan maritim. Kelima, Pembangunan kekuatan ekonomi harus didukung dengan penegakkan kedaulatan di laut. Penegakkan kedaulatan di laut mutlak diperlukan karena seluruh potensi sumber daya ekonomi maritim akan terlindungi dari ancaman pencurian maupun invasi dari negara lain, sehingga pembangunan ekonomi maritim tidak mendapat gangguan dari dalam maupun luar negeri sehingga dapat menunjang terciptanya kelangsungan pembangunan bangsa, baik di waktu sekarang dan untuk masa depan. Kurangnya penegak hukum yang hadir dan lemahnya penegakkan kedaulatan di laut dikarenakan masih adanya keterbatasan peralatan dan anggaran. Oleh sebab perlu adanya pemikiran yang serius dalam membangun sektor maritim, ekonomi berbasis maritim dapat menjadi energi tambahan yang luar biasa untuk pembangunan kemandirian ekonomi nasional.

4. Membangun Sektor Pariwisata

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan beraneka ragam budaya serta keindahan alamnya. Hal ini menjadi daya tarik yang akan memikat wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. potensi pariwisata di Indonesia sangat besar yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan beraneka ragam obyek wisata menawan yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki panorama pegunungan, pantai, laut, air terjun, hutan tropis dan tempat wisata alam lainnya yang sangat indah. Selain panorama yang mempunyai keindahan, Indonesia juga dikenal mempunyai banyak suku, ragam budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam memiliki keunggulan pesonanya. Keinginan wisatawan untuk selalu menikmati keaslian alam dan keelokan budaya merupakan sebagai pendorong pesatnya perkembangan bisnis pariwisata. Pariwisata merupakan komponen yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dengan keanekaragaman yang ditawarkan tentu saja akan menjadi magnet yang menarik untuk dikunjungi. Sayangnya banyak sekali obyek wisata yang

terdapat di Indonesia baik yang potensial maupun yang sudah dimanfaatkan belum dikelola dengan baik. Umumnya pengelolaannya masih dilakukan secara parsial dan belum inovatif. Bila cara pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional tersebut maka pengembangan sektor pariwisata di Indonesia tidak akan mencapai hasil yang maksimum padahal aspek kepariwisataan merupakan sektor yang diharapkan dapat menjadi andalan pendapatan negara yang sangat besar. Faktor lain yang sangat penting bagi pengembangan sektor pariwisata secara umum adalah stabilitas keamanan dalam negeri. Sudut pandang keamanan sangat penting di kalangan para wisatawan khususnya wisatawan asing karena keinginan yang awalnya mereka akan berkunjung ke Indonesia menjadi batal karena risiko yang dihadapi dalam melakukan perjalanan wisata ke Indonesia akibat terjadinya kerusuhan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi citra dan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Selain kenyamanan wisatawan juga mengandalkan rasa aman sehingga pencitraan terhadap keamanan pada setiap obyek wisata menjadi sangat penting. Untuk itu perlu upaya yang maksimal untuk menjaga keamanan para wisatawan, kalau tidak tentu saja akan terjadi penurunan jumlah wisatawan dan akan diikuti oleh turunnya pemasukan terhadap negara.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi andalan negara untuk memperoleh devisa sehingga pengembangannya perlu dilakukan dengan baik. Pembangunan pariwisata baik potensi dan peranannya senantiasa perlu untuk ditingkatkan. Pengembangan pariwisata diyakini dapat mempunyai efek ganda, selain dapat menyerap tenaga kerja juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan devisa dan mendorong pembangunan lingkungan yang baik. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan perlu dilakukan supaya dampak yang buruk dari kegiatan pariwisata dapat dikendalikan. Tindakan yang tidak terkendali dengan asumsi hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi saja tetapi tidak memikirkan kemampuan daya dukung, baik daya dukung sumber daya alam maupun sumber daya sosial budaya akan membuat dampak buruk yang dapat merusak keberlangsungan ekonomi masyarakat secara jangka panjang, sehingga diperlukan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan agar mampu meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata (Kamaluddin, 2002). Konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan merupakan sebagai proses upaya membangun pariwisata tanpa dengan menghabiskan atau merusak sumber daya yang ada.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan bertujuan memperhatikan keseimbangan baik dari dimensi waktu (waktu sekarang dan waktu masa depan), keseimbangan dari aspek ekonomi, perlindungan lingkungan alam dan pembangunan sosial budaya. Sesuai dengan Permen Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang destinasi pariwisata berkelanjutan terdapat empat pilar utama dalam pengembangan pariwisata antara lain : *a. Pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan.* Destinasi wisata diharapkan telah menyusun dan mengaplikasikan pengembangan strategi jangka panjang dengan mempertimbangkan isu lingkungan hidup , ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika yang berkembang di masyarakat. Sistem pemantauan maupun evaluasi harus diterapkan guna mengurangi segala dampak akibat yang ditimbulkan adanya kegiatan pariwisata. Selain itu destinasi wisata diharapkan memiliki organisasi atau kelompok yang efektif, bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan melibatkan sektor swasta dan pemerintah. Organisasi ini juga berperan dalam memberikan pengawasan dan pelaporan secara berkala kepada publik. *b. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal.* Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menuntut destinasi wisata agar menyediakan kesempatan kerja yang sama terhadap seluruh masyarakat. Organisasinya pun harus mempunyai sistem yang mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan tujuan serta pengambilan keputusan secara berkelanjutan. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal dapat ditunjukkan dengan adanya sistem yang mendukung masyarakat lokal maupun pengusaha kecil dan menengah untuk mempromosikan serta mengembangkan produk lokal secara berkelanjutan. Adapun produk lokal yang dimaksud dapat berupa makanan dan minuman, kerajinan tangan, pertunjukan kesenian, produk pertanian dan lainnya. *c. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung.* Nilai-nilai budaya yang menjadi warisan leluhur haruslah dilestarikan. Pelestarian budaya ini nantinya juga dapat menjadi suatu atraksi yang menarik bagi wisatawan sehingga menjadi sarana edukasi maupun transfer pengetahuan. Selain itu dengan adanya atraksi wisata berupa kearifan lokal atau budaya akan membawa wisatawan untuk dapat menghargai dan menghormati budaya di setiap destinasi wisata yang dikunjunginya. Destinasi wisata juga diharapkan sudah memiliki sistem pengelolaan pengunjung, termasuk di dalamnya berupa tindakan untuk mempertahankan, melindungi dan memperkuat aset sumber daya alam maupun budaya. Untuk mendukung sistem ini destinasi wisata dapat

menyediakan atau menerbitkan panduan perilaku pengunjung yang pantas pada situs-situs yang sensitif. Informasi dan panduan juga harus disesuaikan dengan budaya setempat yang di kembangkan melalui kolaborasi bersama masyarakat. *d. Pelestarian lingkungan.* Pelestarian lingkungan dilakukan untuk mengurangi serta mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas kepariwisataan. Dalam hal ini, saat akan mengembangkan destinasi wisata, organisasi diharuskan mengidentifikasi risiko lingkungan beserta proses atau sistem penanganannya. Selain itu destinasi wisata wajib berperan untuk memberikan perlindungan alam liar baik flora dan fauna dengan menyediakan sistem yang disesuaikan dengan hukum lokal, nasional dan internasional. Dengan membangun pariwisata diharapkan akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih baik

KEMANDIRIAN EKONOMI AKAN MENDORONG KEKUATAN BANGSA

A. Kemandirian Energi

Ketahanan energi mulai menjadi isu global ketika Arab Saudi menghentikan ekspor minyak mentahnya ke negara-negara industri. Tindakan Arab Saudi tersebut praktis mengganggu aktivitas negara-negara importir minyak. Dunia internasional menjadi sadar terhadap pentingnya menjaga pasokan agar tidak tergantung kepada satu jenis sumber energi dan satu produsen energi. Inti masalah energi dunia adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran serta akses sumber daya energi. Berbagai faktor yang menciptakan ketidakseimbangan tersebut antara lain pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan masifnya industrialisasi dunia. Hal ini yang meningkatkan konsumsi energi dunia secara drastis dan mengakibatkan penggunaan cadangan energi khususnya energi fosil. *International Energy Agency (IEA)* mendefinisikan bahwa ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber daya energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Harga energi menjadi sangat penting karena akan digunakan oleh pihak produsen dalam menghitung estimasi imbal hasil atas investasi yang dikeluarkan dalam menyediakan energi. Oleh sebab itu pemerintah memberlakukan batasan atas harga energi pada level tertentu. Kebijakan pemerintah sangat diperlukan agar tiga komponen yang meliputi estimasi permintaan energi, keandalan pasokan energi dan harga energi dapat direspon dengan baik oleh pelaku ekonomi (produsen dan konsumen) sehingga ketersediaan energi berada pada tingkat keseimbangan sesuai dengan kebutuhan konsumsi

perekonomian. Dalam batas tertentu keadaan ini juga dialami oleh Indonesia. Kondisi energi Indonesia saat ini masih mengandalkan migas sebagai penghasil devisa maupun memasok kebutuhan dalam negeri, cadangan minyak bumi dalam kondisi menipis walaupun gas bumi cenderung meningkat. Untuk energi baru dan terbarukan meskipun Indonesia memiliki potensi yang beragam tetapi pengelolaan dan penggunaannya masih belum optimal. Timbul kekhawatiran publik atas keandalan pasokan bahan bakar dalam permintaan masyarakat sekaligus ketergantungan terhadap impor. Kekhawatiran ini menimbulkan pertanyaan permintaan energi sebagai komponen utama kegiatan ekonomi sehingga ketahanan energi nasional dan pemenuhan akan bahan bakar sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Disisi lain konsumsi minyak bumi semakin meningkat, situasi ini membuat Indonesia yang semula sebagai *ekporter* menjadi *importer* dengan defisit yang semakin meningkat yang ironisnya impor minyak berasal dari negara kecil yang sebenarnya bukan sebagai penghasil minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meningkatnya kebutuhan energi di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh faktor industri saja tetapi oleh sektor transportasi dan komersial yang berpengaruh langsung oleh perkembangan ekonomi. Selain itu penggunaan sektor rumah tangga juga mendorong peningkatan kebutuhan energi secara nasional.

Untuk menyikapi ketergantungan minyak terhadap negara lain dan mengoptimalkan potensi sumber daya energi nasional konsep ketahanan energi menjadi penting. Pemerintah telah menempuh sejumlah kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi nasional antara lain melalui pengembangan kebijakan energi yang bertumpu kepada kebutuhan menekan subsidi minyak bumi seminimal mungkin, pembaharuan kebijakan guna memperkuat sektor energi nasional dan memperkuat kerangka legislasi serta kebijakan diversifikasi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan energi alternatif. Selain itu Indonesia harus mengejar terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dengan pengelolaan sumber daya energi baru dan terbarukan dalam waktu relatif cepat melalui alih teknologi yang dapat dicapai dengan melakukan kerja sama strategis dengan negara lain tanpa mengganggu kepentingan nasional.

Transformasi penguasaan ilmu dan teknologi perlu diupayakan agar dapat mencapai ambang batas yang dapat memacu tumbuhnya kemandirian dalam upaya pembaharuan sumber daya energi secara keseluruhan. Untuk memahami permasalahan energi dibutuhkan integrasi dari berbagai faktor

yang mendukung antara lain faktor teknis, ekonomi, politik, dan pertambangan nasional. Mengadopsi kebijakan tanpa diiringi oleh analisa kuantitatif atas biaya dan manfaat dari segala tindakan yang tidak wajar. Mengingat tingginya penggunaan bahan bakar minyak bumi dalam penggunaan energi maka penggunaan bahan bakar alternatif perlu terus untuk didorong terutama sebagai subsidi BBM. Berdasarkan pengelolaan energi nasional, kebijakan dapat dibuat secara menyeluruh dan komprehensif dengan energi sebagai pedoman utama. Kebijakan selalu berpegang kepada ketersediaan, penggunaan dan kegunaan energi. Ketika kebijakan yang ada di Indonesia menyeluruh maka dapat dipastikan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pertumbuhan produk domestik semakin meningkat produksi yang dihasilkan semakin meningkat pula aktivitas produk barang dan jasa. Di satu sisi aktivitas produksi barang dan jasa selalu mendorong ketersediaan energi. Di sinilah perkembangan teknologi memiliki peran yang berorientasi kepada penggunaan teknologi yang hemat energi yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak murah. Kemandirian ekonomi diperlukan dalam mendorong perkembangan teknologi untuk menerapkan teknologi yang berorientasi kepada tataran efisiensi energi dan ramah lingkungan. Apabila hal ini dapat terpenuhi maka kondisi lingkungan akan menjadi lebih baik di mana dampak dari peningkatan penggunaan energi fosil sangat mempengaruhi terciptanya kerusakan lingkungan hidup dengan timbulnya pemanasan global. selain itu juga kegiatan eksploitasi tambang juga akan menurun sehingga faktor lingkungan akan relatif terjaga.

B. Menciptakan Kekuatan Sumber Daya Manusia Unggul

Kualitas sumber daya manusia menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan di masa depan. Setiap manusia baik secara individu maupun secara organisasi dituntut untuk memiliki kompetensi dan berinovasi guna memacu pembangunan di segala bidang. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang karena setiap manusia mempunyai jalur pendidikan yang menjadikan dirinya tidak langsung menjadi diri yang berkualitas tetapi masih membutuhkan proses-proses menuju ke jenjang yang lebih hebat pada bidangnya di samping perlunya dukungan berbagai macam faktor lainnya. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan bagian dari proses dan tujuan

dalam pembangunan nasional Indonesia, karena pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang kuat akan keterlibatan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung yang diharapkan proses tersebut membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional tidak lagi diukur dari segi ekonomi saja tetapi juga sejauh mana pembangunan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pertumbuhan manusia yang sangat cepat tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia akan mengakibatkan sumber daya manusia yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber daya pembangunan. Tentu saja hal ini masih perlu usaha yang keras dan konsisten agar sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing dengan bangsa yang lain.

Pada era sekarang ini negara-negara berkembang termasuk Indonesia memacu untuk dapat menaikkan pertumbuhan ekonominya yang tentu saja memerlukan kualitas sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya. Selain itu Indonesia juga menghadapi berbagai macam tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa yang telah maju, sehingga pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu kepada manusia dan masyarakat. Faktor-faktor penentu untuk mendukung kemajuan pembangunan nasional sudah terpenuhi seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan sumber daya alam yang melimpah. Kemajuan suatu bangsa bukan ditentukan oleh jumlah penduduknya yang besar, wilayahnya yang luas ataupun kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Banyak contoh negara-negara yang maju dengan keterbatasan kapasitas pendukungnya tetapi dapat menjadikan sebagai negara yang kuat. Kunci utama dari besarnya suatu negara adalah negara tersebut mempunyai sumber daya manusia yang unggul, sehingga pemantapan sumber daya manusia menjadikan hal yang harus dipenuhi dan tidak bisa untuk ditawar lagi. Indonesia mempunyai kandungan sumber daya alam yang melimpah, luas wilayah yang hampir sama dengan wilayah daratan Eropa dan mempunyai sumber daya manusia yang melimpah tetapi belum mampu menunjukkan kejayaannya. Artinya Bangsa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang unggul. Pembentukan sumber daya manusia yang unggul memerlukan proses secara terencana dan berkesinambungan, agar dapat dilaksanakan dengan baik harus ditetapkan program optimalisasi pemantapan kualitas

sumber daya manusia yang hendaknya disusun secara cermat dan berdasarkan kepada metode ilmiah yang berpedoman kepada kebutuhan sesuai dengan bidangnya, baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk kebutuhan masa depan. Bagaimanapun juga pematapan sumber daya manusia yang unggul harus diwujudkan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia mampu untuk menuju kejayaan bangsa yang pada akhirnya memperkokoh pertahanan dan keamanan nasional.

Bangsa Indonesia jalan untuk menuju kemajuan ekonomi tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasang surut kondisi perekonomian Indonesia di tengah kondisi situasi global yang tidak menentu membuat pemerintah untuk selalu siap dalam menghadapi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia mempunyai potensi kekuatan ekonomi dunia dari mulai penguatan struktur ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif sampai dengan modernisasi ekonomi berbasis kualitas yang berkelanjutan. Harapannya adalah Indonesia mampu mencapai kemandirian secara ekonomi. Apabila sektor ekonomi sudah dapat dikendalikan dengan baik, dampak yang mengikuti adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Apabila sektor ekonomi sudah unggul maka konsep kejayaan sudah terbentuk dengan melalui lembaga- lembaga pendidikan yang mewadahi dengan didukung sarana prasarana yang berbasis teknologi, konsep pendidikan dan pelatihan sesuai dengan paradigma kebutuhan dan kepentingan negara. Faktor kemajuan ekonomi merupakan penopang utama mutu dan kualitas pendidikan untuk menghasilkan aset berupa sumber daya manusia yang memiliki keunggulan yang tinggi.

C. Membangun Kemandirian Teknologi

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk memacu peningkatan produktivitas dalam kehidupan berbangsa. Dalam perjalanannya ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi dan globalisasi awal mulanya dikembangkan dan disebarluaskan oleh bangsa-bangsa Barat yang mempunyai sifat rasional ke Indonesia. Semua tokoh kemerdekaan Indonesia bahkan sampai saat ini pada umumnya mendapatkan pendidikan dari Barat. Sekalipun sebagian besar menyadari bahwa pentingnya kepribadian dan budaya bangsa sendiri, tetapi kenyataannya tidak mudah untuk menemukan dan mengembangkan pola pikir yang khas Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang terjadi.

Bangsa Indonesia sekarang ini mengalami kemunduran karakter, sikap mentalitas ingin segera dapat hasil secara instan tidak mau bekerja keras untuk melakukan proses secara wajar telah menggerus karakter Bangsa Indonesia menjadi lemah. Dampak lemahnya karakter merembet kepada rendahnya peningkatan teknologi. Berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU), Indonesia berada pada ranking 80 dari 137 negara. Rendahnya penguasaan teknologi Indonesia tersebut terjadi karena banyak faktor di antaranya lemahnya sinergi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi, masih terbatasnya sumber daya manusia terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama untuk mendukung program penelitian serta pengembangan. Belum optimalnya mekanisme intermedia ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan pengguna, adanya permasalahan difusi atas penyerapan teknologi. Perlu disadari bersama bahwa inovasi teknologi justru berkembang di masyarakat industri bukan dari lembaga riset dan litbang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan rendahnya penguasaan teknologi tersebut, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap serangan siber (Rio, 2016).

Bagi Indonesia, keamanan siber menjadi sangat vital karena sangat erat terkait informasi, data, dan sumber tentang delapan gatra atau asta gatra yang menyusun ketahanan nasional, yaitu: geografi, sumber kekayaan alam (SKA), demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (hankam). Sebagai ilustrasi, menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari total populasi Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa (Setiawan, 2018). Jumlah ini meningkat dari pengguna internet di Indonesia yang mencapai 132,7 juta atau 51,5% dari total populasi Indonesia sebesar 256,2 juta jiwa (Setiadi dkk., 2012). Angka-angka tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, karena dapat dijabarkan lebih jauh ke komposisi umur pengguna internet, sebaran pengguna internet, hingga preferensi pengguna internet. Dengan demikian, angka-angka pengguna internet sebenarnya sudah dengan mudah menggambarkan data-data terkait gatra demografi, geografi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tergambar dari preferensi pengguna internet.

Pada konteks itu, jika keamanan siber tidak dikelola dengan baik, data-data pengguna internet tentu berpotensi disalahgunakan pihak-pihak tertentu,

sehingga dapat mengganggu atau bahkan mengancam gatra pertahanan dan keamanan nasional. Kita menyadari bahwa proses politik di dalam negeri, baik pada tataran lokal (pemilihan kepala daerah atau pilkada) maupun tingkat nasional, sudah sulit dipisahkan dengan aktivitas dunia siber, terutama dalam penggunaan media sosial (medsos). Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa ada pihak tertentu menggunakan medsos sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan politiknya dengan menyebarkan *hoaks*, kampanye hitam, maupun ujaran kebencian—biasanya melalui akun palsu. Kasus seperti itu sudah demikian serius, sehingga sentimen yang menjurus perpecahan muncul ke permukaan, misalnya pada saat berlangsungnya pilkada di Jakarta tahun 2017 lalu (Ramadhan, 2017). Di Indonesia, kasus penyalahgunaan aktivitas siber atau media sosial bisa dikatakan sudah sangat memprihatinkan. Ini bukan tanpa alasan, karena menurut Facebook, Indonesia bersama India dan Filipina menjadi salah satu negara penyumbang akun palsu terbanyak di dunia. Hingga Desember 2017, jumlah akun palsu Facebook di seluruh dunia mencapai 200 juta dari total 2,13 miliar akun aktif media sosial itu. Lebih luas, dalam konteks global, tanpa adanya keamanan siber yang memadai, data-data yang terkait dengan asta gatra ketahanan nasional tentu dapat dengan mudah dimanipulasi kekuatan asing ataupun aktor non-negara untuk kepentingan yang dapat mengganggu atau mengancam ketahanan nasional.

Berbicara keamanan siber dalam ketahanan nasional tentu tidak dapat dilepaskan dengan geopolitik. Secara umum, geopolitik dapat dijabarkan sebagai letak geografis suatu negara dalam kaitan dengan posisinya dalam konstelasi politik dan hubungan internasional, dengan memahami konsepsi ruang, konsepsi *frontier* (batas imajiner dari dua negara), konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan negara. Selain aktor negara, geopolitik sangat dipengaruhi peran dan legitimasi aktor non-negara, seperti korporasi atau LSM yang semakin menguat. Dengan demikian, dapat dikatakan, penguatan keamanan siber tidak terlepas dari tiga unsur, yaitu negara, aktor non-negara, dan individu. Dalam skala nasional, pemerintah sudah mempunyai lembaga-lembaga dan perangkat hukum dalam negeri yang berkaitan keamanan siber. Bahkan beberapa waktu lalu telah dilakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan *hoaks* melalui media sosial.

Dasar hukum untuk mengatur keamanan siber di Indonesia adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan versi

revisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. UU ini mencakup aturan untuk beberapa pelanggaran, seperti mendistribusikan konten ilegal, pelanggaran perlindungan data, akses tidak berizin ke sistem komputer untuk mendapatkan informasi, dan sebuah pengambilalihan atau penyadapan ilegal dan tidak berizin terhadap sistem komputer atau elektronik lain. UU ITE memberikan perlindungan hukum untuk konten sistem elektronik dan transaksi elektronik. Akan tetapi, UU ini tidak mencakup aspek penting keamanan siber, seperti infrastruktur informasi dan jaringan, dan sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keamanan siber.

Berdasarkan UU ITE tahun 2016, pemerintah mengeluarkan peraturan teknis, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP Nomor 71 Tahun 2019 ini mengandung pembaruan terkait penyelenggaraan keamanan siber pada sistem dan transaksi elektronik. Di samping beberapa pasal terkait pelanggaran yang diatur dalam UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019 memiliki aturan lebih kuat terkait perlindungan data dan informasi pribadi, serta otentikasi laman web untuk menghindari laman web palsu atau penipuan. Selain itu, PP Nomor 71 Tahun 2019 menekankan perlunya pemerintah untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap kepentingan masyarakat melalui penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik dan adanya kebutuhan untuk mengembangkan strategi keamanan siber nasional. Akan tetapi, PP Nomor 71 hanya mencakup kejahatan siber yang berhubungan dengan transaksi elektronik, seperti penyalahgunaan data, tanda tangan elektronik tidak terotorisasi, dan penyebaran virus dan tautan. Cakupan terbatas UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 kurang merespons ancaman siber yang terus berkembang, terutama ancaman terhadap infrastruktur penting pemerintah.

Untuk menghadapi ancaman siber terhadap keamanan nasional, Peraturan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Nomor 82 Tahun 2014 menyediakan pedoman pertahanan siber. Peraturan itu adalah satu-satunya peraturan yang menjabarkan definisi keamanan siber: Keamanan siber nasional adalah segala upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi serta seluruh sarana pendukungnya di tingkat nasional dari serangan siber. Segala perkataan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak manapun yang mengancam pertahanan nasional, kedaulatan, dan integritas teritorial dianggap sebagai serangan siber. Tidak seperti UU ITE, peraturan ini mencakup infrastruktur penting dari, misalnya, sistem

keuangan dan transportasi sebagai objek keamanan siber. Akan tetapi, peraturan ini hanya berguna untuk mengembangkan kapasitas pertahanan siber militer, serta dikembangkan dan diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk ancaman siber non-militer maka akan mengacu ke peraturan lainnya, seperti UU ITE.

Umumnya, aturan keamanan siber perlu mengenali pentingnya sektor swasta dalam membagikan dan melindungi informasi, mengembangkan metode dan operasi untuk mengendalikan teknologi, serta cara untuk mengkonfigurasi fungsi perangkat elektronik (Gallagher, Link, & Rowe, 2008). Oleh karena itu, peraturan keamanan siber sebaiknya tidak membatasi penilaian dan pemberlakuan keamanan siber itu sendiri secara umum, melainkan justru melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam menjaga objek dan infrastruktur yang sensitif dalam keamanan siber. Peraturan keamanan siber perlu membedakan dan menjawab kebutuhan sektor publik dan swasta, mengidentifikasi tingkat keamanan siber yang dibutuhkan secara spesifik, dan mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman-ancaman yang baru. Oleh karena RUU Keamanan Siber saat ini masih kekurangan masukan dari badan pemerintah yang lain.

Di berbagai belahan dunia terutama di negara-negara yang sudah maju, teknologi menjadikan sebagai panggung dari semua aspek sisi kehidupan. Teknologi digunakan sebagai alat kemandirian negara dari jurang kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Dengan menggunakan teknologi memungkinkan berbagai bangsa untuk menanam lebih banyak komoditi bahan pangan, memperlambat laju perubahan iklim bahkan dapat menyediakan segala kebutuhan energi untuk memenuhi kebutuhan di berbagai segi kehidupan. Profesor Benyamin Lakitan dalam artikel ilmiahnya berjudul Kebijakan dan Strategi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Indonesia (Lakitan, 2012), memetakan tantangan utama dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia meliputi: pertama, rendahnya kesiapan teknologi Indonesia lebih disebabkan oleh belum mewadahnya unsur-unsur penunjang terutama dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi yaitu peningkatan jumlah pengguna internet, jumlah pelanggan internet dan *bandwidth* internet. Kedua, rendahnya kapasitas inovasi, rendahnya kualitas dan produktivitas lembaga riset dan rendahnya belanja riset dan pengembangan yang menyebabkan inovasi di Indonesia sebagai kategori belum baik. Ketiga, rendahnya kontribusi teknologi terhadap pembangunan

ekonomi yang umumnya di taksir berdasarkan nilai *Total Factor Productivity* (TFP) yaitu kontribusi faktor lain selain modal dan tenaga kerja yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Revolusi Industri menghasilkan perubahan di dalam struktur masyarakat. Perubahan itu mencapai titik *Society 5.0*. Karakteristik tersebut bisa ditandai dengan masyarakat yang sepenuhnya menggunakan informasi dan teknologi. Hal tersebut tentu membutuhkan tantangan yang lebih berat bagi tataran ketahanan dan keamanan nasional. Dengan kondisi demikian maka kemandirian ekonomi sangat diperlukan dalam rangka mendukung perubahan jaman yang lebih maju sebagai upaya tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Kedaulatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam seperti air, udara, minyak bumi, hewan, tumbuhan dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi, misalnya tanpa adanya udara seluruh makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup karena makhluk hidup memerlukan oksigen. Demikian juga dengan sumber daya alam yang lain seperti hutan, air, ikan dan lain sebagainya tidak saja sebagai kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan hidup tetapi juga berkontribusi untuk sarana pembangunan bangsa. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan yang mendasar terkait dengan sumber daya alam adalah bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya alam tersebut supaya dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Dalam pengertian umum sumber daya alam merupakan sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi karena sumber daya alam merupakan komponen dari suatu sistem yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia. Dalam pengertiannya bahwa sumber daya alam sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, sebagai sumber persediaan dan sarana untuk menghasilkan suatu kemampuan. Sebagai upaya dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat dikatakan perlu adanya sesuatu sebagai pendukung dalam memanfaatkan sumber daya alam yang meliputi antara lain harus adanya pengetahuan, teknologi dan kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkannya dan harus ada

permintaan terhadap sumber daya alam tersebut. Seperti contoh tambang emas dan minyak bumi, jika kita belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkannya dan tidak ada permintaan (*demand*), untuk komoditi tersebut maka barang-barang tersebut masih dalam kriteria netral, namun apabila sudah ada permintaan dan tersedianya teknologi maka barang-barang tersebut menjadi sumber daya atau *resource*. Aspek krusial dalam memahami sumber daya alam adalah kapan sumber daya alam tersebut akan habis. Konsep yang diperlukan pemikiran bukan hanya konsep ketersediaan tetapi perlu pemikiran terkait dengan konsep pengukuran kelangkaan. Aspek kelangkaan sangat penting karena disinilah kemudian muncul persoalan bagaimana mengelola sumber daya alam yang optimal. Biasanya tingkat kelangkaan sumber daya alam diukur secara fisik dengan menghitung sisa umur secara ekonomis. Aspek ekonomis ini menyangkut harga dan biaya ekstraksi. Ketika sumber daya alam menjadi langka maka harga akan naik dan konsumsi barang menjadi berkurang sehingga ekstraksi juga berkurang.

Sumber daya alam dan perekonomian pada suatu negara mempunyai kaitan yang sangat erat, di mana kekayaan sumber daya alam secara teoritis akan menunjang pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut sering kali bertentangan karena negara- negara yang kaya akan sumber daya alamnya sering kali merupakan negara dengan tingkat perekonomian yang rendah. Hal ini disebabkan negara yang cenderung memiliki sumber daya yang besar dan hasil bumi memiliki kestabilan ekonomi sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang bergerak pada sektor industri dan jasa. Di samping itu negara-negara yang kaya dengan sumber daya alamnya cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dalam pengolahannya. Lemahnya pemerintahan juga menjadi faktor penghambat dari perkembangan perekonomian negara tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu untuk melaksanakan pembenahan di berbagai sektor dan meningkatkan transparansi dalam pemberdayaan sumber daya alam.

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” . Konsep dikuasai oleh negara dapat diartikan kepemilikan dalam arti yang luas. Dengan dikuasai oleh negara maka seluruh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki adalah untuk kepentingan seluruh rakyat dengan memberikan kewenangan

penguasaan sumber daya alam di Indonesia oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Sumber daya alam di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Dengan pengelolaan oleh negara diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat secara berkeadilan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan berasaskan untuk kepentingan bangsa dan keseimbangan selain mendapat manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Apabila kemandirian ekonomi sudah dicapai dan dapat membangun perekonomian nasional artinya ekonomi nasional dalam kondisi mapan sehingga kedaulatan sumber daya alam semakin dipertegas dengan penguasaan dan kepemilikan oleh negara yang berperan sebagai pengelola sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan investasi yang sangat besar karena padat dengan modal maupun kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang unggul. Kedaulatan sumber daya alam mutlak diperlukan sebagai upaya mendorong perekonomian nasional dan ancaman terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh korporasi asing dapat dihindarkan.

E. Membangun Kekuatan Sosial Budaya Dan Politik

Setelah Perang Dunia ke II berakhir timbul kesempatan dan semangat negara jajahan untuk merdeka. Kesadaran akan pentingnya kerja sama antar bangsa untuk menjaga kedamaian dan ketertiban dunia menjadi kesadaran kemanusiaan di seluruh lapisan dunia. Di Indonesia sejak berdirinya nasionalisme dan kemanusiaan yang merupakan dorongan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam sila-sila dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nasionalisme merupakan perwujudan dari semangat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa seluruh nusantara. Menjaga dan merawat kebhinnekaan dalam satu kesatuan merupakan syarat utama untuk membangun pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama ini Bangsa Indonesia senantiasa mengalami Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap upaya mencapai cita-cita bangsa sehingga pelaksanaan pembangunan tidak optimal. Pasang surutnya pembangunan nasional terjadi mulai sejak Orde Lama sampai dengan era Reformasi sekarang ini tidak terlepas dari masalah ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Para penentu kebijakan dalam hal ini

pemerintahan negara dituntut untuk dapat mengintegrasikan seluruh gatra kehidupan dalam mengambil keputusan politik dan sebagai negarawan yang selalu untuk berpandangan untuk berpihak dan mengedepankan kepentingan rakyat. Sebagai negarawan yang mampu untuk mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila dalam mengambil keputusan yang demokratis baik dalam pengelolaan negara maupun dalam membangun terciptanya kondisi kehidupan yang damai, aman, tenteram dan terciptanya kondisi kehidupan ekonomi yang kuat, maju dan mampu berdaya saing serta kondisi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang terdidik dan cerdas. Setiap pemerintahan yang berkuasa dalam menyusun strategi pembangunan yang berjangka waktu lima tahun harus mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang yang berjangka waktu dua puluh tahun yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain sistem politik dalam negeri tentu saja perkembangan dinamika geopolitik dunia juga sangat mempengaruhi pada tataran politik dalam negeri Indonesia. Dengan latar belakang tersebut iklim sosial budaya, politik dan ekonomi menjadi tidak stabil. Banyak permasalahan yang ditimbulkan seperti menurunnya wawasan kebangsaan. Berbagai permasalahan aktual yang sederhana telah dimanfaatkan sebagai sarana pertarungan politik kekuasaan. Semuanya menggunakan dalih hak sebagai warga negara dari sisi kacamata hukum. Hampir dari semua sisi kebijakan negara yang ditanggapi secara politis. Jalannya roda pemerintahan di negeri ini mengalami gejolak dinamika yang kuat sehingga kewibawaan negara terus digerus. Kepercayaan kepada pimpinan bangsa mudah untuk digoyahkan oleh berbagai analisis politik yang membingungkan rakyat. Wibawa lembaga-lembaga pemerintahan pudar, wibawa fungsi dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif telah pudar. Ketahanan nasional bangsa Indonesia sangat rentan terhadap ATHG dari kekuatan-kekuatan yang melemahkan kedaulatan bangsa.

Kelangsungan hidup berbangsa tentu akan membawa kita pada esensi mengenai sejarah perkembangan budaya dan peradaban bangsa-bangsa di dunia, dengan mempelajari dan memahami sejarah kejayaan dan kepunahan peradaban bangsa-bangsa dapat diketahui faktor-faktor penentu dalam budaya dan peradaban suatu bangsa yang melahirkan kejayaan dan sesuatu hal yang mengakibatkan kepunahan bangsa. Sejarah peradaban bangsa-bangsa didunia akan menunjukkan bahwa setiap bangsa senantiasa akan menghadapi ATGH yang membahayakan kelangsungan hidup, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu keniscayaan

setiap bangsa harus membangun daya tangkal untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan berbangsa. Pendekatan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa antara lain dengan melakukan dua pendekatan : *pertama*, pendekatan kebudayaan dan peradaban, *kedua*, pendekatan terhadap astragatra. Pendekatan budaya dan peradaban ada tiga faktor yang dapat membangun ketahanan nasional antara lain: *satu*, faktor manusia pelaku budaya yang memiliki pemikiran selaku penjurur dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, faktor kelembagaan yang mencakup organisasi, sistem manajemen, peraturan perundangan dan kebijakan publik yang diterbitkan oleh organisasi. *Ketiga*, faktor infrastruktur dan perangkat keras pendukung untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan bangsa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pendekatan astragatra merupakan tindak lanjut dari implementasi dari faktor budaya dan peradaban ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dalam mengelola wilayah geografis negara, mengelola modal manusia Indonesia, mengelola sumber daya alam sebagai kekayaan negara, mengelola kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan nasional demi mempertahankan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila.

Dengan pendekatan tersebut memberikan dampak kepada semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air. Semangat persatuan ini berorientasi kepada menjaga kelangsungan hidup berbangsa yang didasari oleh adanya persamaan tujuan yaitu persamaan nasib dan membangun kesejahteraan yang aman dan adil, makmur; adanya persamaan kepentingan yaitu menghadapi ancaman yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara; persamaan sistem budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap masyarakat Indonesia dalam membangun satu nusa, satu bahasa dan bertanah air satu yang menumbuhkan nilai kebanggaan sebagai jati diri bangsa. Selain semangat persatuan dan kesatuan, semangat cinta tanah air akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan bangsa. Semangat cinta tanah air dan bela negara akan terbentuk dari hasil sinergi dari ketahanan pribadi dan karakter kebangsaan seluruh rakyat Indonesia. Tumbuhnya dorongan perilaku tersebut tidaklah berdiri sendiri tetapi merupakan hasil dari interaksi perilaku masyarakat Indonesia yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Dengan berkumpulnya sekelompok orang yang mempunyai persamaan bahasa, persamaan nasib kemudian menyatukan perjuangan untuk tujuan bersama yang saling memotivasi, saling berinteraksi dan

membentuk rasa kebersamaan kemudian pada gilirannya menyepakati sistem nilai budaya sesuai dengan khas dari kelompok tersebut. Dengan terbentuknya sistem budaya dalam membangun suatu bangsa akan mewarnai cara-cara bangsa tersebut untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang panjang dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila bersumber dari nilai-nilai asli masyarakat dan bangsa Indonesia yang sudah teruji dalam perjalanan waktu dan peristiwa. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan diamalkan dalam kehidupan nenek moyang Bangsa Indonesia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila dapat berperan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga berfungsi yang lainnya seperti ideologi, sumber dari segala sumber hukum dan lain sebagainya. Pancasila bukan sesuatu yang bersifat statis tetapi juga bersifat dinamis. Sifat dinamis tersebut membawa Pancasila selalu dapat mengikuti perkembangan jaman. Kandungan nilai-nilai Pancasila yang bermakna ideal dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan berkeadilan. Kehadiran Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia akan menunjukkan Pancasila sudah mendarah daging dan urat nadi di seluruh lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kemandirian ekonomi dalam keadaan kondisi perekonomian yang terbuka dan terintegrasi pada perekonomian dunia menuntut kemampuan daya saing yang sangat tinggi. Untuk menjadi bangsa yang mandiri di era globalisasi Bangsa Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi dan selalu menumbuhkan akses ke arah globalisasi. Daya saing tergantung kepada kreativitas dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemandirian ekonomi dapat membentuk dan menentukan semangat, sorak, sifat dan struktur pada transformasi sosial pada konsep politik dan sosial budaya, sehingga kemandirian secara ekonomi sangat menunjang arah kreativitas struktur dan tatanan konsep bangsa di masa depan.

KEMANDIRIAN EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Negara Indonesia dapat mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional apabila kemandirian ekonomi telah tercapai. Pasalnya sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai rintangan bernegara, tanpa menutup kemungkinan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, akan menjadikan Indonesia negara yang besar dan maju. Tidak terbelenggu dengan investasi luar negeri misalnya, dengan begitu Indonesia akan lebih berani tampil sebagai dirinya sendiri, tidak lagi tekungkung dengan kebijakan internasional yang cenderung menguntungkan pihak investor dibandingkan kepentingan nasional Indonesia.

Ekonomi yang mandiri dan berdaulat menjadi cita-cita yang selalu dikejar dan ingin diwujudkan oleh seluruh negara di dunia. Apabila kita menilik Tiongkok yang sudah lebih dulu memiliki kekuatan dan kemandirian ekonomi, serta imbasnya pada kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok dalam menjaga keamanan sibernya. Pemerintah Tiongkok memilih untuk menggunakan hasil karya anak bangsa, dibandingkan menggunakan aplikasi produk dari luar negeri guna memproteksi gelombang virus, konten-konten berbahaya, dan penyalahgunaan dari pihak luar. Hal ini membuktikan bahwa SDM Tiongkok mampu berdikari dan bersaing dengan negara lain, sehingga membuat Tiongkok tidak ketergantungan dengan negara lain. Selain itu, secara internasional, Tiongkok juga berani menyuarakan konsep *internet sovereignty* sebagai upaya untuk menyeimbangi dominasi tatanan dunia Amerika Serikat terkait *internet freedom* dan melakukan kerja sama dengan berbagai negara agar tidak ada lagi *digital gap* antara negara maju dan berkembang, monopoli pasar dan paksaan agar negara berkembang mengimplementasi apa yang dianggap negara maju benar (Putri dkk, 2017). Begitu juga dengan Rusia yang berani menentukan arah kebijakannya, walau mendapatkan sanksi embargo karena konflik dengan Ukraina. Kedua negara tersebut, telah memberikan gambaran dengan jelas bahwa kemandirian ekonomi penting adanya untuk dikejar.

Setelah kemandirian ekonomi dapat diwujudkan, maka postur pertahanan negara Indonesia diarahkan sesuai dengan kemampuan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang diprioritaskan untuk menghadapi ancaman nyata dengan tidak mengesampingkan ancaman belum nyata, permasalahan aktual, serta mendukung kemampuan pertahanan dapat

dicapai. Dalam hal menciptakan postur pertahanan negara yang ideal, memerlukan komponen utama seperti modernisasi Alutsista, peningkatan pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi, dukungan sarana dan prasarana yang didukung pemberdayaan industri pertahanan, profesionalisme, serta kesejahteraan prajurit. Selain itu, kemampuan Unsur Utama K/L pada pertahanan nirmiliter diarahkan pada kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Tidak hanya sampai disini, arah kebijakan pertahanan negara yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah dapat diwujudkan secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melalui berbagai upaya dalam pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mengatasi berbagai bentuk ancaman, yakni dengan (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Bahkan berdasarkan buku putih Kementerian Pertahanan RI (2015) untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan kebijakan pertahanan negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara yang meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara mencakup kebijakan pembangunan, pemberdayaan, maupun pengerahan pertahanan negara dengan didukung kebijakan regulasi, penganggaran dan pengawasan.

PUSTAKA RUJUKAN

- Affandi, H. 2020. *Pancasila: Eksistensi Dan Aktualisasi*. Penerbit Andi Yogyakarta. ISBN: 978-623-01-0467. xvi+224.
- Aliansi Kebangsaan, Suluh Nuswantara Bakti, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri TNI-POLRI. 2019. *Menggalang Ketahanan Nasional*. Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. ISBN: 978-623-241-006-0.
- Andy, H. 2020. *Upaya Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan*. <https://eticon.co.id/konsep-pariwisata-berkelanjutan> [Diakses 2022-01-28].
- Christenson, J.A. & Ames, J.W.R.-Jr. (Eds.). 1989. *Community development in perspective*. Iowa State University Press.
- Firdausy, C.M. 2020. *Fundamen Konsep Pembangunan Inklusif Berdaya Saing*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN: 978-602-433-919-7.
- Hidayah, N. 2021. *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Sejarah, Definisi, Prinsip, Dll*. <https://pemasaranpariwisata.com/2021/05/05/pembangunan-pariwisata-berkelanjutan-sejarah-definisi-prinsip-bentuknya> [Diakses 2022-01-28]
- Kamaluddin, L.M. 2002. *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. xxxi+331.
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Lakitan, B. 2012. *Kebijakan Dan Strategi Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Bangsa Indonesia*. Makalah Ceramah pada PPRa XLVII Lemhannas RI, Jakarta, 28 Juni 2012.
- Maltha, H.S. 2014. *Indonesia Melompat Tinggi: Strategi Pemanfaatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Penegakkan Supremasi Hukum Dan Ketahanan Nasional*. Penerbit PT. Gema Insan Seni Produktama. ISBN: 978-602-18829-1-7.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
- Peraturan Menteri Komunikasi Republik Indonesia tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.26 tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Perpres No.53. (2017, Mei 19).
- Peraturan Presiden No.53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
- Widodo, P. 2021. *Jadilah Pelaut Bukan Sekedar Jongos Di Kapal*. *Artikel Utama Kompasiana:Keamanan*. <https://www.kompasiana.com/pudji83367/61b1b09206310e76e05e3de4/jadilah-pelaut-bukan-sekedar-jongos-di-kapal> [Diakses 2022-01-28]

- Putri, N.T., Fasisaka, I., & Nugraha, A.A.B.S.W. 2017. Penanganan Cyber Attacks oleh Pemerintah Tiongkok melalui Kebijakan Network Security Tahun 2000-2015. *J. Hubungan Internasional* 1(1): 1-12.
- Ramadhan, I. 2017. Peran Institusi Internasional dalam Penanggulangan Ancaman Cyber. *Jurnal Populis* 2(2): 495-508.
- Rio, A.A. 2016. *Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa; Geometripolitik dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21*. Proseding Konvensi Nasional VII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII).
- Setiadi, F., Sucahyo, Y. G., & Hasibuan, Z. A., 2012. An Overview of the Development Indonesia National Cyber Security. *International Journal of Information Technology & Computer Science* 6(1): 106-114.
- Setiawan, S.R.D. 2018. *Berapa Lama Rata-Rata Orang Indonesia Gunakan Internet Dalam Sehari?*
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/184500826/berapa-lama-rata-rata-orang-indonesia-gunakan-internet-dalam-sehari> [Diakses 2022-01-28].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

NASIONALISME DAN BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

Agung Kurniawan^{1,2}

¹ Alumnus Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Vokasi, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta

² *Internship* di Lab Data Laut dan Pesisir, Pusat Riset Kelautan, Badan Riset
dan SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan



*Setiap Warga Masyarakat Dapat Ikut Serta Dalam Bela Negara
Sesuai Dengan Keahlian dan Profesinya Masing-Masing,
Karena Mempertahankan NKRI adalah Tugas Setiap
Komponen Masyarakat*

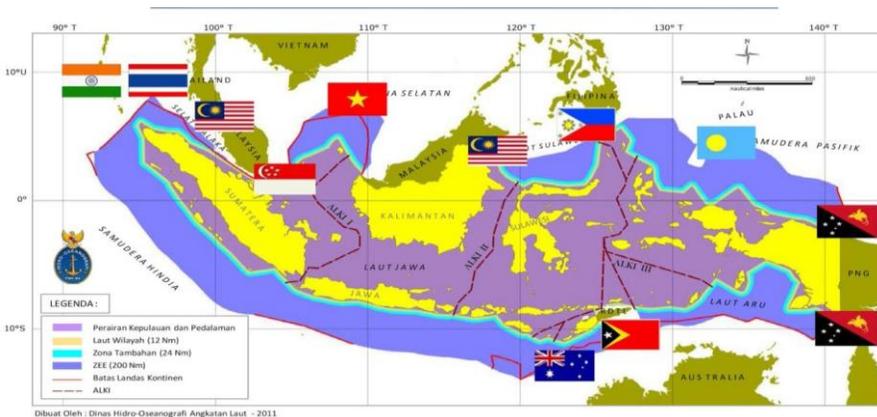
Agung Kurniawan



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara resmi telah dicituskan sejak Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda selanjutnya dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang no 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan di mata internasional membuahkan hasil, yakni setelah ditandatanganinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional di Montego Bay Jamaica, pada tahun 1982 (*United Nation Convention on the Law Of the Sea 1982*). Selanjutnya, Undang-Undang tersebut diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Hal ini semakin memantapkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Santoso, 2008).

Wilayah Negara Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga di darat maupun di laut. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan negara India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea, sedangkan di darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea, lihat Gambar 6. Batas negara Indonesia baik di laut maupun di darat belum seluruhnya dapat dicapai kesepakatan dengan negara tetangga. Hal tersebut bagi Indonesia merupakan potensi ancaman yang berasal dari 10 negara yang berbatasan langsung dengan tingkat dan jenis ancaman yang berbeda-beda (Dishidros, 2011).



Gambar 6. Perbatasan Indonesia dengan 10 Negara Tetangga (sumber: Dishidros, 2011)

Indonesia yang 2/3 wilayahnya terdiri atas perairan mempunyai kepentingan untuk mengamankan 4 (empat) choke point terpenting, yaitu: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan Selat Lombok. Ke-empat choke point tersebut menjadi perhatian bukan hanya masyarakat kawasan Asia Tenggara, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Ke-empat choke point tersebut merupakan jalur lalu lintas dunia paling padat karena tepat terletak pada jalur komunikasi (*Sea Lines of Communication / SLoC*) dan jalur perdagangan (*Sea Lines of Trade / SLoT*) dunia (Santoso, 2019).

Posisi strategis Selat Malaka telah mendorong keinginan negara-negara di dunia untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan wilayah tersebut. Keinginan negara-negara di dunia itu didasari untuk mengamankan kepentingan perdagangan dan komunikasinya. Bagi Indonesia, keinginan negara-negara di dunia untuk ikut mengamankan secara langsung Selat Malaka merupakan perhatian terhadap kebijakan dalam penerapan pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan, karena hal ini mengindikasikan akan adanya kehadiran kekuatan militer asing untuk mengamankan kepentingan negaranya di perairan Selat Malaka (Buku Strategi Pertahanan Negara 2014 dalam Santoso, 2019).

Pada awal tahun 2019 perairan Laut Cina Selatan kembali memanas, seiring dengan keinginan negara Tiongkok untuk me-reunifikasi negara Taiwan. Sengketa di Laut Cina Selatan telah mendorong kehadiran kekuatan kapal perang negara Amerika Serikat, Inggris dan Jepang dengan dalih melaksanakan latihan anti kapal selam trilateral (Muhaimin, 2019). Kehadiran kekuatan asing di Laut Cina Selatan tentunya menjadi ancaman bagi keamanan di wilayah Asia Tenggara, mengingat beberapa negara seperti Cina, Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan serta Indonesia memiliki klaim atas Laut Cina Selatan (Berlianto, 2019).

Mengacu pada perkembangan lingkungan strategis di kawasan maupun global serta memperhatikan bentangan posisi geografis Indonesia dalam perspektif geopolitik menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki bargaining power dan bargaining position dalam percaturan dan hubungan antar bangsa. Penguasaan ruang baik secara *de facto* maupun *de jure* merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Perubahan ruang suatu negara, baik bertambah maupun berkurang yang disebabkan berbagai hal selalu dikaitkan dengan kedaulatan dan kehormatan suatu negara dan bangsa (Nurwardani dkk, 2016). Hubungan antar bangsa senantiasa diwarnai oleh kerjasama, sekaligus juga ada warna kompetisi. Setiap bangsa, didalam

hubungan antar bangsa tersebut, sering kali berupaya untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasionalnya dengan menggunakan seluruh instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya. Dalam kaitan kepentingan nasional itulah, bangsa Indonesia tentu saja harus mengembangkan dan memiliki kesadaran ruang (*space consciousness*) dan kesadaran geografis (*geographical awareness*) sebagai negara kepulauan. Hal ini tentunya sangat logis dan sangat mendasar, mengingat di satu sisi, posisi geografis Indonesia adalah sangat strategis dan terbuka, serta mengandung keanekaragaman potensi sumber kekayaan alam. Hal ini, tentu saja, merupakan peluang dan keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Pada sisi yang lain, di era modern yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, yang dirayakan secara gegap gempita, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara. Derasnya gempuran kebudayaan asing, yang terfasilitasi dengan media dan teknologi internet, dapat secara bebas leluasa hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan berpotensi mendominasi dan mempengaruhi kebudayaan lokal. Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi pasca tahun 1998, telah bermunculan ideologi yang berseberangan dengan ideologi negara, terorisme, radikalisme serta konflik sosial berbasis suku, ras dan agama. Beberapa permasalahan bangsa tersebut, sedikit banyak menjelaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terkait dengan nasionalisme.

Menurunnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat, sebetulnya bukan merupakan hal yang baru, melainkan permasalahan klasik yang terus dialami bangsa Indonesia, sejak merdeka dari penjajahan kolonial hingga saat ini. Hasil survei sebuah lembaga survei ternama di Indonesia, menunjukkan bahwa sejak 2005-2018 jumlah warga yang pro-Pancasila semakin berkurang sampai dengan 10% pada level pendidikan formal khususnya kelompok muda. Lebih lanjut dijelaskan, pada penelitian yang dilakukan oleh Lembaga yang sama pada tahun 2019, memberikan sedikit angin segar karena menunjukkan nasionalisme masyarakat Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2019.

STRATEGI PENGUATAN NASIONALISME

Nasionalisme dalam pengertian yang sempit merupakan sikap yang meninggikan bangsa sendiri, sikap ini sering dikenal dengan *chauvinisme* yang memiliki arti sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini merupakan sikap yang kurang baik yang dapat menceraiberaikan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Nasionalisme dalam arti luas merupakan rasa cinta yang wajar terhadap tanah air, bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Pada kenyataannya, rasa nasionalisme ini seperti sesuatu yang dapat dirasakan namun sulit untuk dipahami. Setiap orang tentunya memiliki rasa nasionalisme serta memiliki wawasan kebangsaan dalam hati nuraninya. Rasa nasionalisme dapat timbul dan tenggelam secara berbeda untuk masing-masing orang sesuai dengan naluri kejuangannya masing-masing, namun bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat luar biasa kekuatannya.

Lahirnya nasionalisme di Indonesia selain disebabkan perjalanan panjang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum dan politik juga dipengaruhi oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah dalam meraih kemerdekaan, seperti misalnya yang terjadi di Filipina dan India (Kusumawardani & Faturochman, 2004). Sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia disebabkan adanya perasaan senasib sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi subyektif, dan kemudian kondisi obyektif secara geografis menemukan koneksitasnya. Ditambahkan oleh Kusumawardani & Faturochman (2004), ada perbedaan kausal antara nasionalisme di Indonesia dengan nasionalisme di Eropa, yaitu bila nasionalisme di Indonesia muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial, tetapi di Eropa, nasionalisme lahir akibat adanya pergeseran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri sebagai dampak dari revolusi industri.

Nasionalisme pada masa Orde Lama dibangun untuk membuat Indonesia ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan budaya lokal dan nasional serta sekeras mungkin menutup masuknya pengaruh kebudayaan asing. Pada masa Orde Baru nasionalisme dipupuk dan dibentuk dalam doktrin-doktrin yang bersifat *top-down* serta memberikan kesan yang mendalam dengan ditandai adanya legitimasi kekuasaan yang bersifat militeristik dari tingkat atas sampai kebawah. Hal ini berubah setelah memasuki era reformasi, dimana nasionalisme mendapatkan tantangan yang signifikan seiring era

baru yang mengusung kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat yang mendapat tempat secara luas.

Upaya mendirikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Ir. Soekarno mengadopsi gagasan Ernest Renan, tentang nasionalisme yang merujuk pada kesempatan politik untuk mencapai cita-cita masa depan bersama. Cita-cita tersebut sebagai bangsa yang senasib sepenanggungan dan kesediaan berkorban untuk menjaga semangat kebangsaan. Nasionalisme, dalam pandangannya, bukanlah nasionalisme sempit, melainkan lebih mencerminkan humanisme dan internasionalisme yang terlahir dari tiga kondisi, yakni: Kondisi adanya eksploitasi ekonomi; Kondisi adanya kekecewaan politik akibat dominasi kekuasaan asing; Dan kondisi hilangnya hak mengembangkan kebudayaan lokal di bawah kekuasaan sistem Pendidikan kolonial.

Pada era kolonial, nasionalisme dibangun atas kesadaran bersama yang dipupuk atas dasar perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan untuk terbebas dari belenggu penjajahan kolonial. Selanjutnya pada pemerintahan orde lama, nasionalisme dibangun untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan mengedepankan kebudayaan lokal dan nasional, serta dengan sekeras mungkin menutup masuknya pengaruh kebudayaan asing. Pada era Orde Baru, nasionalisme dibangun dalam bentuk doktrin-doktrin yang bersifat *top-down*, serta terkesan digunakan sebagai legitimasi kekuasaan yang bersifat militeristik. Nasionalisme mendapatkan tantangan yang signifikan di era reformasi. Hal ini ditandai dengan mulai terpinggirkannya muatan Pancasila di level pendidikan formal yang sebagaimana besar terfokus hanya pada perkembangan teknologi dan ekonomi.

Memudarnya nasionalisme di era reformasi ini, juga dapat disoroti dari maraknya konflik sosial berbasis ras seperti kasus Poso, Ambon, Aceh, Papua serta lepasnya Timor-Timur dari Indonesia. Bermunculnya ormas-ormas yang menegaskan identitas kultural, serta banyaknya ideologi alternatif, kerap bertentangan dengan ideologi bangsa. Ditambah lagi maraknya berbagai narasi primordialisme, dan sentimen berbasis isu SARA yang berkembang di masyarakat pada saat pilpres dua periode terakhir, seolah membuat sekat-sekat kultural menjadi lebih kuat dan tidak terhindarkan. Berangkat dari kenyataan ini, nasionalisme perlu disuarakan kembali untuk menjaga kedaulatan bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jika tidak, maka persatuan dan kesatuan akan terancam dan generasi mendatang akan bersikap apatis terhadap negerinya sendiri.

Jika nasionalisme, dalam konteks dulu dibangun untuk membentuk kesadaran kolektif demi memerdekakan diri dari kolonialisme, maka di era kontemporer ini nasionalisme harus dibangun untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi yang tepat dan efisien dalam upaya menumbuh-kembangkan kembali nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya di kalangan kelompok muda. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan kembali nasionalisme di tingkat pendidikan formal. Muatan Pancasila wajib diberikan serta diamalkan di semua tingkat pendidikan formal, dengan penerapan yang tepat. Hal kedua, masih dalam level pendidikan formal, narasi-narasi sejarah tentang kepahlawanan yang wajib muncul kembali, diketahui, dan dipahami oleh generasi muda. Misalnya, kisah tentang ikrar Sumpah Pemuda terkait kesadaran berbangsa dan bernegara yang digagas oleh kelompok muda dan menjadi cikal bakal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, model pendidikan karakter yang dilakukan oleh K.H. Dewantara yang menitikberatkan pada pendidikan karakter pada bidang kesenian dan kebudayaan, dalam upaya memperhalus budi pekerti dan kemanusiaan masih relevan untuk diterapkan. Hal ketiga, penguatan nasionalisme dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya populer, seperti kegiatan olah raga, musik, film, kompetisi pendidikan, dan masih banyak lagi. Suksesnya perayaan Asian Games di Indonesia 2018, yang dibarengi dengan meningkatkan prestasi Atlet-atlet Indonesia, terbukti berhasil dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia di kalangan masyarakat. Selain itu, pada tahun 2019, kemenangan siswa Indonesia dalam meraih medali emas di Olimpiade Matematika di Lucknow India, dan kemenangan penyanyi muda Indonesia, Claudia Emmanuela Santoso, dalam ajang pencarian bakat di Jerman pada tahun yang sama, juga sukses dalam membangun nasionalisme di kalangan masyarakat. Sebagai bangsa yang terdiri dari beragam unsur kebudayaan, Indonesia memiliki keunggulan di bidang kreativitas seni dan budaya sehingga nasionalisme dapat diinternalisasi dan diolah secara kekinian dengan menonjolkan kebhinekaan budaya dalam bentuk kegiatan-kegiatan kreatif di kancah internasional untuk rasa kebanggaan terhadap Indonesia.

BELA NEGARA

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan.

Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep bela negara diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara, secara fisik, diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa.

Sementara itu, pembelaan negara secara non fisik, diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa. Bela negara non fisik juga bisa diartikan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Selain itu, pembelaan non fisik bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.

Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subyek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara, misalnya Israel, Iran dan Singapura, memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat, kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental atau keyakinan keagamaan. Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang.

Pada beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya. Dalam beberapa kasus milisi, bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer, seperti Amerika Serikat National Guard. Sementara di negara lain, seperti Republik China (Taiwan), Republik Korea, dan Israel, wajib militer untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas nasional.

Sebuah pasukan cadangan militer, berbeda dari pembentukan cadangan, kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer, yang merupakan kelompok atau unit personel militer, yang tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka, sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan negara.

PENGERTIAN BELA NEGARA DI INDONESIA

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak, dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara.

Proses pembelaan negara, di Indonesia, sudah diatur secara formal ke dalam Undang-undang. Diantaranya sudah disebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas, mulai dari pemahaman yang halus hingga keras. Diantaranya dimulai dengan terbinanya hubungan baik antar

sesama warga negara hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing secara nyata. Hal ini merupakan sebuah bukti, adanya rasa nasionalisme yang diejawantahkan ke dalam sebuah sikap dan perilaku warga negara, dalam posisinya sebagai warga negara. Didalam konsep pembelaan negara, terdapat falsafah mengenai cara bersikap dan bertindak yang terbaik untuk negara dan bangsa.

Kembali melihat sejarah jauh ke belakang, pada masa pendudukan Jepang, Kota Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi *Bukittinggi Si Yaku Sho* yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumber: <https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara>).

UNSUR DASAR BELA NEGARA

Didalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya adalah : Cinta Tanah Air Kesadaran Berbangsa & bernegara Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara Rela berkorban untuk bangsa & Negara Memiliki kemampuan awal bela Negara Contoh-

contoh aksi bela negara: melestarikan budaya belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan lain-lain.

Dari contoh aksi bela negara tersebut di atas, secara lebih lanjut bisa didetilkan menjadi contoh proses pembelaan negara. Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam, diharapkan bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar. Sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing.

Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Meninggalkan korupsi, karena korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan.

DASAR HUKUM BELA NEGARA

Sebagai bagian besar dalam hegemoni penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Bela negara berlandaskan atas beberapa dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu, Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa:

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Serta Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun. Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.

Lebih lanjut terdapat pula Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengamanatkan melalui pasal 9 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya pada ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan kewarganegaraan;
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
4. Pengabdian sesuai dengan profesi.

FUNGSI DAN TUJUAN BELA NEGARA

Bela negara sebagai tugas mulia setiap masyarakat dalam dinamika berbangsa dan bernegara dimaknai dengan fungsi otentik keamanan negara. Fungsi utama dari bela negara itu sendiri adalah Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman; Menjaga keutuhan wilayah negara; Merupakan kewajiban setiap warga negara, dan Merupakan panggilan sejarah. Lebih lanjut, Bela Negara memiliki tujuan, diantaranya: Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, Melestarikan budaya, Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan Menjaga identitas dan integritas bangsa/ negara.

Dengan adanya ‘Program Bela Negara’, setiap entitas yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan disatukan oleh semangat juang para pahlawan dan pendiri Republik ini. Semangat kesatuan secara perlahan namun pasti akan terpupuk menjadi sebuah kekuatan besar untuk menyokong pertahanan republik ini, yang didukung melalui sistem pertahanan semesta sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 30 (2) *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”*

MANFAAT BELA NEGARA

Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara: Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Melatih jiwa *leadership* dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Membentuk Iman dan Taqwa pada Agama yang dianut oleh individu. Berbakti pada orang tua, bangsa, agama. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan keluarga.

Membentuk keluarga yang sadar hukum di dalam lingkungan keluarga. Meningkatkan iman dan takwa dan iptek di lingkungan sekolah. Kesadaran untuk menaati tata tertib di lingkungan sekolah. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam lingkungan masyarakat. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama di lingkungan masyarakat. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku lingkungan negara. Membayar pajak tepat pada waktunya di lingkungan negara. Itulah penjelasan bela negara dengan fungsi dan tujuan mengapa bela negara dilakukan, semoga dengan melakukan hal itu manfaatnya bisa dirasakan dan bisa menjadi salah satu bagian dalam menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini.

BELA NEGARA DALAM KONTEKS MILENNIAL

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadikan generasi muda Indonesia lebih mudah menyentuh teknologi sedari dini, dan memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan. Istilah generasi *millennial* memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari *millennials* yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Dalam laporan tersebut Ericsson mencatat, produk teknologi akan mengikuti gaya hidup masyarakat *millennial*. Sebab, pergeseran perilaku turut berubah beriringan dengan teknologi. "*Produk teknologi baru akan muncul sebagai akomodasi perubahan teknologi,*" ujar Presiden Director Ericsson Indonesia Thomas Jul (Keminfo, 2016).

Berdasarkan fakta tersebut, adanya celah bela negara yang dapat dilakukan para *millennial* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat juga menimbulkan ancaman sebagai sisi negatifnya. Pertahanan dengan sistem siber (*cyber*) hadir sebagai solusi mengatasi permasalahan tersebut. Perang siber (*cyber war*), adalah semua tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terkoordinasi dengan tujuan mengganggu kedaulatan negara. Perang siber dapat berupa serangan terorisme (*cyber terrorism*) maupun mata-mata/spionase (*cyber espionage*) yang mengganggu keamanan nasional. Urgensi pertahanan siber ditujukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman ancaman dan serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pertahanan Siber).

PERSPEKTIF KETAHANAN NEGARA

Ketahanan Nasional memerlukan suatu sistem pelaksanaan terintegrasi yang mengacu pada dinamika geopolitik. Sistem terintegrasi itu dapat dituangkan dalam suatu sistem bela negara yang sudah memiliki pijakan hukum kuat pada UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No. 3/2002). Pasal 9 UU No. 3/2002 menyebutkan: (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara; (2) Keikutsertaan warga negara dalam

upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: [a]. pendidikan kewarganegaraan; [b]. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; [c]. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan [d]. pengabdian sesuai dengan profesi. Walau sudah memiliki landasan hukum yang solid, hingga kini Indonesia belum memiliki sistem pelaksanaan bela negara yang komprehensif.

Ketahanan nasional yang terintegrasi dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi penting melihat kemajemukan yang ada di Indonesia. Kemajemukan tersebut adalah aset nasional yang dapat mendukung terbentuknya ketahanan nasional yang terintegrasi serta tumbuh Bersama nasionalisme. Menurut Notonagoro, seorang ahli filsafat dan hukum dari Universitas Gajah Mada, nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat “majemuk tunggal” (Bhinneka Tunggal Ika). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut: (1). Kesatuan Sejarah. yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarahnya yang panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga akhirnya muncul penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka nasionalisme mula pertama dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. (2). Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan secara terpisah dan bersama-sama. (3). Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yang serumpun dan mempunyai kaitan dengan agama-agama besar yang dianut bangsa Indonesia. (4). Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama yaitu tumpah darah Indonesia. (5). Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cita-cita, pandangan hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa lalu maupun pada masa kini.

Bagi bangsa Indonesia, mengutip sejarawan sosial Charles Tilly, Nasionalisme kita adalah ‘*state-led nationalism*’, yakni semacam nasionalisme yang dibangun dari atas, dan lalu meluncur ke bawah. Artinya, negara harus membentuk watak dan karakter serta memberi arah bagi anak bangsa. Negara harus melakukan konstruksi wawasan kebangsaan sebagai ‘proyek bersama’ (*common project*) bagi seluruh warganya. Namun

demikian, apa yang diupayakan negara tentu saja harus dipahami, dimengerti dan didukung oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali (Sumber: <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd>).

Sebagai komponen dalam pertahanan nasional, terdapat komponen pendukung yang dikelompokkan dalam lima suku komponen pendukung, yakni Garda Bangsa, tenaga ahli sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya, warga negara lainnya, industri nasional, sarana dan prasarana, serta sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan. Intelektual muda menempati posisi sebagai komponen pendukung yang sangat potensial dalam mengembangkan potensi pertahanan nirmiliter, di mana pertahanan dilakukan melalui usaha tanpa menggunakan kekuatan senjata, melainkan dengan pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Dalam masa damai maupun masa perang, sesungguhnya kalangan intelektual muda sebagai garda bangsa dalam pertahanan nirmiliter, memiliki peran yang vital dan krusial sebagai kekuatan potensial agen perubahan dalam pembentukan watak dan karakter bangsa. Di tengah tantangan perubahan yang membawa tata laku dan tata nilai baru, kalangan muda terpelajar harus mampu membekali dan membentengi diri dengan wawasan kebangsaan yang kuat. Generasi muda, utamanya para intelektual muda harus mampu memilih dan memilah tata nilai baru yang tidak sesuai dengan identitas dan jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong (Sumber: <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd>).

PENUTUP

Soepandji & Farid (2018) berpendapat bahwa “Ketahanan Nasional sangat bergantung pada kemampuan mengoptimasi fungsi aspek atau gatra alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan aspek dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Aspek alamiah terdiri dari tiga gatra (tri gatra), yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber kekayaan alam (SKA). Sedangkan aspek dinamis terdiri dari lima gatra (panca gatra) yang mencakup gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya dan gatra pertahanan dan keamanan. Gabungan tri gatra dan panca gatra disebut sebagai asta gatra atau delapan aspek Ketahanan Nasional”.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla. yang telah mendukung pelaksanaan penulisan serta penerbitan artikel ini.

PUSTAKA RUJUKAN

- Dishidros, 2011, *Kajian Pulau-Pulau Kecil Terluar*. Jakarta
- Berlianto. 2019. AS dan Inggris gelar latihan militer bersama di LCS. *Sindonews*. <https://international.sindonews.com/berita/1371128/40/as-dan-inggris-gelar-latihan-militer-bersama-di-lcs> [diakses 17 Desember 2021]
- Muhaimin. 2019. AS amati gelagat china dan khawatir Taiwan digempur. *Sindonews*. <http://international.sindonews.com/read/1370967/42/as-amati-gelagat-china-dan-kawatir-taiwan-di-gempur-1547632906>. [diakses tanggal 17 Desember 2021]
- [Keminfo] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2016. Mengenal Generasi Millennial. *Sorotan Media*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media [diakses 24 Desember 2021]
- [Kemhan] Kementerian Pertahanan. 2017. Sejarah Bela Negara. <https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara> [diakses 24 Desember 2021].
- Kusumardani, A., & Faturochman. 2004. Nasionalisme. *Buletin Psikologi* 12(2): 61-72.
- Nurwardani, P., Saksama, H.Y., Winataputra, U.S., Budimansyah, D., Sapriya, Winarno, Mulyono, E., Prawawatyani, S.J., Anwar, A.A., Evawayany, Priyautama, F., Festanto, A. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Cetakan I. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. ISBN: 978-602-6470-02-7.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pertahanan Siber.
- Santoso. A. I. 2008. *Kajian Pulau-Pulau Kecil Terluar Untuk Menentukan Batas Wilayah Maritim Menggunakan Teknologi penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Pulau Nipa, Provinsi Kepulauan Riau)*, Tesis, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Santoso, A. I. 2019. *Model Ruang Wilayah Pertahanan Dinamis Negara Kepulauan Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (Kasus Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau)*. Disertasi. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. 2018. Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48(3): 436 - 456.

EPILOG: MENUJU NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MODERN, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla¹

Prof. Dr. Widodo Setiyo Pranowo, . S.T., M.Si^{2,3}

¹Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia

²Laboratorium Data Laut dan Pesisir, Pusat Riset Kelautan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

³Prodi Hidrografi, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Jakarta.



*Kilauan emas di cakrawala samudera, kemudian
menghantarkanmu menuju percumbuan mesra,
dengan sinar rembulan*

Harjo Susmoro & Widodo S. Pranowo



TANTANGAN IBUKOTA NEGARA BARU SEBAGAI POROS BARU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Provinsi Kalimantan Timur, seperti yang telah diketahui bersama, bahwa akan ditempati sebagai Ibukota negara (IKN) yang baru. IKN diharapkan nanti menjadi suatu poros pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang baru bagi masyarakat modern Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan suatu ‘*master plan*’ yang integratif dan komprehensif secara multidimensi analisis kebijakan. Multidimensi analisis tersebut tersebut antara lain kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial-budaya, kebijakan lingkungan/ekologi, kebijakan Kesehatan, kebijakan energi, kebijakan pendidikan, dimana seluruh kebijakan tersebut sebenarnya bagian dari suatu sistem keamanan nasional (Grizold, 1994; Susmoro & Pranowo, 2022).

Kalimantan Timur memiliki kondisi alam lingkungan hutan yang bisa dikatakan masih alami, memproduksi banyak oksigen. Namun, juga tetap perlu dipertimbangkan desain pembangunan kawasan IKN baru yang ramah lingkungan dan rendah karbon. Beberapa bagian tanah daratan dari Kalimantan Timur mengandung gambut yang harus tetap tergenangi oleh air, atau harus tetap dijaga sebagai rawa, agar tidak melepaskan karbondioksidanya ke angkasa. Terkuaknya lahan gambut, tidak hanya melepaskan karbon ke angkasa, namun juga bisa teralir ke sungai, yang lebih lanjut mengalir ke laut. Konsentrasi karbon yang berlebihan di laut berpotensi mengasamkan air laut (Wit *et al.*, 2015). Air laut yang asam akan menghambat pertumbuhan kerangka kapur biota laut yang bercangkang, dan juga menghalangi proses pertumbuhan kerangka kapur terumbu karang (Wit *et al.*, 2018). Dampak sistemik dari menghilangnya terumbu karang berarti berkurangnya daerah asuhan larva ikan, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif dampaknya lebih lanjut terhadap ketahanan pangan sumber protein dari laut.

Kalimantan Timur memiliki sumber daya air yang sangat melimpah karena memiliki daerah aliran sungai (DAS) yang sangat luas. DAS Sungai Mahakam adalah yang terbesar/terpanjang di Kalimantan Timur (sekitar 920 km panjang DAS-nya) yang bermuara di Selat Makassar. DAS tersebut melewati 8 wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Penajam Paser dan

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dua dari delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang dilalui oleh DAS Sungai Mahakam (Kemen PUPR, 2017). Sumber daya air yang melimpah ini, harus memiliki ‘*master plan*’ perencanaan pengelolaannya untuk memenuhi kehidupan masyarakat IKN baru dengan proyeksi kebutuhan pendek (10 – 24 tahun kedepan), menengah (25 – 74 tahun kedepan), dan jangka panjang (75 - 100 tahun kedepan). Rencana pengelolaan tersebut meliputi program konservasi sumber daya air untuk berbagai sendi kehidupan yang membutuhkan pengairan, termasuk sumber daya air konsumsi penduduk IKN. Program konservasi sumber daya air tersebut harus pula mempertimbangkan pertumbuhan dan pengembangan IKN yang tidak mengancam berkurangnya/ tidak habisnya sumber daya air tersebut.

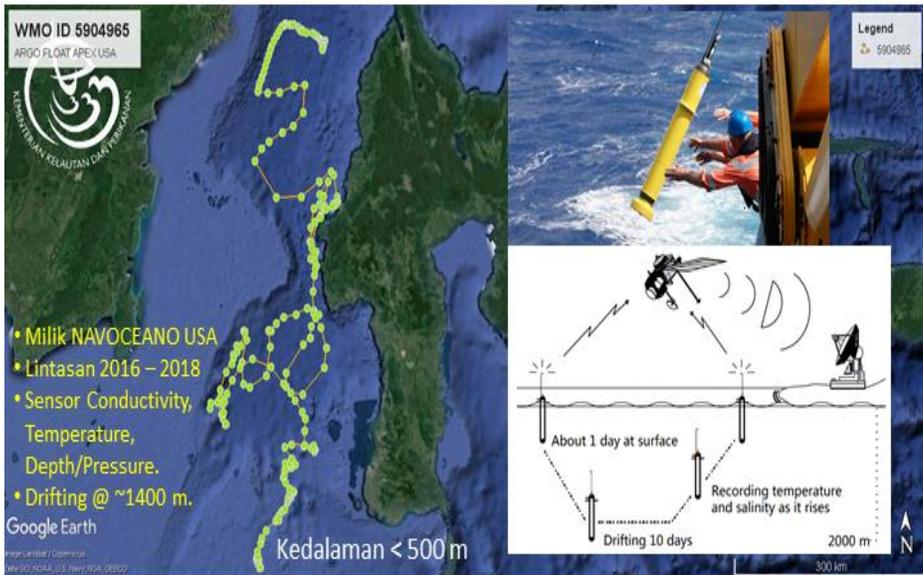
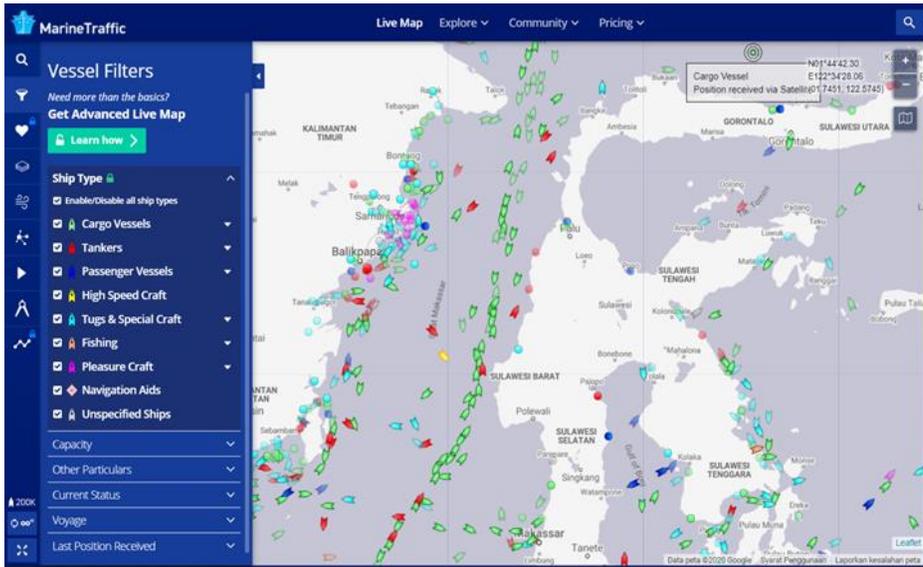
Salah satu tantangan dari DAS Sungai Mahakam adalah wilayah dataran rendah di sepanjang DAS yang memiliki potensi tergenang saat musim penghujan. Terdapat dua periode puncak musim penghujan yang umum terjadi di Kalimantan Timur, yakni sekitar Desember-Januari, dan April-Mei setiap tahunnya. Kedua periode musim penghujan tersebut harus dipertimbangkan kedalam penyusunan ‘*master plan*’ pembangunan struktur dan infrastruktur IKN, dalam rangka menghindari terjadinya bencana banjir ketika IKN telah beroperasi.

DAS Sungai Mahakam, juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai alur transportasi (*waterways*) dalam rangka mewujudkan IKN yang ramah lingkungan dan rendah karbon. Untuk keperluan ini maka diperlukan pengukuran yang sangat detail tentang: kedalaman sungai; slope, geologi/geomorfologi sempadan sungai; arus dan debit sungai, dan kondisi danau terdekat yang terhubung dengan DAS Sungai Mahakam. Data dan informasi tersebut, bersama dengan data curah hujan, kemudian dipergunakan sebagai input kedalam simulasi pemodelan banjir 25 tahunan, 50 tahunan dan 100 tahunan. Hasil simulasi tersebut salah satu outputnya adalah tinggi muka air pada DAS Sungai Mahakam. Data dan informasi tinggi muka air 25 tahunan, 50 tahunan dan 100 tahunan dapat dipergunakan untuk bahan pertimbangan mendesain/membangun ketinggian kolong jembatan, sehingga masih memungkinkan dengan luasnya kapal-kapal berlalu lintas melewati kolong jembatan tersebut. Data debit dan volume aliran DAS Sungai Mahakam dan danau terdekat bisa juga dipergunakan untuk mendesain pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi baru terbarukan.

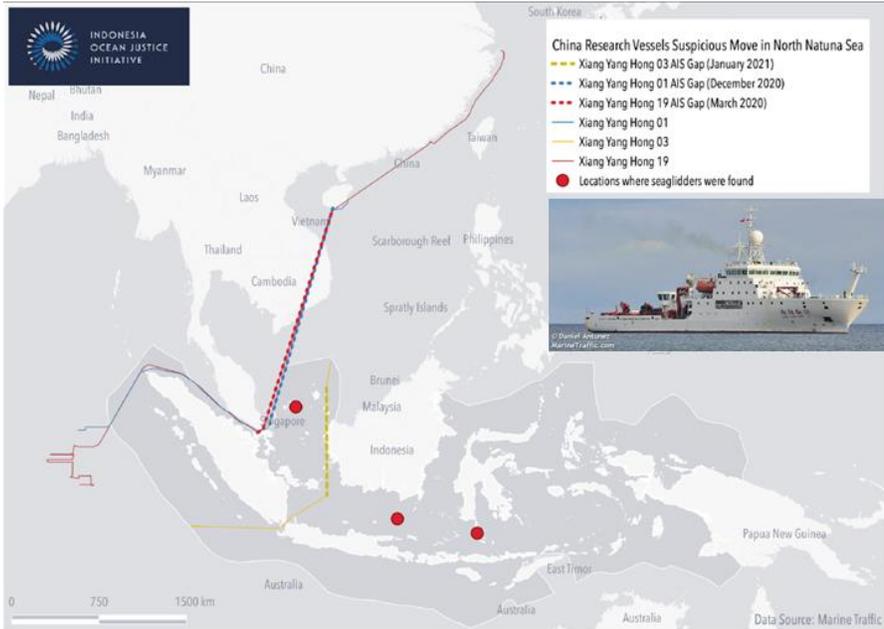
TANTANGAN KEAMANAN NASIONAL BAGI IBUKOTA NEGARA BARU

Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan alur lintas kepulauan Indonesia (ALKI 2), lihat Gambar 8 ATAS. Hal ini menyebabkan Selat Makassar berpeluang besar dilewati oleh berbagai kapal perang/kapal selam (militer) asing, dan/atau instrumen robotik baik yang saintifik riset (Gambar 8 BAWAH), maupun yang diduga mata-mata (Gambar 9 ATAS). Pada tahun 2018, 2020 dan 2021, *Indonesian Ocean Justice Initiative* melaporkan adanya dugaan kapal-kapal riset Tiongkok yang melepaskan instrumen *Sea Glidder* di perairan territorial Indonesia ketika kapal-kapal tersebut berlayar melintasi ALKI (IOJI, 2021), lihat Gambar 9. Peluang tersebut perlu dipikirkan langkah antisipasinya dan/atau langkah memperkecil peluang tersebut. Mungkin saat ini, misi *Sea Glidder* tersebut masih dalam taraf riset, namun seiring perkembangan teknologi, patut diwaspadai pula kemungkinan *Sea Glidder* dilengkapi dengan pengandali/kontrol jarak jauh dan dilengkapi dengan misil bawah air yang bisa ditembakkan ke atas, menembus lapisan permukaan air kemudian menuju ke angkasa.

Perlu dipertimbangkan pula, dibentuknya tim kajian UNCLOS untuk mengkaji apakah dimungkinkan penutupan ALKI 2 dengan alasan untuk keamanan nasional IKN, dan/atau membangun rute baru pengganti untuk ALKI 2, dan/atau mengoptimalkan ALKI 3 sebagai pengganti ALKI 2. Sebagai alternatif lain, diperlukan kajian: peningkatan frekuensi patroli keamanan laut dengan KRI yang memadai, baik dari sisi kuantitas jumlah kapal dan kualitas dimensi dan persenjataan; memperbanyak pemasangan ‘*hydrophone*’ di dasar Selat Makassar untuk memantau kapal selam/instrumen robotik mata-mata yang berpeluang lalu lalang di Selat Makassar; meningkatkan kuantitas dan kualitas patroli gabungan kapal dan pesawat udara.



Gambar 8. [ATAS] Aktivitas lalu lintas kapal di Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 Selat Makassar (Sumber: Marine Traffic, 2020). [BAWAH] Robotif Autonomous Profiling Float (Argo Float) instrumen pengukur suhu laut, salinitas dan tekanan, milik NAVOCEANO Amerika Serikat yang lalu lalang melayang (*drifting*) mengikuti arus di kolom laut Selat Makassar (Sumber: Pranowo, 2020).



Gambar 9.[ATAS] rute pelayaran kapal riset Tiongkok melalui ALKI 1 2020 – 2021 dan diduga melepaskan Sea Glidder di perairan teritorial Indonesia. [BAWAH]. Rute pelayaran kapal riset Tiongkok Yuan Wang yang dilengkapi dengan satellite data receiver 6 pada April April 2018. (Sumber: IOJI, 2021)

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pemindahan Ibukota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta menuju ke Kalimantan Timur, memerlukan ‘master plan’ yang komprehensif dan integratif, dan disertai kajian atau analisis manajemen risiko. Dampak penting hipotetik terhadap IKN baru dan IKN lama harus diproyeksikan dan dianalisis dalam rangka memikirkan rencana pembangunan rendah karbon jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan berbasiskan kepada pilar lingkungan hidup/ekologi, pilar ekonomi dan pilar sosial, dalam rangka menuju negara Republik Indonesia yang modern, aman, adil dan sejahtera.

PERSANTUNAN

Kedua penulis memiliki kontribusi yang sama sebagai penulis utama dari artikel ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I selaku Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas yang telah memberikan fasilitas kepustakaan pencarian bahan rujukan untuk menyusun karya tulis ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si, Letkol Laut (P) Dr. Dian Adrianto, S.Si, M.Si dan Letkol Laut (KH) Dr. Agus Iwan Santosa, S.T., M.T untuk *fruitful discussions*.

PUSTAKA RUJUKAN

- Adrianto, A. & Djatmiko, E.B. 2020. The 6-Hz wave measurements in Western Java Sea and its preliminary characteristics analysis. *Advances in Environmental Sciences* 12(1): 66-82.
- Alwi, M.B. & Purnomo, A. 2022. Membangun Kemandirian Ekonomi Dalam Rangka Menyiapkan Kemandirian Bangsa Guna Mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Buku Bunga Rampai Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Dewi, K. 2022. Pemanfaatan Bonus Demografi Sebagai Pengoptimalan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Buku Bunga Rampai Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Grizold, A. 1994. The concept of national security in the contemporary world. *International Journal on World Peace* 11(03): 37-53.
- [IOJI] Indonesian Ocean Justice Initiative. 2021. Dugaan pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia oleh kapal-kapal riset Tiongkok. 25 halaman.
- [Kemen PUPR] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. Pola pengelolaan sumberdaya air wilayah Sungai Mahakam. 291 halaman.
- Kurniawan, A. 2022. Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Buku Bunga Rampai Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Manik, D.M.T. & Dewi, K. 2022. Peranan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional. Buku Bunga Rampai Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Marine Traffic. 2020. Marine Traffic Vessel Filters. <http://marinetraffic.com> [Diakses 17 Desember 2020]
- Susgoro, H. & Pranowo, W.S. 2022. Prolog: Keamanan Nasional Untuk Masyarakat Modern. Buku Bunga Rampai Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Pakpahan, N. 2022. Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. Buku Bunga Rampai Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

- Pranowo, W.S. 2020. Ada Apakah Dengan Selat Makassar. Webinar Seri 1 Balai Riset Observasi Laut, Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Purnomo,A., & Putri, N.T. 2022. Merawat Keutuhan Indonesia Guna Membangun Kedaulatan Bangsa Sebagai Modal Dasar Ketahanan Nasional. Buku Bunga Rampai Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Purnomo,A., Putri, N.T., & Pakpahan, N. 2022. Membangun Paradigma Pendidikan Nasional Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusi Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berkarakter. Buku Bunga Rampai Membangun Pola Pikir Ketahanan Nasional guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Wit, F., Rixen, T., A. Baum, A., Pranowo, W.S., A.A. Hutahaean, A.A. 2018. The Invisible Carbon Footprint as a hidden impact of peatland degradation inducing marine carbonate dissolution in Sumatra, Indonesia. *Scientific reports* 8 (1), 17403.
- Wit, F., Müller, D., Baum, A., Warneke, T., Pranowo, W.S., Müller, M., Rixen, T., 2015. The impact of disturbed peatlans on river outgassing in Southeast Asia. *Nature Communications* 6, Article number: 10155.

BIOGRAFI PENULIS



Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., SH., M.H., M.Tr.Opsla, Sejak 2020, Penulis diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas). Kiprahnya, pada sebuah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan masukan kepada Presiden tentang kebijakan-kebijakan strategis nasional.

Lahir di Tegal, 8 Februari 1965, peraih Satya Lancana Adhy Makayasa Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-32 pada 1987 ini pernah menjabat posisi penting, baik TNI AL maupun TNI, di antaranya Komandan KRI Wiratno dan KRI Lambung Mangkurat (1999-2000), Komandan Lanal Cirebon (2005-2007), Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut (2007-2008), Komandan Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim) 2008-2009, Asisten Operasi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Asops Pangkolinlamil) 2009-2010, Paban Strategi Operasi Staf Operasi (Paban Straops) Kasal (2012-2013), Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamla Koarmabar) 2013-2014, Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI (2014-2016), dan Kepala Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal) 2016-2020.

Minat yang luar biasa pada pendidikan tampak pada rekam jejak Penulis, bukan hanya kemiliteran, baik dalam maupun luar negeri, tetapi juga pendidikan umum. Penulis adalah lulusan Administrasi Negara Universitas W.R. Supratman (1992), Teknik Perikanan Universitas Hang Tuah (2000), Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (2006), Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (2008), dan Doktorat Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Jakarta (2017).

Semua gelar akademik tersebut menyusul pendidikan kemiliteran yang diselesaikan Penulis dengan memuaskan, di antaranya On Job Training (OJT) Jeanne D'Arc Prancis (1991), Pendidikan Spesialisasi Perwira (Dikspespa) Artileri (1993), Pendidikan Lanjutan Perwira II Komando Umum (1997), Dikreg Seskoal XXXVIII (2000), Seskogab (CID) Prancis

(2003), Dikreg Sesko TNI XXXVII (2010), serta PPRA Lemhannas RI (2013).

Tanda jasa dan penghargaan yang disematkan kepada Penulis selain Satya Lancana Adhy Makayasa (AAL 32) adalah Satya Lancana Dwidya Sistha I & II, Satya Lancana Komandan KRI, Penghargaan Dharma Wiratama (Seskoal Dikreg 38), Penghargaan Adhi Karya Nugraha (Sesko TNI Dikreg 37), Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha (Lemhannas PPRA 50), Satya Lancana Dharma Nusa, Satya Lancana Wira Nusa, Satya Lancana Wira Dharma, Satya Lancana Kesetiaan VIII, XVI & XXIV, Bintang Yudha Dharma Nararya, serta Bintang Jalasena Nararya.

Karya pertama Penulis lainnya antara lain berjudul : Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI – Negara Tetangga (2017); Pusat Informasi Geospasial Kelautan Pushidrosal (2018); Tol Laut dalam Prespektif Hidrografi (2018); Kajian ROB, Pasang Surut dan Tinggi Muka Tanah Pesisir DKI Jakarta Guna Mitigasi Banjir ROB di Pesisir Jakarta Utara (2018); Kilas Balik Pushidrosal 2017-2018 Refleksi Kinerja Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional (2018); Penamaan Laut dan Samudera Tatacara dan Implementasinya (2019) ; Peran Hidrografi dalam Mendukung Pertahanan Laut di Indonesia (2019); Standar Kualifikasi Kompetensi Hidrografi dan Oseanografi Dalam Mendukung Survei Hidro-Oseanografi (2019); Standar IHO untuk Survei Hidrografi (2019); Edisi Ke-5 Februari 2008 Publikasi Khusus No 44 (Terjemahan) (2019); Valuasi dan Kontribusi Hidrografi sebagai Faktor Pengungkit Perekonomian Nasional (2019); Menyiapkan Mitigasi Bencana melalui Peningkatan Peran Lembaga Hidrografi Nasional (2019); Hubungan ROB dengan Global Warming, dan Antisipasinya Terhadap Kepentingan Pertahanan dan Pembangunan Nasional (2019); Peran Pushidrosal dalam Turut Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (2019); Dewan Hidrografi Indonesia (DHI) sebagai Wadah Pembinaan Surveyor Hidrografi di Indonesia (2019); Implementasi Hasil Training Research and Development Center (TRDC) dalam Meningkatkan Kapasitas Kemampuan dan Kinerja Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional (2019); Kebutuhan Untuk Layanan Hidrografi Nasional - Publikasi IHO (Terjemahan) (2019); Pusat Informasi Geospasial Kelautan Indonesia (2019); Sejarah Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional (2019); Lembaga Sertifikasi Profesi Hidrografi dan Oseanografi serta Upaya Peningkatan Kinerja Personel Berbasis Kompetensi dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Surveyor Hidrografi dan

Oseanografi Di Indonesia (2019); *The Spearhead of Sea Power: Arti Penting Hidrografi, Kepemimpinan Robbani, dan Poros Maritim Dunia* terbit (2019); *Standardisasi Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi* (2020) ; *The Key Of Maritime Decision Making* (2020); dan *Merawat Ketahanan Nasional* (2022); *Kepemimpinan Robani* (2022).



WIDODO SETIYO PRANOWO lahir di Purwokerto. Gelar Sarjana Teknik (S.T.) diperolehnya dari P.S. Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Diponegoro Semarang (1998). Gelar Magister Sains (M.Si) dari Jurusan Geofisika dan Meteorologi Institut Teknologi Bandung (2002). Kemudian bergabung di Kementerian Kelautan dan Perikanan di awal tahun 2003. Melalui program *German-Indonesia Tsunami Early Warning System (GITEWS)* 2007-

2010, diawali menjadi Staff peneliti di *Institute for Environment & Human Security (EHS)*, *United Nations University (UNU)*, di Bonn. Kemudian, gelar Doktor di bidang Tekno-Matematika (Dr.-Ing.) diraihinya pada tahun 2010 dari Universitas Bremen dan *Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research*, Jerman. Sejak 2011 menjadi peneliti bidang Oseanografi Terapan di Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak 2011 pula, aktif sebagai instruktur/ pengajar di sekolah-sekolah kedinasan TNI: STTAL, SESKOAL, SESKO TNI, PUSDIKHIDROS. Jabatan Peneliti Ahli Utama diperolehnya pada 2021. Pada tahun yang sama, berkesempatan sebagai *Visiting Professor* di Universitas Brawijaya. Hingga sekarang, aktif menjadi anggota dewan editor di AMAFRAD Press, aktif juga sebagai editor dan *reviewer* di beberapa jurnal nasional dan internasional baik yang terakreditasi dan terindeks global bereputasi.



ARI PURNOMO lahir di Semarang Jawa Tengah. Gelar Sarjana Teknik (S.T) diperoleh dari Jurusan Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) di Surabaya (2007). Masuk AKABRI pada Tahun 1993 lulus pada Tahun 1996. Mengawali berdinastis di KRI Fatahillah-361 Komando RI kawasan Timur sebagai Asisten Perwira Teknik Senjata. Setelah menempati beberapa jabatan pada beberapa KRI dan menyelesaikan pendidikan secara berjenjang Perwira TNI AL, Tahun 2007 memulai berdinastis di Pushidrosal sebagai Kepala Sub Seksi Verifikasi Peralatan Survei. Setelah menempati beberapa jabatan penting lainnya Tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Dinas verifikasi Peralatan survei dan nautika. Gelar Magister Sains (M.Si.) di Universitas Krisnadwipayana (2019) pada Fakultas Ilmu Administrasi. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sistem Informasi Biro Persidangan, sistem Informasi dan pengawasan Internal (PSP) Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI).



MUHAMAD BASHORI ALWI lahir di Pasuruan, tumbuh besar di kota Malang, Jawa Timur. Merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan XLVII tahun 2001 dan Dikreg Seskoal Angkatan LVI tahun 2018. Menamatkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Jurusan Teknik Elektro Angkatan XXVI tahun 2008 dan memperoleh gelar S2 di Institut Teknologi Bandung pada bidang studi Jaringan dan Telematik pada tahun 2015. Memperoleh sertifikat internasional sebagai *Certified Ethical Hacker* (CEH) dan *Computer Hacking Forensic Investigators* (CHFI) tahun 2020 serta *Certified Security Operation Center Analyst* (CSA) tahun 2021. Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Laboratorium Analisis Evaluasi Simulasi dan Forensik Labpamsisjar Dispamsanal Mabesal.



AGUNG KURNIAWAN lahir, tumbuh dan besar di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, kemudian berpindah ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melanjutkan studi di jenjang perguruan tinggi. Gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (2016), kemudian melanjutkan pendidikan ke satu strata lebih tinggi dengan mengambil gelar Sarjana Terapan bidang Sistem Informasi Geografis (S.Tr.Geo) diperoleh dari Jurusan Sistem Informasi Geografis (SIG), Departemen Teknologi Kebumihan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada (2021). Aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan diskusi ilmiah sejak dari bangku perkuliahan. Beberapa pertemuan dan diskusi ilmiah yang pernah diikuti diantaranya *4th Geomatics International Conference* (2019), *2nd International Conference on Environmental Geography and Geography Education (ICEGE)* (2019), dan Seminar Nasional Penginderaan Jauh ke-5 yang diselenggarakan oleh LAPAN (2018).



DANIEL MARULI TUA MANIK lahir di Bogor. Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) diperolehnya dari Jurusan Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (2005). Pengalaman bekerja di Lembaga pembiayaan dan perbankan sejak tahun 2007 sampai 2018 sebagai koordinator pemasaran dan analisis kredit mikro, kecil dan menengah. Mengawali berdinastis di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada tahun 2019 sebagai calon auditor ahli pertama. Memperoleh sertifikat Auditor Ahli Pertama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2020), saat ini aktif sebagai Auditor Ahli Pertama Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal dan tercatat sebagai anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).



NADIA TALITA PUTRI lahir di Bandung. Lulus jenjang pendidikan Strata-1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana (angkatan 2011). Penulis berkesempatan menjadi Liaison Officer untuk *Head Delegation of the Socialist Republic of Vietnam* dalam kegiatan *the Bali Democracy Forum IV* yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI (2011) dan menjadi bagian Tim Surveyor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik (2015). Selain itu, Penulis juga terjun sebagai Tim Pengajar bagi anak jalanan di Rumah Pelangi Bali hingga awal tahun 2017. Pada tahun 2014, Penulis memperoleh Juara Essay pada kegiatan Subak *Study Camp* Jatiluwih yang digelar oleh Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) program *Healthy Food Healthy Living* (HFHL). Penulis juga sempat mengenyam Program Pendidikan dan Latihan (Diklat) Santri Siap Guna Angkatan 35 yang diselenggarakan oleh Daarut Tauhiid (2018). Saat ini, Penulis menjabat sebagai Analis Persandian di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2019 - sekarang).



NATALINA PAKPAHAN lahir di Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Lulus jenjang pendidikan Strata-1 pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (angkatan 2013). Penulis aktif sebagai penulis dan layouter di Majalah Tekad Ilmu Komunikasi Riau (2015-2017) dan berkontribusi sebagai penulis lepas di Tripriau.com (2016-2017). Pada tahun 2016, penulis memperoleh Juara Penulisan Essay Pengembangan Ekowisata Bahari Pulau Terdepan, Tertinggal dan Terisolir Kepulauan Riau Berbasis Masyarakat dengan Strategi Menjaga Kedaulatan NKRI dan berkesempatan menjadi peserta terpilih dari Universitas Riau mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan tahun 2016 di Kepulauan Riau. Selain itu, penulis juga terlibat aktif dalam kegiatan volunteering Kelas Inspirasi dan Indonesia Mengajar di Riau. Saat ini, Penulis menjabat sebagai Analis Publikasi di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2019 - sekarang).



KARINA DEWI lahir di Jakarta. Lulus jenjang pendidikan Strata-1 pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (2017) dan tengah menempuh Program Studi Strata-2 Jurusan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Selama masa sekolah sampai kuliah penulis aktif dalam kegiatan PMR dan Justitia English Club FH Unsoed. Saat ini, Penulis menjabat sebagai Analis Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2019-sekarang)



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN
NASIONAL**